



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA KOMISI VI DPRRI DENGAN MENTERI
KOPERASI DAN UKM, DIRUT PT BRI (PERSERO) TBK, DIRUT PT BNI
(PERSERO) TBK, DAN DIRUT PT JAMKRINDO.**

- Tahun Sidang : 2020-2021
- Masa Persidangan : IV
- Rapat Ke- : 14 (empat belas)
- Jenis Rapat : Rapat Kerja
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari, Tanggal : Kamis, 1 April 2021
- Waktu : 10.56 s.d 14.14 WIB
- Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPRRI, Gedung Nusantara I Lt, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
- Ketua Rapat : Martin Manurung S.E., M.A., Wakil Ketua Komisi VI DPRRI
- Acara : Evaluasi Pelaksanaan BPUM Tindak Lanjut Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPRRI di Jawa Tengah
- Sekretaris Rapat : Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabag Sekretariat Komisi VI DPRRI
- Hadir : A. Anggota DPRRI:
40 dari 53 orang Anggota dengan rincian :
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)
10 dari 12 orang Anggota
 1. Aria Bima.
 2. Darmadi Durianto
 3. Rieke Diah Pitaloka
 4. ST. Ananta Wahana, S.H.
 5. Sonny T. Danaparamita
 6. I Nyoman Parta, S.H.
 7. Deddy Yevri Hanteru Sitorus, M.A.

8. Dr. Evita Nursanty, M.Sc.
 9. Sondang Tiar Debora
Tampubolon
 10. dr. H. Mufti A. N. Anam
2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)
6 dari 8 orang Anggota
1. Gde Sumarjaya Linggih, S.E.,
M.A.P.
 2. Drs. Mukhtarudin
 3. Lamhot Sinaga
 4. H. Singgih Januratmoko, S.K.H.,
M.M.
 5. Doni Akbar, S.E.
 6. Nusron Wahid
3. FRAKSI PARTAI GERINDRA
(F-GERINDRA)
6 dari 6 orang Anggota
1. Mohamad Hekal, M.B.A.
 2. Khilmi
 3. Dr. Supratman Andi Agtas, S.H.,
M.H.
 4. Ir. H. La Tinro La Tunrung
 5. M. Husein Fadlulloh, B.Bus.,
M.M., M.B.A.
 6. Hendrik Lewerissa, S.H., L.L.M.
4. FRAKSI PARTAI NASDEM
(F-NASDEM)
3 dari 5 orang Anggota
1. Martin Manurung, S.E.,M.A.
 2. H. Subardi, S.H., M.H.
 3. Zuristy Firmadata, S.E., M.M.
4. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN
BANGSA (F-PKB)
5 dari 6 orang Anggota
1. Ir. H. M. Nasim Khan
 2. Tommy Kurniawan
 3. Marwan Ja'far
 4. Drs. H. Mohammad Toha,
S.Sos., M.Si.
 5. Siti Mukaromah, S.Ag.,M.A.P.

5. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)
3 dari 5 orang Anggota
 1. DR. Ir. E. Herman Khaeron, M.Si.
 2. Muhammad Dhevy Bijak
 3. Hj. Melani Leimena Suharli

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)
4 dari 4 orang Anggota
 1. Amin AK, M.M.
 2. Hj. Nevi Zuarina
 3. Rafli
 4. Mahfudz Abdurrahman, S.Sos.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)
3 dari 5 orang Anggota
 1. Abdul Hakim Bafagih
 2. Daeng Muhammad, S.E.,M.Si.
 3. Eko Hendro Purnomo, S.Sos.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)
1 dari 2 orang ANggota
 1. H. Ach. Baidowi, S.Sos., M.Si.

- B. MENTERI KOPERASI DAN UKM,
- C. DIRUT PT BRI (PERSERO) TBK,
- D. DIRUT PT BNI (PERSERO) TBK, DAN
- E. DIRUT PT JAMKRINDO;
- F. UNDANGAN YANG LAIN.

(suara tidak terekam)

JALANNYA RAPAT:

MENTERI KOPERASI DAN UKM:

melalui 8 tahap atau SK dari kami saat ini sedang dalam proses dua tahap terakhir, yaitu tahap 9 dan tahap 10. Nah, kami memang di Pak Ketua, memang diminta cepat Pak ini menyalurkan karena terkait dengan untuk mendorong pemulihan ekonomi.

INTERUPSI F-PG (NUSRON WAHID):

Pak, interupsi Pak.

MENTERI KOPERASI DAN UKM:

Saya bisa sedikit lagi hanya dua.

F-PG (NUSRON WAHID):

Pak satu lembaga pengusul tuh maksudnya apa Pak, semula kan lima, yang satu itu maksudnya apa Pak.

MENTERI KOPERASI DAN UKM:

Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Kota itu. Saya izinkan satu biar.

KETUA RAPAT:

Ya silakan-silakan Pak.

MENTERI KOPERASI DAN UKM:

Nah, BPUM pada tahun 2021 ada 2 agenda BPUM. Jadi, yang pertama adalah menyelesaikan penyaluran bantuan kepada penerima BPUM 2020 berdasarkan data yang telah dikonfirmasi oleh bank penyalur. Jadi data yang lama yang ini yang sekarang sudah tersalur tuh adalah data-data yang sudah penerima lama, lalu melakukan sosialisasi kepala dinas ya Selindo dan masyarakat dalam rangka penyaluran BPUM kepada penerima yang baru. Nah, sebenarnya 12,8 juta itu jauh dari dari cukup karena sebenarnya yang mengajukan ke kantor kami bisa lebih besar, karena itu kami mohon bantuan untuk juga meminta Kementerian Keuangan untuk mengagendakan untuk sekitar 12 juta lagi untuk berikutnya, karena masih banyak yang belum terima terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik.

Terima kasih kepada Pak Menteri.

Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada PT BRI.

DIREKTUR UTAMA PT BRI (PERSERO) TBK:

Terima kasih Pimpinan

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VI yang kami hormati.

Beberapa hal tadi sudah sampaikan Pak Menkop. Kami akan menyampaikan barangkali hal-hal yang tadi belum disampaikan Pak Menkop. Namun, terlebih dahulu kami menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VI yang telah men-*support* kami selama tahun 2020, yang situasinya tidak mudah sehingga kami bisa menghadirkan sebuah kinerja yang menurut hemat kami positif di masa-masa yang sulit seperti itu, aset kami tumbuh, kemudian *reliabilities* kami juga tumbuh, pinjaman kami tumbuh di saat industri tumbuh negatif dan seterusnya dan seterusnya.

Alhamdulillah Pak Pimpinan dan juga seluruh Anggota Komisi VI tanggal 25 Maret kemarin kami telah dengan lancar menyelenggarakan RUPS tahunan dan ditetapkan 65% dari bagian laba 18,6 triliun didistribusikan kepada pemegang saham dalam bentuk deviden dan saya yakin ada bagian yang kurang lebih mungkin 6 triliun lebih kepada pemerintah. Itu yang perlu kami laporkan dan ini semua tentunya tidak lepas dari *support* Bapak Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi VI.

Pimpinan dan juga Anggota yang kami hormati,

Di samping BRI mampu mencetak kinerja yang positif pada tahun 2020, kami juga mengalokasikan *resources* yang sangat besar untuk bagaimana program penyaluran stimulus pemerintah di tahun 2020 dalam rangka pemulihan ekonomi itu berhasil. BPUM menjadi bagian dari seluruh aktivitas kami di dalam membantu pemerintah khususnya di penyaluran stimulus dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

Ada POCK11 untuk menyelamatkan para pelaku UMKM di awal-awal pandemi, kami hampir bisa menyelamatkan 2,8 juta pelaku UMKM. Kemudian juga kami bisa menyalurkan kredit dengan pola penjaminan yang tentunya bekerja sama dengan rekan kami Askrindo dan Jamkrindo, BRI punya peran bisa menyalurkan hampir 10 triliun lebih kepada 17 ribu pelaku UMKM yang tentunya ini tidak mudah, karena mereka dalam situasi yang sulit dan tentunya resiko kredit yang meningkat, atas kolaborasi dengan teman-teman di Jamkrindo dan Askrindo kami bisa melaksanakannya.

Bapak, Ibu seluruh Anggota Dewan yang kami hormati,

Khusus BPUM kami mendapatkan porsi yang lebih karena kami mempunyai jaringan yang cukup untuk bisa membantu program ini berjalan dengan lancar. Kami diberikan landasan hukum yang menurut hemat kami kuat gitu dalam bentuk Permenkop, Permenkop Nomor 6 dan sekarang untuk 2021 juga sudah terbit Permenkopnya yang baru. Dalam perannya BRI sebagai pengusul, BRI men-*support* data penerima, jadi di dalam Permenkop itu ada dua bisnis proses Pimpinan dan Anggota, BRI sebagai pengusul dan BRI sebagai penyalur.

Sebagai pengusul kami bertanggung jawab atas seluruh data yang kami usulkan dan porsi kami sebagai pengusul itu hanya di awal-awal periode pada saat program ini harus segera di-*launching*. Kami punya kontribusi 600 ribu dari 12 juta penerima, kurang lebih ya sekitar 8 atau 9%. Nah, lebih lebih banyak kami berperan sebagai penyalur, dalam rangka dalam kerangka BRI sebagai penyalur, tercatat kami sudah berhasil menyalurkan dan jatuh kepada masyarakat penerima, itu sebanyak 7 juta penerima lebih dengan anggaran terserap hampir 15 triliun. Tentunya kami memanfaatkan infrastruktur yang kami punya, mulai dari jaringan sampai dengan teman-teman mantri. Ada 28 mantri yang berkolaborasi dengan pengusul gitu ya, untuk mengkomunikasikan ini semua. Kita juga buka sarana sarana komunikasi kepada mereka mulai dari SMS *blast* dan juga aplikasi-aplikasi kecil yang bisa diakses oleh masyarakat Indonesia, dan itu menjadikan kami bisa 82% dari populasi calon penerima itu menjadi efektif, menjadi penerima dan bisa mencairkan.

Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi VI yang saya hormati,

Sampai dengan batas waktu 12 Februari 2021 dan ditetapkannya batas itu sebagai batas pencairan terakhir, tentunya masih menyisakan calon-calon penerima yang belum mencairkan. Tercatat ditempat kami BRI ada 1,1 juta calon penerima yang belum mencairkan, karena ini adalah APBN maka berdasarkan instruksi dari Kemenkop, maka anggaran itu kami kembalikan. Dan tercatat sampai dengan hari ini kami sudah mengembalikannya hampir 100% kembali ke kas negara. Dan mudah-mudahan nanti oleh Pak Menteri digunakan lagi untuk menyalurkan di BPUM tahun 2021.

Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota Komisi VI yang kami hormati,

Tadi sudah disampaikan Pak Menteri bahwa kami pun juga mencermati kira-kira efektivitas dari penerima BPUM seperti apa. Oleh karena itu, kami melakukan survei dan kajian. Hasil survei menunjukkan bahwa 69% responden mengetahui tentang program BPUM sebagai hasil dari sosialisasi yang masif antara lembaga pengusul dan penyalur. Jadi kami punya peran untuk mensosialisasikan kepada penerima. Hampir seluruh responden menggunakan dana bantuan sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk kelangsungan usaha, antara lain: membeli bahan baku dan alat produksi. Berikutnya survei juga menunjukkan 97,5% dari responden menyatakan BPUM membuat usaha tetap beroperasi atau sangat bermanfaat bagi kelangsungan usahanya.

KETUA RAPAT:

Pak ini informatif, ini seluruh penerima yang Bapak tanya atau sampel?

DIREKTUR UTAMA PT BRI (PERSERO) TBK:

Sampel Bapak.

KETUA RAPAT:

Oh berapa sampelnya?

DIREKTUR UTAMA PT BRI (PERSERO) TBK:

Kita pakai sampel kurang lebih 5 ribu dan tentunya sampel itu diambil dengan metodologi riset yang lazim kira-kira seperti itu. Kami menggunakan UI Bapak untuk survei ini, jadi independent, 5 ribu Bapak.

KETUA RAPAT:

Pak Bos ya ya

ANGGOTA:

Jaman saya sekolah dulu kalau N itu *sampling* Pak.

DIREKTUR UTAMA PT BRI (PERSERO) TBK:

Keliru-keliru Pak. Saya yang 5000 itu ke BMSI Pak. Ini sebenernya ini Bapak, 1.200, tapi ini independen Bapak, independen ya.

Berikutnya Bapak Ibu sekalian disisi lain ternyata mereka tidak cukup menjadikan BPUM saja sebagai modal kerja untuk kebutuhan peningkatan usaha. Namun berdasarkan hasil survei, mayoritas penerima BPUM membutuhkan modal kerja tambahan dan memilih meminjam di bank ya, antara lain pilihannya adalah KUR.

Bapak Ibu Anggota Komisi VI dan Pimpinan yang selalu saya hormati,

Dengan berakhirnya layanan BPUM 2020, tentunya menyisakan catatan yang jadi ruang perbaikan kami sebagai bank penyalur jika kami mengambil peran kembali nanti di dalam fungsi kami sebagai bank penyalur di tahun 2021.

Demikian yang dapat kami sampaikan dan dapat kami paparkan Bapak Ibu sekalian. Dan terima kasih atas *support*-nya selama tahun 2020 dan sekali lagi pertemuan-pertemuan formal informal yang kita bangun selama tahun 2020, kiranya dapat juga terbangun di tahun 2021, supaya kami BRI dapat keluar lagi dari krisis karena krisis ini belum selesai, dan lolos lagi di tahun 2020 dan tentunya kita bisa menyelamatkan UMKM lebih banyak lagi.

Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan.

Wasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak.

Selanjutnya saya persilakan kepada PT BNI.

DIREKTUR UTAMA PT BNI (PERSERO) TBK:

Terima kasih Pimpinan

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi.

Salam sejahtera.

Om Swastiastu.

Terima kasih.

Yang kami hormati Pimpinan Rapat dan Para Wakil Ketua Komisi VI.

Bapak Ibu Anggota Komisi VI yang kami hormati.

Izinkan kami menyampaikan sedikit tentang visi dan misi BNI, di mana ini adalah salah satu hal yang baru Pak. Ada beberapa yang baru yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu Komisi VI yang kami hormati. Visi BNI saat ini adalah menjadi lembaga keuangan yang unggul dalam pelayanan dan kinerja secara berkelanjutan, jadi ada berkelanjutan Pak, kalau yang lama tidak ada. Jadi saat ini sudah ada berkelanjutan dan sesuai dengan arahan Kementerian BUMN ada tambahan lagi, yaitu bahwa BNI ke depan harus memperkuat layanan untuk mitra bisnis secara global.

Untuk itu, BNI saat ini memiliki 7 kantor cabang di luar negeri, yang mana dia antara lain adalah Singapura, Hong Kong, Tokyo, Osaka, New York, London dan Seoul. Nah, kemudian juga dari beberapa hal tersebut sebagai *outlet* untuk di dalam negeri kami juga memberikan layanan kepada *small loan* ada 41, *consumer loan* ada 12, *small loan* ada 25, *middle loan* ada 23 dan termasuk juga kami juga memiliki KJP, kemudian *printless banking* yang semuanya juga sebagai *entry gate* untuk UMKM.

Kami laporkan bahwa juga bahwa di tahun 2020 BNI terdapat *growth* pertumbuhan kredit sebesar 5,3%. Jadi ini kalau kita lihat total kreditnya adalah 5,3% dan kemudian juga total DPK-nya juga meningkat 10,6%, kemudian juga dari segi total aset meningkat 5,4. Kalau kita lihat *year on year*-nya dibanding dengan industri bahwa industri masih minus, tetapi *growth* dari BNI mengalami pertumbuhan.

Fungsi intermediasi tetap terus kami lakukan dan akan menjadikan ini sebagai bagaimana peran BNI untuk meningkatkan peran peningkatan pembinaan ekonomi nasional yang saat ini kita ketahui sedang dilanda pandemi. Kemudian dari sisi kinerja LDR di tahun 2020 kami mengalami penurunan, karena memang di tahun 2020 agak tersendat penyaluran di bidang kredit seperti tadi kami sampaikan, yang biasanya itu pertumbuhan kredit itu di antara *double digit*. Namun demikian, di tahun 2020 mengalami stagnan di angka 5,3%, sehingga menyebabkan angka LDR-nya menjadi 87,3%. Namun, ini adalah sangat yang angka yang masih ideal untuk industri perbankan NPL mengalami peningkatan menjadi 4,3, kemudian *coverage* sebagai cadangan kami tingkatkan menjadi 182% dan modal kami mengalami penurunan menjadi 15,7%, CAR menjadi 16,8.

Berikutnya yang perlu kami sampaikan adalah pertumbuhan dari segmen perkreditan, untuk pertumbuhan kredit untuk korporasi tumbuh 2,5%, kemudian menengah minus 7,6 dan kami tetap optimis juga ada pertumbuhan di bidang kredit kecil yaitu 12,3%, sehingga secara total untuk ini menyebabkan *loan to deficit ratio* mencapaikan 87,3%.

Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan peran BNI dalam mendukung UMKM seperti juga rekan kami, tadi juga Pak Menteri, kami juga menyampaikan tentang program pemulihan ekonomi nasional yaitu PMK 71 untuk penjaminan kredit, di mana BNI menyalurkan 3 triliun terdiri dari 2.553 debitur. Kemudian PMK-85 atau subsidi bunga UMKM BNI telah menyalurkan 1,05 triliun terdiri dari, 246.000 debitur. Kemudian Permenkop 6 yaitu pencairan bantuan produk produksi usaha mikro, di mana nanti akan sedetailnya akan kami laporkan. BNI telah menyalurkan sebanyak 10,04 triliun atau 4,1 juta penerima. Namun demikian, ini ada yang akan dikembalikan, sudah dikembalikan kepada negara sisanya. Kemudian PMK 70 kredit PEN, dimana BNI waktu itu menerima untuk dana PEN, yaitu 7,5 triliun, kita bisa menyalurkan 28,29 triliun. Kemudian POJK 48 atau dulu POJK 11, saat ini adalah yang diperpanjang POJK 48, kita telah melakukan restrukturisasi kredit sebanyak 123 triliun, di mana di antaranya adalah 33, 21 triliun adalah UMKM.

Selanjutnya untuk penerimaan KUR di tahun 2020, BNI dengan target penyaluran angka nominal adalah targetnya 29,9, *outstanding*-nya berhasil mencatatkan pembukuan 32,6 triliun, dan kemudian dari sisi jumlah debiturnya juga meningkat dari 241.000 menjadi 317.000. Untuk penyaluran KUR-nya sendiri, dengan target 22 triliun tersalur 21, 26. Jadi realisasinya adalah di tahun 2020 itu 21,26 atau 97% dari target.

Kemudian, kualitas kredit KUR juga terdapat perbaikan yaitu pra NPL-nya 0,9%, kemudian NPL-nya 0,2%. Jadi ini adalah hal yang mungkin juga di tengah kondisi pandemi Alhamdulillah masih para pengusaha yang menerima KUR masih mencirikan kinerja yang baik. Kemudian, di Jawa Tengah sendiri beberapa hari yang lalu kita juga mendampingi Komisi VI untuk melakukan kunjungan kerja di mana di Jawa Tengah itu bisa jumlah debiturnya 14.000 tahun 2020, meningkat 3,6 ribu, kemudian untuk penyaluran KUR-nya di Jateng sendiri adalah 2,9 triliun, jadi sebelumnya 2,27 meningkat menjadi 2,9 triliun. Dari sisi kualitasnya juga mengalami penurunan NPLnya dari 0,22 menjadi 0,06% dan ini adalah satu yang sangat bagus sekali, kemudian dari sisi penyaluran KUR ini saya kira sudah jenisnya juga dari sisi KUR kecil, KUR mikro, KUR super mikro semuanya kami ada di Jawa Tengah, jadi merata di Jawa Tengah ini, KUR kecilnya 13.052 debitur, KUR mikronya 2.503 debitur, dan KUR super mikronya 106 debitur.

Selanjutnya dalam rangka pendampingan UMKM, BNI juga melakukan fase yaitu fase produksi, fase proses, fase retail dan fase marketing. Jadi kami membuat beberapa tahapan untuk bagaimana meningkatkan UMKM nih, mulai dari fase produksi, fase proses, fase retail dan fase marketing, semuanya mulai dari bantuan CSR. Kemudian yang sudah mulai layak kita berikan KUR dan berikutnya yang sudah komersil kita berikan skema komersil.

Selanjutnya, untuk mendorong perbankan dan pemulihan ekonomi sebagai pelaku-pelaku UMKM, kami juga memberikan stimulus relaksasi restrukturisasi kredit sesuai dengan POJK 11. Kemudian juga ada kami juga memberikan dorongan kepada para pelaku UMKM untuk melakukan adaptasi bisnis digital, karena di saat pandemi ini betul-betul justru saat ini adalah bagaimana kita mendorong dan alhamdulillah juga ada peningkatan untuk

bisnis digital ini untuk para pelaku UMKM. Selanjutnya, adalah bagaimana kita sudah fasenya biar untuk calon debitur UMKM baru yang kita harapkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Berikutnya karena sekali lagi bahwa BNI ini juga memiliki ciri khusus bahwa kami juga mempunyai 7 cabang *outlet* di luar negeri. Selanjutnya, adalah kami ingin menekankan bahwa UMKM ini bisa *go global* di mana kami juga mendukung promosinya. Kemudian juga dari sisi bisnis prosesnya *financing* dan secara digital kami juga mendukung, karena HCLN atau kantor cabang luar negeri bisa berperan sebagai penghubung dengan market di luar negeri.

Selanjutnya, khusus untuk bantuan produktif usaha mikro beberapa hal tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri tentang syarat penerimanya, Warga Negara Indonesia. Kami sekali lagi BNI di sini sebagai penyalur, kami bekerja sama dengan PNM, di mana PNM adalah sebagai pengusul dan kami sebagai penyalur, di mana salah satunya adalah saat yang pertama adalah Warga Negara Indonesia syaratnya adalah memiliki usaha mikro, kemudian juga bukan berstatus ASN sesuai dengan ketentuan dan tidak sedang menerima pembiayaan dari perbankan.

Nah, ini alur data yang kami sebagai penyalur BPUM yaitu PNM mengusulkan daftar nama calon penerima BPUM kemudian Kemenkop dan melakukan *cleansing* data dan pengecekan slip dan skrip, dan kemudian juga BNI melakukan *cleansing, mapping* data, kemudian BNI melakukan pengecekan kartu ATM pin serta tabungan dan PNM, ini karena kami agak berbeda, kami sebagai penyalur dan bekerja sama dengan PNM menyerahkan kartu ATM dan buku tabungan kepada para penerima melalui AO PNM.

Berikutnya adalah laporan BNI sebagai penyalur, di mana total rekening yang kami buka pada saat itu adalah 4,1 juta rekening dengan nominal yang kami terima adalah 10,04 triliun. Adapun penyerapannya adalah 3,9 juta dan nominalnya adalah 9,4 triliun dan karena kemarin sudah kita kembalikan ke kas negara sebanyak 272.000, nilainya adalah 653 miliar, kami sudah kembalikan ke kas negara. Penyebab pengembalian ke kas negara adalah karena NIK penerima tidak sesuai dengan dukcapil, kemudian juga tidak masuk dalam skala usaha kecil, kemudian penerima masuk dalam skala usaha menengah besar, ada catatan slip kemudian tercantum dalam SIKP, kemudian juga ada penerima telah wafat, kemudian yang ke 7 adalah menerima bantuan lebih dari satu bantuan dan tidak sesuai dengan SK. Selanjutnya, hal-hal yang tersebut kami selalu koordinasikan dengan Kementerian Koperasi yang selalu melakukan koordinasi baik termasuk rapat rapat yang seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Menteri, kami selalu melakukan koordinasi.

Demikian laporan kami, Pak Ketua.

Selanjutnya waktu kami serahkan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumussalam.

Selanjutnya kami persilakan Direktur Utama Jamkrindo mungkin bisa agak singkat Pak, poin-poin yang terpenting.

DIREKTUR UTAMA PT JAMKRINDO:

Baik.

Yang terhormat Pimpinan Rapat sekaligus Wakil Ketua Komisi VI, Bapak Martin Manurung, yang kami hormati Wakil Ketua Komisi VI Bapak Gde Sumarjaya Linggih, dan

Yang kami hormati Ibu Bapak Komisi VI.

Yang kami hormati juga Bapak Menteri Koperasi Direksi BNI dan Direksi BRI.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada PT Jamkrindo untuk memberikan paparan.

Di dalam konteks untuk bantuan produktif usaha mikro ini dapat kami sampaikan bahwa PT Jamkrindo tidak mengambil peran sebagai pengusul maupun penyalur. Sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Penjaminan Fungsi dari PT Jamkrindo ini adalah melakukan penjaminan baik secara finansial maupun non-finansial untuk mengatasi permasalahan kekurangan agunan, sebagaimana digambarkan dalam slide ke 10, next slide slide halaman 10.

Nah, di dalam slide ini dapat kita lihat bahwa UMKM menghadapi beberapa tantangan, 60% mengalami tantangan di bidang permodalan, kemudian berikutnya ada pemasaran, bahan baku, keterampilan, maupun perijinan. Dan kategori UMKM ada tiga jenis, yaitu UMKM yang tidak *feasible* dan tidak *bankable*, kemudian UMKM yang *feasible*, namun belum *bankable* artinya belum memiliki agunan, dan yang ketiga adalah UMKM yang *feasible* dan *bankable*. Nah, fungsi dari PT Jamkrindo adalah pada klasifikasi UMKM yang kedua ini yaitu UMKM yang *feasible* namun belum *bankable*.

Next slide, di slide ini digambarkan bagaimana skema penjaminan kredit berlangsung, ada tiga pihak yaitu penerima jaminan yaitu lembaga keuangan bank ataupun non-bank, kemudian ada terjamin yaitu UMKM, kemudian pihak penjamin yaitu PT Jamkrindo. Dimulai dari step pertama yaitu pihak UMKM atau debitur mengajukan permohonan pembiayaan kredit kepada perbankan, kemudian dilakukan asesment oleh perbankan dan jika oleh perbankan dinilai layak atau *feasible* namun kemudian diketahui tidak mencukupi agunannya atau tidak ada, maka dari pihak perbankan melakukan step kedua yaitu mengajukan penjaminan kepada PT Jamkrindo.

Dan selanjutnya PT Jamkrindo menerbitkan surat sertifikat penjaminan kepada pihak perbankan, dan langkah yang terakhir yang keempat yaitu pihak perbankan mencarikan kredit KUR-nya kepada UMKM. Dengan

demikian, UMKM pada kategori kedua tadi yang *feasible* namun belum *bankable* dapat mendapatkan akses permodalan dari perbankan.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Ijin Pak sedikit aja, mau klarifikasi aja.

Jadi kalau untuk yang UMKM tingkat kedua itu bukan nasabahnya yang mengurus ke Jamkrindo, tetapi bank membantu untuk pengurusan jaminan tersebut.

DIREKTUR UTAMA PT JAMKRINDO:

Betul Ibu.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Terima kasih.

DIREKTUR UTAMA PT JAMKRINDO:

Terima kasih.

Dan kami laporkan di slide berikutnya jaringan pelayanan PT Jamkrindo. Kami seluruh Indonesia memiliki 9 kantor wilayah, 56 kantor cabang dan 16 kantor unit pelayanan.

Di slide berikutnya adalah pencapaian kinerja kami di periode tahun 2020, di mana pendapatan penjaminan secara *year on year* dapat tumbuh 27%, terutama dikontribusi oleh pendapatan yang berasal dari iuran jasa penjaminan, baik untuk KUR maupun KMK PEN. Kemudian dari total aset untuk 2020 *year on year* kami tumbuh 6%, sedangkan untuk beban klaim di 2021 naik 1% persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini sedang berlangsung atau berlaku relaksasi dari pemerintah melalui POJK 11 dan POJK 48, sehingga kualitas kredit itu dapat tetap dipertahankan di *collectibility* 2. Kemudian dari sisi laba tahun berjalan kami mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

Di slide berikutnya dapat kami laporkan mengenai tingkat kesehatan perusahaan kami yaitu PT Jamkrindo dengan penilaian dengan *double A* dengan skor 82, dan kami diukur dari sisi *gearing ratio* yaitu perbandingan antara saldo ekuitas kami dibandingkan dengan *outstanding* volume kredit yang dijamin, di mana dibatasi sesuai dengan ketentuannya adalah maksimal 20 kali untuk penjaminan usaha produktif dan di posisi Desember 2020 *gearing ratio* kami 11,74 kali.

Di slide ini digambarkan mengenai volume penjaminan pada periode 2020, di mana total volume penjaminan kami adalah sebesar kurang lebih di 180 sekian triliun, terdiri dari KUR 102,67 triliun, kemudian untuk KMK PEN mencapai 8,7 triliun, sedangkan dari sejumlah UMKM dijamin, untuk UMKM

KUR sejumlah 3,4 juta, kemudian untuk PEN sekitar 500 sekian puluh ribu UMKM.

Kita ke slide 21, di slide ini mohon maaf kecil digambarkan mengenai sebaran dari penjaminan KUR menurut provinsi. Pada saat kunjungan spesifik di Jawa Tengah, di Semarang, dapat kami laporkan bahwa Jawa Tengah untuk periode 2007 sampai dengan 28 Februari 2021 menempati ranking kedua dalam hal penjaminan KUR, dan hal ini simetris atau sejalan dengan volume atau penyaluran KUR di pihak perbankan mengingat bahwa kami adalah mitra perbankan dalam melakukan penjaminan untuk KUR maupun untuk KMK PEN.

Kemudian, di slide 23, dapat kami laporkan bahwa untuk penjaminan KUR menurut sektor ekonomi kami juga simetris dengan penyaluran KUR di perbankan, yaitu terbesar berada pada sektor perdagangan besar dan eceran. Di slide berikutnya mengenai KMK PEN yang dapat kami laporkan bahwa sampai dengan 2020 KMKP dimulai di Juli 2020, kami melakukan penjaminan 8,68 triliun dan di sampai dengan 2000, untuk 2021 sampai dengan 2 Februari ini kurang lebih ada di sekitar 1,5 triliun. Sedangkan untuk jumlah debitur KMK PEN yang terjamin pada periode 2020 sebesar 533.590 debitur dan sebagaimana penyaluran penjaminan untuk KMK PEN menurut sektor ekonomi juga terbesar pada jasa dan perdagangan.

Demikian kami laporkan Pimpinan dan Ibu Bapak Anggota Komisi VI yang kami hormati.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak.

Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang sudah Bapak Ibu Anggota Komisi VI yang sudah mendaftar di sini.

Saya mulai dari sayap kanan dulu Pak Mufti Anam.

F-PDIP (dr. H. MUFTI A. N. ANAM):

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.

Pertama, tentu kami mengapresiasi atas kerja keras Pak Menteri Koperasi UMKM Pak Teten, Pak Dirut BRI yang diwakili Pak Supari, Pak Sis BNI, dan kemudian Jamkrindo yang sudah berjibaku untuk menyalurkan BPUM di tahun 2020 yang senilai 28,8 triliun yang menjangkau 12 juta masyarakat pelaku usaha mikro Pak ya.

Tapi tentu sebagai bagian dari fungsi kami untuk melakukan pengawasan ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini Pak Menteri. Yang pertama kami berharap bahwa penyaluran BPUM tahun 2021 ini benar-benar disalurkan kepada masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19. Kami sudah membaca dari Permen Nomor 2

Tahun 2021 sebagai pengubah dari Permen Nomor 6 Tahun 2020 yaitu tentang Kriteria dan Mekanisme Penyaluran BPUM begitu Pak.

Nah, kalau kamu lihat, kami lihat di situ bahwa Permen Nomor 2 Tahun 2021 ini merujuk pada PP Nomor 7 Tahun 2021 Pak ya, kalau yang tahun sebelumnya yang tahun 2020 itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Nah, di sini Pak yang ini kami sampaikan kami pengen tanyakan di sini adalah kalau di undang-undang, di Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 itu koperasi yang punya kriteria bahwa pelaku UMKM adalah mereka yang punya modal 1 miliar dan omset 2 miliar betul begitu Pak ya, sedangkan di peraturan sebelumnya di undang yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 itu, UMKM adalah mereka yang punya modal 50 juta maksimal 300 juta. Artinya di sini Pak dengan memakai dan mengacu pada PP Nomor 7 Tahun 2021 ini berarti sekarang bentangannya semakin lebar, semakin banyak masyarakat yang harusnya mendapatkan bantuan BPUM ini Pak.

Nah, kami pengen melihat ke panjenengan apakah masyarakat, betul tadi yang misalnya 1 miliar bisa mendapatkan bantuan 1,2 juta. Ini kan kalau buat mereka kan enggak terlalu berarti Pak. Jangan lupa kemarin saja dengan mereka hanya modal 50 juta maksimal 300 juta itu tidak semua *cover*, kan kita lihat saja di tempat kami satu orang dapat, banyak orang yang sebenarnya sangat membutuhkan nggak dapat, yang dapat pun nggak tepat sasaran.

Nah, pertanyaan kedua yang ingin kami tanyakan adalah berapa sih total yang akan disalurkan pada tahun 2021 ini. Kalau jumlahnya lebih sedikit dari 12.000, kami lihat tadi dan pemaparan panjenengan adalah 9,8 juta. Artinya kan semakin bentangannya semakin lebar, kesempatan semakin sedikit, artinya akan semakin banyak masyarakat yang sebenarnya tidak terjangkau oleh ini, padahal bentangannya jangan lupa tadi semakin lebar begitu.

Nah, harapan kami Pak, ini mekanisme yang harus diperjelas, hati-hati betul ini jangan sampai terjadi konflik dengan di tengah-tengah masyarakat, satu sisi warung-warung, toko-toko besar yang mereka modal dan omsetnya 2 miliar mendapatkan bantuan 1,2 juta yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh mereka, sedangkan di tetangganya mereka punya omset 300 juta ternyata dia tidak dapat, hati-hati, ini bisa jadi bom waktu buat kami yang tiap hari ketemu masyarakat di dapil, buat Pak Menteri Koperasi UMKM, buat BRI, buat BNI bahkan untuk Presiden kita yang punya tujuan baik terhadap BPUM ini Pak itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, terkait peran tema BPUM tahun 2020 yang kami lihat di Permen Nomor 2/2021 ini akan dijadikan dasar basis data untuk yang mendapatkan BPUM tahun 2001 betul itu Pak ya. Nah, kalau betul berarti yang mendapatkan bantuan 2020 secara otomatis mendapatkan bantuan di 2021 betul Pak ya. Nah, artinya harapan kami ini harus dipastikan jangan sampai masyarakat yang ternyata tadi, yang punya modal besar, omzetnya besar, bisa mendapatkan bantuan yang sebenarnya enggak terlalu berarti mereka Pak.

Sampeyan lihat sekali-kali, saya lihat, mohon ijin, saya gak pernah lihat dengar Pak Menkop UMKM turun di daerah kami, atau bahkan di dapil kami mengecek bahwa oh ternyata masyarakat sampeyan tahu Pak di tengah pandemi kemarin mereka untuk buka tokonya saja dia tak bisa, selama ini warung-warungnya, modal-modal usahanya dimakan sendiri untuk modal hidup. Sekarang ketika pandemi sudah mulai berakhir mereka mau membuka warungnya, mau buka tokonya, nggak bisa karena nggak ada modal. Harapan kami 1,2 juta ini benar-benar tepat sasaran agar mereka bisa kemudian untuk bergerak melakukan usahanya.

Kemudian yang ketiga, soal rumitnya arus birokrasi di Kemenkop UMKM ini Pak, luar biasa sekal, birokrasinya sangat panjang, padahal ini di era sudah era teknologi begitu. Kalau kemarin misalnya dari PNM mengajukan ke Kemenkop UMKM, dari Kemenkop UMKM diverifikasi, lalu dan setelah diverifikasi lalu disampaikan ke BNI, dari BNI diverifikasi lalu kembalikan lagi Kemenkop UMKM, dari Kemenkop UMKM langsung kemudian disampaikan ke apa Kementerian Keuangan, lalu baru panjenengan keluarkan apa namanya surat perintah Pencairan yang itu proses sangat panjang sekali.

Belum lagi kalau lihat misalnya di BRI daerah kami Pak, luar biasa rumitnya, birokratif banget, rakyat kita hanya misalnya ubah KTP-nya saja Pak, beda ada 'm' sana nggak 'm', ada 'h' enggak ada 'h', itu sudah berubah. Padahal kan sebenarnya NIK-nya ini kan sama, foto sama, alamatnya sana sama, ya berikan saja misalnya solusi surat keterangan dari kepala desa ini bahwa ini benar-benar atas nama ini, penduduk sini, betul-betul NIK, kan cukup sebenarnya. Ini rakyat sekarang ini Masya Allah sudah bantuannya ndak besar mereka seperti gak punya harga diri Pak, bulak-balik ke bank, pulang dan sebagainya, malu Pak kita ini. Janganlah rakyat kita ini jadi nggak punya harga diri karena urusan duit kecil begini. Naik elin dari kampung ke kota itu Pak perlu biaya, kedua seperti ngemis, kita ini tujuannya pemerintah bagus sebenarnya memberikan mereka solusi di tengah Pandemi sebuah pandangan, tapi mereka seperti kaya ngemis -ngemis begitu sampai ke bank dan sebagainya, harapan kami ini tidak terjadi lagi.

Kemudian yang ke empat, kami kaget tadi Pak, bahwa ternyata penyalur dari BPUM ini hanya apa yang mengusulkan BPUM hanya Dinas Koperasi setempat. Bayangkan selama ini yang sudah berjalan, luar biasa, ini kita ini, mohon maaf, kita ini begini begini kita tidak nggak pernah minta sesuatu program dari panjenengan, nggak pernah, kita hanya berharap rakyat kita, konsituen kita, bisa kita urus dengan baik.

Kita duduk di sini Pak nggak main-main Pak, kita harus berjibaku apa namanya, untuk bisa mendapatkan suara rakyat, masing-masing kami di sini mendapatkan 100.000 suara rakyat untuk bisa duduk di kursi ini Pak, jangan sampai apalagi beliau begitu. Tapi harapan kami, kami jangan seperti patung Pak, tidak didengarkan, kami ngusulkan nama, sampeyan ngasih nama, mohon izin, Pak Menteri kasih kontak Pak siapa itu belakangnya Pak Supari, cuek Pak beliau Pak. Saya lupa, saya sampai enggak tahu namanya, kalau nggak sanggup ngurus BPUM jangan ngurus Pak, malu kita sama rakyat kita ini, Anggota DPR seperti patung nggak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa melakukan apapun untuk rakyatnya, malu kami Pak.

Ini ditambah lagi sekarang hanya, yang mengusulkan hanya melalui Dinas Koperasi UMKM. Bayangkan Pak, Dinas Koperasi UMKM setempat tidak selalu mereka sealian politik dengan kami, mereka juga punya kepentingan-kepentingan politik yang harus mereka tunaikan, kalau kami mengusulkan di sana kita ini nggak ada wibawanya Pak sekarang depan rakyat Pak, depan konstituen kami Pak, tenaga ahli kita, staf ahli kita yang mengurus itu seperti dicuekin begitu saja, di Bapak itu dicuekin, di Dinas Koperasi seperti diuntang-anting. Kalau kita saja dilempar bola begini, bagaimana dengan rakyat kita yang dapat bantuan ini Pak ini tolong Pak dipahami betul.

Kemudian selanjutnya soal BRI. Tentunya kami mengapresiasi atas sampaikan Pak Sobari tadi bahwa di tengah situasi Pandemi Covid-19 ini masih mampu membukukan laba yang cukup bagus di angka 18 triliun Pak ya, walaupun turun 45% dari total 34 triliun begitu ya. Tapi, kami bisa memahamilah ini karena mungkin pencadangan dan sebagainya. Kami juga terima kasih sudah memberikan deviden 6 triliun Pak. 6 (enam) triliun buat pemerintah kalau buat beli beras sangat penting untuk rakyat kita Pak, terima kasih banget, tapi tentu ada beberapa hal yang tetap akan kami sampaikan.

Yang pertama kami mendorong BNI untuk bisa mengoptimalkan sektor UMKM pertanian Pak, karena kita sadar hari ini ketahanan pangan ternyata sangat penting di tengah Pandemi Covid-19 ini. Sebenarnya BRI ini kan sudah punya namanya BRI Agro tapi saya enggak kok enggak habis akal kenapa ternyata BRI malah mau menggunakan BRI Agro sebagai bank digital, padahal ruh dari pendirian BRI Agro sebenarnya untuk UMKM sektor pertanian Pak. Kalau kami lihat bahkan baru menyalurkan KUR di sektor pertanian apa plasma perkebunan dan hanya itu saja, tidak ada sektor-sektor lain.

Nah, harapan kami Pak itu perlu ditingkatkan, perlu dikembalikan kekhitahnya, ke-ruh perjuangan dari pendirian dari BRI Agro agar bagaimana UMKM sektor pertanian kita bisa tumbuh, jangan sampai mereka terjerat oleh rente-rente, tengkulak tengkulak yang memberikan mereka bantuan modal pupuk kemudian mereka terjerat harus jual dengan harga yang sangat tidak kompetitif begitu. Nah, tidak perlulah muluk-muluk BRI Agro, BRI ini mau bikin *co-location* dengan PNM, dengan Pegadaian, nggak usah muluk-muluk begitu Pak, ini ko, BRI Agro kan bisa di *co-location*, dibikin sampai tingkat desa, sampai tingkat kecamatan, agar bagaimana rakyat kita yang punya apa bisnis di sektor pertanian ini bisa bisa mendapatkan akses kredit dengan baik. Kemudian juga misalnya anak-anaknya dibikinkan sistem apa namanya jaminan masa depan untuk sekolahnya, misalnya setiap masa panen mereka dijemput bola untuk berani menabung dan sebagainya, ini penting Pak untuk bagaimana sektor pertanian kita, ketahanan yang terjaga dan masyarakat sejahtera.

Yang kedua Pak, mungkin Bapak sudah dengar pertengahan Maret kemarin, ini ini aspirasi dari para tokoh agama di daerah kami Pak, karena tokoh agama ini kan anu Pak sambung-menyambung. Mereka itu ada media komunikasinya begitu, mereka menyampaikan bahwa tolong kalau ketemu BRI sampaikan bahwa Bapak mungkin dengar diapa namanya KCP Sail di Pekanbaru ada gereja Pak buka rekening di sana untuk pembangunan gereja dipersulit Pak, tidak bisa seharian nunggu nggak bisa, padahal mereka

persyaratannya lengkap, ini nya, bahkan ada surat rekomendasi dari desa tidak bisa. Harapan kami Pak jangan ada ruang lagi intoleransi di tengah-tengah BRI.

Bapak tahu pemerintah kita termasuk BUMN sudah apa namanya mencanangkan untuk tidak ada ruang bagi intoleransi. Nah, bagi mereka oknum belum itu harapan kami disanksi keras, dipecat kalau perlu Pak dari BRI, kalau memang terbukti agar bagaimana ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk semua masyarakat agar tidak ada ruang intoleransi tengah-tengah masyarakat kita.

ANGGOTA:

Allahu Akbar.

F-PDIP (dr. H. MUFTI A. N. ANAM):

Kemudian soal BNI. Pak Sis kami cukup bangga kami lihat BNI hari ini sudah mulai apa bertransformasi menjadi bank yang modern dan efisien. Kami lihat kemarin juga BNI nih kalau kami baca di berita sudah menjadi bank yang *cost of fund* terendah kedua Pak ya setelah BCA, luar biasa Pak. Ini mungkin ya berkat kecerdasan panjenengan dan juga jajaran yang sudah bagaimana mendiversifikasikan apa namanya itu modal usaha untuk kemudian bisa memberikan ruang terhadap masyarakat bisa mengakses kredit secara kompetitif dibandingkan yang lain, kami apresiasi atas hal itu.

Tapi tentu kami berharap BNI dan termasuk BRI untuk bisa berkolaborasi Pak, dengan sekarang ini kan baru-baru ini ada kartu pra kerja, program kartu pra kerja pemerintah, yang peserta dan alumennya sekarang itu dari tahap ke 11 ini sudah mencapai 5,98 juta Pak peserta.

Nah, harapan kami setelah pelatihan mereka *diini* Pak, dibimbing Pak, diberikan akses khusus terhadap KUR Supermikro agar mereka tidak setelahnya ilmunya tidak istilahnya kalau ilmu tidak terapkan kan *ngowos* Pak Subadri kan begitu. Nah, harapan kami mereka diambil ini untuk kemudian untuk di-*guidance*, bukan hanya diberikan kredit tapi mereka di-*guidance*, diapa, diinkubator, di kemudian dibimbing untuk bagaimana bisa menjadi pengusaha, karena kalau ini terjadi Pak maka capaian dari RPJMN yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah 2020-2024 yaitu di angka 3,9% penciptaan pengusaha yang hari ini hanya 2,5% ini bisa bisa bisa terjadi begitu.

Nah, kemudian soalnya terakhir soal Jamkrindo. Kami mengapresiasi atas Jamkrindo yang sudah melakukan penjaminan kredit tengah-tengah masyarakat, baik pertama kalau saya lihat dari struktur portofolio Jamkrindo ini kan sekarang lebih banyak ke penugasan negara kan begitu Pak, hanya menjamin KUR dan juga KMK PEN kalau kita lihat dari labanya juga begitu 75% juga dari sektor itu begitu.

Nah, harapan kami ke depan Pak bisa merambah ke sektor lain, jangan hanya berharap terhadap penugasan penugasan pemerintah, sudah penugasan, dapat PMN kan begitu, kemarin dapat 3 triliun, kalau begitu kan semua, mohon maaf, semua bisa jadi dirutnya Pak. Lebih enak jadi Dirut

Jamkrindo daripada Anggota DPR kan gitu. Nah, harapan kami terus berinovasi agar bagaimana bisa apa memperluas untuk bagaimana tidak hanya di penugasan pemerintah, tapi sektor-sektor lain begitu. Kalau kita lihat pernyataan panjenengan di media kan kan kita kaget juga, wah kita kita akan bermain aman, kita hanya mau ngurusin KUR, hanya menjamin KUR yang disampaikan oleh pemerintahan. Kan artinya, mohon izin, kita ini mimpikan harus tinggi Pak, harus berani mengambil resiko agar bagaimana usaha ini bisa semakin tumbuh dan berkembang kan gitu Pak, tapi kami lihat panjenengan sudah bagus sih, sudah luar biasa maksudnya ini masukan agar bagaimana bisa lebih optimal lagi ke depan. Nah, termasuk di soal apa nama bisnis kargo dan sebagainya.

Terus kemudian yang kedua, kedua Pak soal Jamkrindo kami minta *breakdown* Pak, bentar, yang kedua kami minta *breakdown* terhadap investasi yang dilakukan. Kami tidak mau lagi kecolongan seperti Jiwasraya dan juga Asabri. Kami pengen tahu inves, selama ini diinvestasikan untuk apa saja sih, ke Reksadana, ke saham mana saja, karena kita pengen lihat *benchmark*, kita bandingan dengan *benchmark* dari perusahaan-perusahaan lain, apakah ini sudah sesuai apa belum. Kita memahami mungkin di tengah pandemi, situasi pandem ini mungkin akan turun dan sebagainya, tapi jangan sampai panjenengan kecolongan kita semua kecolongan bahwa ini akan menjadi korban selanjutnya selain apa nama Jiwasraya dan juga apa tadi tapi Asabri.

Mungkin sedikit dari kami kurang lebihnya mohon maaf Pak.

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Ini jatah PDIP semua diambil Pak Mufti.

Sekarang saya ke kiri dulu Bu Nevi, sudah sehat Bu?

F-PKS (Hj. NEVI ZUARIANA):

Iya *Allhamdulillah* terima kasih atas doanya.

KETUA RAPAT:

Allhamdulillah.

F-PKS (Hj. NEVI ZUARIANA):

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Dewan Komisi VI, dan juga mitra kerja kami Pak Menteri bersama Bapak Dirut.

Yang pertama ialah masalah tentang data Pak. Tantangan dalam penyaluran BPUM untuk pelaku untuk pelaku usaha mikro adalah perkara data, sehingga perlunya integrasi data UMKM agar bisa mempermudah penyaluran bantuan serta pemberdayaan di masa yang akan datang. Ya,

karena kita kan enggak tahu Pak di masa yang akan datang seperti apa nanti, ya ini aja untuk Covid-19 mungkin tahun ini juga belum selesai Pak.

Jadi basis data ini penting sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Cipta Kerja sehingga terintegrasinya data yang dibutuhkan untuk membuat eksekusi berbagai program pemerintah terkait dengan pelaku UMKM agar lebih efektif efisien dan tepat sasaran. Kita tahu sekarang data yang sudah jelas-jelas secara global saja 30, 30 juta pelaku UMKM bangkrut. Apakah Pak Menteri tahu 30 juta pelaku UMKM bangkrut itu siapa gitu, yang sudah merilis nih Pak CNN, Detik, Republika gitu ya, jadi media massa yang mainstream. Dan tentu kami mengharapkan sampai saat ini bagaimana Kementerian Koperasi dan UMKM berkolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga dan badan usaha milik negara. Dan sejauh mana progres menentukan pusat data terpadu UMKM tersebut sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kami harapkan data yang nanti Bapak akan punya itu menjadi data resmi, *big data*, tentang pelaku UMKM, itu yang pertama Pak.

Lalu yang kedua, tadi sudah disampaikan oleh Pak Mufti. Singkat kata Pak sampai sejauh mana toleransi yang bisa diberikan kepada penyaluran BPUM ini kalau ada perbedaan data, dikarenakan terjadi kesalahan dalam memasukkan data, padahal calon penerima bantuan memang ada orangnya dan masuk dalam kategori pelaku usaha mikro.

Itu di lapangan kami mendapatkan hanya beda satu huruf, satu angka, satu nama, sudah Pak tidak dapat sama sekali, iya dan uangnya katanya kembali ke negara. Lalu Pak ini juga kami dari Fraksi PKS mengusulkan perbaikan peraturan dengan menambahkan koperasi yang berbadan hukum bisa juga memberikan usulan calon penerima BPUM, karena Pak Menteri sudah mengeluarkan Peraturan Menteri di mana tidak ada koperasi Pak. Padahal kita namanya Kementerian Koperasi dan UMKM tapi ternyata ketika penyaluran BPUM tidak ada koperasi yang berbadan hukum. Kami mengharapkan koperasi dapat membantu meringankan tugas dari dinas koperasi kota agar pegawai bisa terselamatkan.

Itu saja Pak.

Terima kasih, terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam. Kita ke kanan lagi Pak Nusron Wahid.

F-PG (NUSRON WAHID):

Terima kasih Pak

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Pak Menteri UKM dan Koperasi yang kami hormati.

Pak Martin Manurung syariah yang kami hormati.

Bapak Ibu-ibu yang mulia.

Pertama saya ingin bertanya sama Pak Menteri soal slide nomor 5, halaman 5, slide halaman 5 tentang tahun penyaluran BPUM tahun 2020 yang dikategorikan tepat sasaran. Ini basisnya survei Pak ya, survei atau memang data 12 juta itu Pak?

MENTERI KOPERASI DAN UKM:

Survei Pak, survei.

F-PG (NUSRON WAHID):

Pertama saya agak, kalau survei, saya agak sedikit keberatan dengan *statement* bahwa penyaluran BPUM tu dikatakan tepat sasaran, kenapa? Karena yang sudah mencairkan itu baru 69%, yang sudah cair, masih ada angka 31% yang belum cair, sehingga kalau menggunakan, ini baru survei, belum kalau nanti datang pasti kalau n-nya 1261 tuh biasanya plus minus 4%, biasanya kalau *sampling*-nya segitu, begitu Pak Martin ya. Nah, karena itu yang 31% ini belum bisa diukur, inilah yang 31% ini yang tadi yang masuk kategori yang disampaikan oleh Pak Mufti sama Bu Nevi, ada kesalahan-kesalahan basis, salah satunya adalah yang terjadi di Kabupaten Jepara.

Dari 40.000 penerima BPUM ada 2.184 yang diusulkan lewat koperasi, ini siapa Pak ini, Pak Eselon I-nya ini, tahun lalu yang diusulkan di koperasi itu ketikannya persis sama dengan NIP, NIK dengan KTP-nya, bahkan lengkap dengan fotokopi KTP-nya, tapi kemudian ketika cair di BRI NIK-nya berubah. Jadi perubahannya itu bukan salah ketik pengusul, tapi prosesnya ketika di Menkop ini lucu, atau di BRI-nya, kenapa buktinya, karena dibuktikan dari 2.100 itu dari dokumen yang di-*email*, yang dikasihkan dari koperasinya itu dengan NIK-nya dengan fotocopy itu sama persis tidak berubah, tapi justru perubahan itu ketika di BRI ada perubahan NIK, jadi ini proses *lack*-nya di mana, kemudian tidak cair.

Nah, pada rapat raker yang tahun bulan Januari ketika deputinya belum diganti dijanjikan dijanjikan bahwa ini nanti diusulkan untuk tahun 2021, supaya bisa masuk lagi, karena takut ada temuan BPK tapi dalam perjalanan ada perubahan PMK, Permenkop. Pengusulnya tidak boleh dari koperasi harus lewat Dinas Koperasi dan jumlahnya seribu dua ratus, sejuta dua ratus, bukan dua juta empat ratus.

Padahal yang semula yang bersangkutan itu berhak sudah dinyatakan menjadi penerima hanya perbedaannya, ada tadi sama NIK. Dari kejadian di mana-mana, saya yakin 31% itu *case*-nya ini, bukan karena belum aktivasi atau belum memiliki waktu, waktu banyak Pak orang begitu terima uang ambil duit cepet Pak, tapi lebih banyak ini Pak saya yakin, problem adalah problem dari data pengusul dengan NIK fotocopy KTP-nya persis, tapi kenapa begitu muncul hasil *print out*-nya di BRI kok beda, tadi ada ada tambahan h, ada tambahan m, ada tambahan apa itu munculnya di situ. Ini salah waktu kalibrasi sistem IT-nya atau apa. Kemudian si warga ini menjadi korban.

Nah, karena itu saya langsung nggak mau panjang-panjang Pak, ini solusinya bagaimana, yang model begini, yang sudah ditetapkan pada tahun 2020 ya kan, ini bisa di-*carry over* pada tahun 2021 apa tidak? Yang kedua masih ada proses untuk membenahan dokumentasi atau tidak, karena terbukti tingkat kesalahannya bukan di level pengusul, bukan di level penerima, yang dikatakan tadi itu tidak sesuai dengan NIK, sesuai dengan NIK, tapi justru munculnya nggak sesuai dengan NIK. Ini kejadian, di Kudus ada 1.217, saya enggak mau yang lain ya, mungkin beliau kan Pasuruan, saya yang di tempat tempat saya saja itu ada segitu.

Dan dulu udah pernah sudah disampaikan, kalau diminta datanya, foto, anu data arsip lembaga pengusulnya plus fotocopy KTP lengkap, ada, sudah dikasihkan kepada BRI cabang Jepara, surat dikasihkan BRI cabang Kudus semua, tapi tetap tidak mau karena berbeda dengan hasil *print out* yang ada di BRI. Nah, ini perlu kita *tracking* ini salahnya di IT-nya BRI perubahannya itu, atau di IT-nya Menkop dan solusinya bagaimana ini, mereka ini.

Kemudian, kedua Pak, yang 31% ini yang kedua, ini fokus saja saya ini yang tahun 2000, bagaimana caranya mereka ini hidup, dihidupkan. Nah, kemudian kedua pada Permenkop Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Pengusul, sama seperti Bu Nevi. Pak Teten saya ingin tanya Pak, *reason the enter* narasinya kok hanya satu lembaga pengusul apa Pak, apakah pertama berarti BRI selama ini dianggap datanya tidak *valid*, usulannya bodong, ada unsur korupsi, atau unsur manipulasi data pada lembaga penyusul sebelumnya di BRI. Kemudian apakah ada unsur bodong atau data palsu yang diusulkan oleh PNM ya kan, atau juga ada unsur korup *kick back* dari PNM, manajemen PNM atau manajemen BRI sehingga ini di-*delete* supaya jelas ini.

Kemudian yang kedua, yang ketiga, kan ada tiga, ada lima itu pengusulnya, adalah yang ke tiga adalah apakah ada dinas, yang keempat adalah dinas provinsi, kemudian kementerian lembaga, apakah kemudian kementerian lembaga juga korup sehingga kok di-*delete* atau datanya dianggap tidak *valid*, kemudian koperasi pengusul ya kan.

Kalau beliau kan aspek politiknya mungkin ada perbedaan aspirasi politik. Kalau saya ngelihatnya apa kenapa lembaga yang lain itu di-*delete* dianggap tidak perform, datanya abal-abal atau bagaimana lebih banyak. Kenapa hanya hanya tunggal narasannya. Nah, saya mengusulkan pemerintah itu tidak udah nggak ada lagi zaman tunggal tuh nggak ada. Jadi siapa pun boleh mengusulkan sepanjang itu adalah *valid* dan perform datanya, dan tidak korup, tidak ada motif, motif motif korupsi ya kan. Kalau motif politik semua orang punya motif politik, saya kira Pak Teten pun membuat program ada motif politik, itu sah. Namanya kita ini pejabat politik ya pasti punya motif politik, sepanjang motif politik adalah *ending*-nya adalah kesejahteraan rakyat dan tidak ada hengki pengki yang paling penting saya kira itu.

Yang terakhir Pak saya sedikit *out of contact* kepada Pak BRI sama BNI ini mohon maaf saya *out of contact* dari dunia ini, kenapa saya hari ini pakai baju koko, kenapa saya hari ini pakai kopiah, karena tadi pagi saya itu ikut diajak rapat dengan Baznas, ya kan Badan Amil Zakat Nasional. Pak,

kok lucu Pak sepengetahuan saya itu BRI kan itu BUMN Pak ya atau swasta Pak, BUMN Pak kan, BNI yang BUMN kan.

Yang namanya BUMN kan mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara, oleh pemerintah, di dalam pemerintah ini punya undang-undang bahwa semua aparatur pemerintah pemungutan zakatnya itu lewat Baznas, tapi kenapa Pak di BRI di Mandiri termasuk juga di BNI juga dan di beberapa BUMN tadi, ada juga perwakilan dari Bapak kok masih ngotot memungut sendiri kepada nasabah dan menyalurkan sendiri, seakan-akan menjadi negara dalam hal negara, lho ini bisnisnya BRI itu bisnis pungutan zakat atau bisnis bank.

Kembalikan ajalah kepada, anda itu instrumen negara, kalau instrumen negara itu tugas pokoknya adalah pelayanan keuangan, bisnis, bukan mengurus zakat, zakat biar ada Baznas sendiri, jangan membuat instrumen zakat sendiri memungut kepada nasabah sendiri tadi. Nah, ini *out of contact* dari dunia ini, tapi karena ini undang-undang, kecuali kalau Bapak ini perusahaan swasta boleh, ini perusahaan negara ya. Saya minta tolong sampaikan kepada Pak Dirut, yang tadi saya rapat tadi pagi di situ, ini masalah sensitif, dipungut sendiri, disalurkan sendiri, nunjuk lembaga sendiri, tanpa lewat Baznas, ini kan nggak bener dan saya tahu sebetulnya, yang dikasih itu lembaga apa apa semua yang kita tahu, enggak usah saya sebut di sini, nanti kalau *tak* beberkan lebih panjang, lebih cerita lebih panjang lagi kepada siapa lembaganya itu.

Saya kira itu Pak, enggak bener ini Pak ya.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Kita balik ke sayap kiri lagi Bu Evita, silakan.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Baik.

Terima kasih.

Bapak Pimpinan.

Bapak Menteri.

Para Dirut dan jajaran yang saya hormati.

Terima kasih atas penjelasan tadi yang diberikan. Sebenarnya hal-hal yang ingin saya sampaikan itu sudah hampir ditanyakan oleh teman-teman yang bertanya sebelumnya. Jadi saya juga bingung nih Pak Teten sebenarnya bantuan BPUM dari pemerintah ini tujuan utamanya apa ya kan? Kita tahu kalau di negara lain Amerika sampai mencetak uang ya Pak ya, itu memberi 1.500 dolar kepada perorangan itu untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Ketika ada daya beli di tengah-tengah masyarakat *supply* dan

demand itu ada, kemudian roda perekonomian itu otomatis bergerak, itu tujuan utama mereka.

Nah, di kita ini apa, apakah sama pertanyaan saya, kalau sama kenapa dipersulit di dalam penyalurannya, itu yang menjadi pertanyaan saya. Apa sih sebenarnya tujuan kita memberi BPUM ini sebenarnya meningkatkan daya beli. Enggak usah dipersulitlah, dengan segala macam aturan, dengan mata rantai yang panjang, birokrasi yang panjang, itu dihilangkan gitu Pak, jadi kita tahu tadi sudah disampaikan oleh teman-teman. Bapak sendiri tadi sudah menyampaikan bahwa sebenarnya kita mempunyai masalah dan kendala di dalam penyaluran BPUM tahun 2020.

Tentunya harapan kita kendala dan masalah yang kita miliki kemarin ini, ini harusnya menjadi apa namanya hal-hal yang bisa kita perbaiki ketika penyaluran kita 2021 kan begitu Pak. Kan banyak sekali sebenarnya tadi sudah disampaikan kok jelas data ya kan. Kita punya masalah data, kita punya masalah komunikasi, sekarang ini contoh orang bisa lolos verifikasi atau tidak lewat SMS banking kan begitu Pak Menteri, ya Pak ini Pak Dirut ini kan. Nah, orang nggak semua orang punya SMS *banking* Pak.

Nah, ini oke kalau ini enggak bisa solusinya kita cari apa nih, apalagi orang di kampung-kampung nggak kenal SMS *banking* Pak, akhirnya apa mereka itu tadi bolak-balik bolak-balik ke bank gitu loh Pak, carilah *simplify* kalau menurut saya persyaratan-persyaratan yang ada ini, kemudian juga ini ada lagi aturan aturannya ya kan. Bahwa ini yang Mekaar nih Pak, bahwa harus bawa satu nasabah untuk Mekaar baru bisa dapat menjadi nasabah UMKM, ini di media lho Pak diekspos hal-hal ini dan itu diberitakan.

Nah, ini kan harus diselesaikan masalah ini, apakah memang harus begitu, apakah ini harus apa namanya ini salah tidak benar gitu loh Pak. Kemudian juga BRI katanya ada masalah nih. Dapil saya sendiri Pak, mereka mau membuka rekening di BRI dari Cepu Blora ya, sorry membuka rekening di BNI perlu pendampingan dari PNM, apakah memang harus seperti itu Pak, ini saya punya link-nya punya medianya semua Pak, apa memang persyaratan itu harus serumit itu kita buat Pak, ini yang juga kita menjadi kita harus evaluasi Pak untuk pemikiran-pemikiran yang ada ini.

Kemudian ada lagi itu di BRI Pak, maaf BRI, itu kejadiannya di Banyuwangi ini tadi sih di Purworejo, karena KTP-nya apa namanya KTP-nya itu statusnya itu karyawan swasta ya kan, itu ditolak, ini semua punya link medianya saya Pak, yang semua kejadian-kejadian ini. Nah, saya berharap kejadian-kejadian ini Bapak-bapak, ini menjadi masukan kita ke depan di dalam mengevaluasi.

Jadi bahwa sebenarnya kita perlu data yang benar kan begitu Pak, kemudian kita berharap Kementerian Koperasi dan UMKM ini pendataan yang dilakukan sekarang ini Pak Menteri itu menjadi pintu masuk untuk membenahi data UMKM kita Pak. Nah, kalau data ini masuk Pak Menteri jangan gak di-*update*, di-*update* tiap tahun Pak, nanti ketika kejadian apa perlu data tuh obrak-abrik anggaran lagi, bikin lagi data baru, data center. Kita ini kelemahan kita ini Pak di-*maintenance*, *maintenance* dan *updating* itu kelemahan kita. Bayangkan saja kita *maintenance* alat-alat militer kita aja kalau di luar negeri itu bisa 30%, 40% dari anggaran mereka itu untuk *maintenance*.

Kalau di kita kan *research and technology*, di kita yang dua itu diabaikan di negara kita. Nah, saya berharap Bapak juga *posting*-lah anggaran untuk *updating* daripada data-data yang ada dan data juga itu tentunya bisa memastikan bahwa kementerian Bapak ini tetap terhubung Pak dengan UMKM-UMKM tersebut. Kemudian jalur birokrasi lebih dipendekinlah Pak. Tadi saya ngeri juga tuh Bapak maparin dari BNI yang harus dilakukan panjang 1234 udahlah *simplify*-ah Pak untuk ini cuman 1,2 aja kok dipersulit gitu loh iya kan Pak ya kan.

Terus syarat-syarat baru itu sudah dievaluasi Pak Menteri yang di yang tadi saya bacakan, saya punya link-nya semua, dievaluasi deh kalau nggak perlu ya gak usah gitu. Kemudian masalah titik koma nama yang salah begitu di dijadikan permasalahan udah rakyat kecil dipersulit lagi Pak Menteri. Nah, saya berharap apa yang terjadi di 2020 ini masalah-masalah yang kita hadapi kendala-kendala yang kita hadapi ini menjadi pedoman kita Pak untuk perbaikan-perbaikan agar penyaluran di 2021 ini berjalan dengan baik. Dan saya juga agak kecewa Pak Menteri, Pak Menteri sebagai Menteri Koperasi dan UMKM, Bapak harusnya berargumentasi dong dengan pemerintah mengenai lembaga penyalur.

Kewenangan Bapak dicabut loh iya kan, kewenangan Bapak Menteri Koperasi, koperasi itu dicabut sebagai penyalur enggak usah jangan nerima-nerima aja Pak semuanya. Kalau ini argumentasi dong kenapa sekarang kita, kita nih dicabut kewenangan sebagai kementerian dan kelembagaan negara, apa kita nggak punya rakyat, rakyat yang milih kita yang harus kita ini kan Pak perhatikan Pak, kenapa DPR RI gak bisa menjadi, emangnya masuk kantong kita itu uang, kan nggak yang nyalurkan kan bank, nggak ada masuk kantong kita DPRRI.

Kenapa kita ke lembaga negara dicabut dalam hal itu, ya kan bener kata Pak Nusron tadi, argumentasi-argumentasi itu harus jelas. Memangnya Bapak pikir benar kepala dinas itu dalam bekerja, kita tahulah yang namanya kepala dinas itu amburadul pekerjaan mereka. Bapak percayakan tunggal kepada mereka untuk menyelenggarakan ini. Yang kemarin aja sudah tidak benar apalagi yang sekarang tunggal begini penyalurannya Pak. Saya rasa ini kalau bisa memang peraturan itu harus diubah Pak Menteri, kalau memang jangan bertambah buruk penyaluran tahun ini dari pada penyaluran tahun yang lalu Pak.

Saya rasa demikian, Bapak Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kita ke makasih juga Mbak Evita.

Kita ke sayap kanan, Pak Sonny Danaparamita.

F-PDIP (SONNY T. DANAPARAMITA):

Terima kasih.

Yang terhormat Pimpinan beserta Anggota Komisi VI yang saya hormati.

Pak Menteri Koperasi.

Para Direksi BUMN.

Agak tegang juga semua marah-marah nih, enggak ya.

Pertama saya juga justru mengucapkan terima kasih pada Pak Menteri yang telah berhasil meyakinkan ke semuanya bahwa BPUM ini perlu dilanjutkan pelaksanaannya. Tadi sudah disebutkan kalau kemarin 12 juta ke depan menjadi 12,8 juta yang 3 juta masih belum proses DIPA meskipun nominalnya lebih kecil.

Yang kedua, terima kasih karena seingat saya 21 Januari ketika Raker Pak Menteri telah menerima apa yang menjadi aspirasi dan masukan dari Anggota-anggota Komisi VI. Aspirasi dan masukan itu kemudian terumuskan dalam Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 tahun 2021. Tapi mungkin nanti perlu dijelaskan karena 3 anggota sebelumnya menyampaikan kenapa hanya satu pengusulan dan, sebagai seingat saya dulu ini justru bagian dari masukan teman-teman. Misalkan pengusul yang dari koperasi, ada koperasi yang faktanya juga nakal dan sebagainya, termasuk saya menyampaikan dulu BRI modelnya pengusulannya langsung filter saja tanpa melihat fakta di lapangan, itu saya dapatkan ketika saya melihat YouTube-nya Pak Narso Pak, BRI.

Jadi dia hanya untuk agar cepat waktu itu cukup yang punya rekening bank di bawah dua juta kumpulin, filter lagi yang tidak punya KUR kumpulin langsung diajukan. Kalau nggak salah wacananya dulu seperti itu sehingga mungkin ini menjadi argumentasi kenapa hanya ada satu pengusul, tapi saya yakin Pak Menteri yang nanti lebih punya kapasitas untuk menjelaskan itu.

Dan terkait dengan masukan-masukan itu semua saya kira kalau saya kemudian sampai nge-*print* Peraturan Menteri Koperasinya itu juga secara yuridis normatif sudah dimasukkan di konsideran di point B dan point C. Yang ini saya kira ini basis apa namanya dasar sosiologisnya kenapa Peraturan Menteri Koperasi ini disusun dan saya lihat paling tidak ada dua hal yang disebutkan di situ, pertama adalah tentang perlunya peningkatan jumlah penerima bantuan dan yang kedua tentang penyesuaian mekanisme. Jadi, mohon maaf Pimpinan saya lebih banyak akan bicara soal peraturan saja karena ini akan bicara ke depan.

Jadi, sekali lagi saya mengapresiasi itu termasuk juga tentu mengucapkan selamat kepada masyarakat Indonesia khususnya pelaku UMKM yang semoga saja nanti 12,8 itu ke bagian ratalah. Tentu saja juga mengapresiasi Pak Jokowi kalau kemaren teman-teman Demokrat Pak Herman mengapresiasi Pak Jokowi karena pak Jokowi dengan adagium tegakkan hukum walau langit akan runtuh, terkait KPK. Nah, ini mengapresiasi karena Pak Jokowi juga mendengarkan keluhan dari para pelaku UMKM kita perlu diapresiasi juga.

Terkait dengan Peraturan Nomor 2 ini saya kemarin bertanya-tanya kira-kira BUMN mana yang akan ditunjuk sebagai penyalur. Kalau saya lihat ini saya pikir sudah sudah apa namanya sudah dipersiapkan kok Jamkrindo

sekarang. Ternyata tapi dari penjelasan Pak Menteri tadi itu hanya BRI, BNI, Mandiri, BPD dan PT Pos, kalau enggak salah itu.

Pertanyaan saya kalau memang itu hanya BRI BNI Mandiri Bank PT Pos, kenapa PT Pos juga ditunjuk sebagai penyalur. Nah, saya kira meskipun beda kementerian saat ini kalau Kementerian BUMN itu terakhir bicara soal holding ultra mikro. Nah, holding ultra mikro itu isinya hanyalah BRI kemudian Pegadaian satunya lagi PNM, kenapa tidak bersinergis semacam itu saja, karena saya kira karakter masing-masing Himbara khususnya tentu punya spesifikasi yang berbeda-beda. Kalau itu bisa di-*match*-kan saya kira jauh lebih baik. Apalagi ini khusus misalkan PT Pos, toh semuanya nanti penyalurannya setahu saya harus lewat rekening, jadi birokrasinya jadi malah menurut saya agak panjang.

Yang ketiga, di Pasal 4-nya ini, itu disebutkan bahwa yang telah menerima dana BPUM tahun anggaran sebelumnya dan Pasal 18b data penerima BUMN tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai data usulan penerima BPUM. Pak Menteri yang saya hormati saya mau memahami bahwa Peraturan Menteri adalah domainnya Pak Menteri, inilah kewenangan Pak Menteri, tapi saya kira kami juga masih elok andaikan mengusulkan ada perubahan terkait Peraturan Menteri ini.

Kalau Pasal 4 dan Pasal 18 disebutkan seperti itu tentunya sebetulnya ini bertentangan dengan konsiderans yang dibikin oleh Pak Menteri. Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2001 ini salah satu pertimbangannya adalah untuk memperbesar calon penerima, tapi ketika dalam Pasal 4 dan Pasal 18 disebutkan terhadap para penerima BPUM dapat menerima kembali. Nah, ini kan justru bertentangan di mana tingkat peningkatan penerimaan para penerima manfaat, tidak *fair*. Saya kira orang yang pernah dapat 2,4 juta kemudian dapat lagi 1,2 juta di tahap ke 2, kecuali kalau para pelaku UMKM sudah mendapatkan semuanya, tapi hitungan saya berdasar data dari Kementerian Koperasi penerima tahap pertama sebesar 12 juta, penerima tahap kedua anggap juga sudah nanti 12,8 juta berarti ada 24,8 juta.

Sementara data di Kementerian Koperasi pelaku UMKM kita hingga tahun 2019 kalau tidak salah 65 juta sekian. Artinya tiga kali BPUM dilakukan ini pun setiap orang hanya dapat 1 kali, itu belum meng-*cover* ke semuanya. Belum lagi yang ini bertentangan saya mengingatkan saja Pak Menteri yang kebetulan juga senior saya, ini akan bermasalah ke depannya, karena kalau misalkan Peraturan Menteri Nomor 6 rujukannya adalah undang-undang. Peraturan Menteri Nomor 2 tadi rujukannya adalah peraturan pemerintah, di situ ada klausul yang berbeda siapa yang disebut dengan pelaku usaha mikro. Nah tentu dengan kriteria berbeda ini pendaftar yang pertama dengan yang sekarang tentu adalah berbeda, jadi tidak bisa, menurut saya tidak bisa secara otomatis dilakukan seperti itu.

Yang berikutnya yang kelima, dalam presentasi Pak Menteri tadi disampaikan bahwa pengusulnya adalah satu tunggal dinas yang membidangi koperasi dan UMKM di kabupaten. Kalau sebelumnya pembersihan *cleansing* dilakukan oleh Kementerian Koperasi kalau di tahap yang kedua ini nanti oleh Dinas Koperasi, pada konteks untuk menyusun big data pada konteks untuk mensinergikan bahwa urusan pengusaha mikro

adalah urusan kabupaten saya setuju. Saya kira cara berpikir Pak Menteri mungkin seperti itu, cuma masalahnya adalah ada kesan yang sangat terlalu birokratis ketika yang dari kabupaten ini kemudian harus dinaikkan kepada tingkat dinas tingkat provinsi.

Sementara yang dinas tingkat provinsi urusannya hanya melakukan koordinasi, apakah ini hanya agar koperasi di tingkat provinsi tidak kelihatan nganggur atau gimana. Tapi sekali lagi saya tidak melihat ada hal yang cukup *urgent* kementerian apa dinas yang membidangi di tingkat provinsi koperasi itu dilibatkan di sini, kecuali mungkin Pak Menteri memberikan pelayanan psikologi kepada ASN di seluruh provinsi di Indonesia, yang kalau singkatannya Selindo. Tadi bingung Pak, Selindo itu apa ternyata seluruh Indonesia ya Pak, akronim baru Pimpinan. Jadi sekali lagi pada konteks untuk menyusun big data di tingkat kabupaten saya setuju itu, tapi semua kembali ke kewenangannya kepada Pak Menteri.

Nah, berikutnya soal kesalahan validasi di tahap yang pertama. Jadi saya tidak ngerti Pak, tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, ada yang sudah menerima karena NIK-nya beda, kemudian tidak jadi dapat. Saya biasa dalam Raker kayak gini memberikan contoh kasus dan saya akan berikan contoh kasus juga bagaimana salah seorang Nasabah BNI Pak di Banyuwangi, tapi untuk ini saya mengapresiasi kepada Kepala Cabang BNI Banyuwangi Pak kepada anak buahnya Bapak, jadi meskipun waktu itu saya telepon langsung meskipun cuti dia bisa jawab dan segera koordinasi. Jadi ada seorang yang sebelumnya dia mengajukan pengusulnya adalah PNM, dia kemudian dinyatakan dapat rekeningnya adalah BNI, karena sudah dapat kemudian uang sebesar 2,4 juta itu diambil. Menurut PNM rekening itu masih bisa digunakan bisa digunakan untuk kepentingan lain.

Setelah 2,4 juta bantuan dari BPUM ini dicairkan, dia kemudian melakukan transaksi dengan menggunakan rekening tersebut, tapi kemudian setelah uang masuk di rekening tersebut sama si pemilik rekening uang itu nggak bisa dicairkan, karena menurut BNI ada revisi ada kesalahan si pemilik rekening dinyatakan tidak lolos kalau enggak salah BRI, BI *checking*, dia punya cantolan yang sebelumnya, sehingga sekarang posisinya dia justru utang, kiriman yang 800 ribu enggak bisa diambil dan harus masih membayar berarti 1,6 juta.

Nah, saya yakin ini bukan satu-satunya masalah yang ada di penyaluran tahap yang pertama. Saya ingin menanyakan kepada Pak Menteri posisi uangnya yang sudah dikembalikan itu sekarang di mana? Kalau tadi disebutkan BRI mengembalikan 1,1 juta para penerima manfaat rekening, kemudian BNI ada 272 ribu yang dikembalikan atau dalam skala besar itu adalah 31%, jadi belum 100%. Nah, ini nanti seperti apa, jadi saya kira ya tadi kalau menurut kita kalau menurut Bu Evita 1,2 kan kecil 2,4 kan kecil, tapi bagi masyarakat kita kan gede juga hilang duit 800 gak bisa diambil, pusing dia Pak.

Jadi saya kira itu Pimpinan, sekali lagi terkait dengan Pasal 4, Pasal 18a yang menurut saya sangat kontradiktif dengan tujuan Pak Menteri tadi dapat direvisi, karena kalau tidak ya sama juga antara konsideran, antara pasal-pasal, antara tujuan kita melakukan BPUM tahap ke 2 ini justru akan saling kontradiksi.

Demikian ada kurang dan lebihnya mohon maaf.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Ya.

Terima kasih Pak Sonny.

Ini untuk kita temen-temen 1,2,3,4,5,6,7,8,9, masih 9 lagi. Jadi kalau bisa kita agak hemat waktu.

Saya ke kiri ke Pak Herman Khaeron.

F-PD (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Terima kasih.

Ketua dan seluruh Anggota Komisi VI yang terhormat.

Pak Teten, Pak Menteri Koperasi UMKM dan memang KSP itu bagus ketika dipimpin oleh Pak Teten gitu ya. Jadi bagaimana pun kami memberikan apresiasi dulu tidak ada keinginan Pak Teten sebagai KSP untuk macam-macam gitu ya, tentu beserta seluruh dengan Pejabat Eselon 1 dan di lingkungan Kementerian Koperasi, para direktur, Direktur Utama BNI diwakili oleh direksi, kemudian dari BRI dan Jamkrindo.

Pertama saya juga ingin mengapresiasi terhadap program BPUM yang tentu layak untuk dilanjutkan, itu dulu yang penting, layak untuk dilanjutkan, tentu dengan berbagai catatan-catatan yang ini masing-masing memiliki catatan penting terkait dengan pelaksanaan BPUM tahun 2020. Dan kami juga mendorong untuk tahun 2021 meski dari nominal satuan turun dari 2,4 menjadi 1,2 juta per penerima program. Tentu ini lah bentuk stimulus yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka untuk mendorong peningkatan kemampuan usaha kecil menengah akibat dampak Covid.

Ada beberapa catatan yang tentu ini menjadi catatan kami Pak Teten, Pak Menteri. Pertama kalau disebutkan bahwa tahun 2025 lembaga pengusul dan kemudian 2021 ditetapkan menjadi satu lembaga pengusul, tentu ada *reasoning* dan persoalan dari lembaga-lembaga pengusul sebelumnya dan ini bisa bermasalah gitu ya.

Dalam pemikiran saya jika pengusul semakin dipersempit ini sama dengan gini, sama dengan sistem perdagangan system imporlah, semakin dipersempit dengan kuota, itu justru semakin membuka ruang terjadinya penyalahgunaan atas birokrasi misalkan, penyalahgunaan mungkin atas kompetisi yang semakin ketat karena hanya satu lembaga pengusul yang diperbolehkan.

Oleh karenanya, jika masih memungkinkan, jika masih memungkinkan karena bagaimanapun bentuk Kementerian Koperasi memiliki dasar-dasar untuk menetapkan pilihan ini. Tetapi jika memungkinkan menurut saya sebaiknya dibuka lebih luas Pak Eko gitu ya, dibuka lebih luas silahkan keluar dulu Pak Eko gitu dan banyak instrumen yang tentu ini diberikan kepercayaan

sebagai pengusul, toh tetap bank nanti akhirnya kalau kemudian sebagai eksekutornya adalah bank, kan tetep bank nanti sebagai eksekutornya dan diberikan kewenangan seleksi juga tidak di bank kan diberi kewenangan kan tidak akan juga langsung menampung kemudian disalurkan.

Oleh karenanya, menurut saya akan lebih baik jika kemudian pengusulnya diperlebar, diperbanyak dan seleksinya tentu nanti ada dieksekutor di penyerahan uang gitu ya, di pemberian uangnya. Oleh karenanya, kalau masih memungkinkan saya usul tidak mau terlalu banyak argumentasi, satu lembaga pengusul yang ditetapkan dalam Permen 2 Tahun 2021 ini dapat direvisi menjadi banyak pintu yang memungkinkan justru lebih kompetitif. Saya khawatir kalau kemudian satu pintu hanya melalui birokrasi kami yang sering berhadapan dengan pihak mereka. Saya tidak ingin pada kesempatan ini justru memfitnah ataupun memberikan *statement* negatif terhadap sistem birokrasi yang ada, saya tidak mau itu, tapi paling tidak bahwa ada potensi ya, ada potensi untuk penyalahgunaan kewenangan dan tentu atas kompetisinya masuk dalam satu pintu, ini memungkinkan terjadi potensi penyalahgunaan kewenangan.

Yang kedua, ini kan program stimulus Pak. Nah, kalau kemudian bahwa pada hari ini dan pada hari berikutnya Bapak, Ibu sekalian bisa duduk bersama dengan lembaga-lembaga pembiayaan, justru sekarang diakar rumput itu yang paling sulit adalah ketika mendapatkan pembiayaan tanpa agunan gitu dan sudah bagus kalau penyertaan apa namanya Permodalan Nasional Madani yang tanpa agunan mereka bisa menyalurkan itu bagus. Tapi kalau bank kan nggak bisa tetap harus memiliki, harus menggunakan azas-azas perbankan gitu ya.

Nah, oleh karena itu, Pak Menteri usul saya ada tidak ada stimulus yang tentu ini menjadikan program di kementerian dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga pembiayaan coba dirumuskan yang lebih permanen, yang lebih permanen ke depan apa yang bisa dilakukan program bersama-sama dengan Kementerian Koperasi diinisiasi oleh Menteri Koperasi dan UMKM yang dalam pandangan kami adalah mantan KSP terbaik gitu ya, ini bisa dirumuskan menjadi lembaga pembiayaan permanen ke depan Pak gitu.

Jadi tidak harus kemudian ada program yang harus bersama-sama kolaboratif tetapi memang dirumuskan bahwa ini menjadi program permanen kementerian bersama dengan lembaga-lembaga perbankan dan non perbankan lainnya menjadi lembaga lembaga pembiayaan UMKM yang regulasinya bisa bersama-sama dengan Kementerian Koperasi.

Yang ketiga, yang terakhir yang ketiga. Saya kalau di dapil itu Pak kalau nanya tukang bakso itu paling banter itu modalnya cuman 500 ribu lho itu, berapa sih modal anda 500 ribu, kalau saya tanya apalagi tukang cilok itu berapa modalnya 300 ribu, untung anda berapa 100 ribu, kecil-kecil gitu ya. Tetapi mereka dengan modal kecil itu ditanya ironisnya apa, modalnya dari mana, modalnya dari bang Nusron katanya Pak, bang Nusron, maksudnya bank individu gitu ya, pokoknya setiap yang berdiri saya sebut gitu ya, apalagi mengganggu, keluar dulu Pak silakan.

Nah, oleh karenanya, menurut saya Pak ini yang harus dipotong, harus dipangkas, sudah dia bermodal kecil terikat kepada permodalan yang

bunganya besar, harus mengembalikan secara besar, contoh aja 300 ribu untungnya 100 ribu, mereka harus bayar sehari 50 ribu kepada si pemodal itu, dan ini hampir ditanya mungkin dari 5 yang ditanya 1 mereka yang terjebak atau 2 yang terjebak oleh sistem permodalan itu, sistem pembiayaan itu Pak, jadi kalau tadi besar kecilnya setuju dengan Pak Sonny, dengan Rp1.200 ini bagi mereka sesuatu yang luar biasa besar permodalan ini, bermanfaat betul Pak bagi rakyat, oleh karenanya sistem yang jangan-jangan birokratis gitu loh, sistemnya jangan birokratis kasihan mereka nanti akan dipimpong sana sini, sudah daftar menunggu ini, daftarnya harus melalui kepala desa.

Setahu saya nanti akan melalui Kepala Desa itu pendaftarannya itu, daftarnya melalui kepala desa, dari kepala desa nanti ke camat, dari camat ke kementerian kepada Dinas Koperasi, Dinas Koperasi baru menyalurkan kepada meneruskan pada perbankan. Ini akan banyak silat lidahnya akan lebih banyak gitu. Filter, filter silat lidahnya lebih banyak dari implementasi, menurut saya kalau memang mau dibagikan kepada yang berhak buka pintu seluas-luasnya, buka pintu pengusul sebanyak-banyaknya, silakan seleksinya tadi diperbankan, tapi perbankan juga jangan macam-macam lagi gitu loh, toh kalau tidak dimanfaatkan barangkali untuk modal yang lebih produktif juga bermanfaat 1.200 ini untuk meningkatkan daya beli gitu.

Saya kira itu yang ingin saya sampaikan Pak Teten tetap berjuang dan mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wata'ala, dijauhkan dari Covid-19, ini doa terakhir supaya nggak ada lagi yang nanya gitu. Dan tentu keberhasilan Kementerian UMKM, keberhasilan kami juga. Kalau kami kalau UMKM, koperasi UMKM gagal, Pak Teten gagal, kita juga gagal. Jadi ini yang harus kita bangun bersama, keberhasilan Pak Teten, keberhasilan kita bersama, keberhasilan kita, keberhasilan Pak Teten, gitu Pak Teten dan saya kira terima kasih atas kesempatannya Pak Martin mudah-mudahan setelah vaksinasi Pak Martin semakin sehat.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik.

Makasih Pak Herman. Saya rasa memang itu semangatnya dan kita adakan rapat ini juga supaya program ini sukses.

Kita ke kanan lagi Pak Nyoman Parta.

F-PDIP (I NYOMAN PARTA, S.H.):

Terima kasih.

Pimpinan, teman-teman, kawan-kawan Anggota Dewan.

Pak Menteri, dan juga

3 (tiga) Direktur BRI, BNI, maupun Jamkrindo.

Terima kasih.

Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Tentu yang pertama melanjutkan waktu kita rapat di ruangan ini dengan Pak Menteri juga. Kami memberikan apresiasi terhadap program ini, ini program yang orientasinya benar, pelibatangannya juga banyak orang, sasarannya banyak orang. Cuma Pak Menteri kalau banyak referensi yang menyatakan bahwa jumlah UMKM kita adalah 64 sampai 65 juta tahun 2020 sampai tahun 2021 yang akan dicairkan jumlahnya baru kurang lebih sekitar 21 juta Pak Menteri. Jadi masih masih sangat banyak yang belum, apalagi baru 69% yang cair, jadi masih masih banyak sekali yang harus dibantu kurang lebih sekitar 45 juta UMKM. Oleh karena itu, kami mengusulkan agar di anggaran perubahan yang akan datang dibuat dilipatgandakan Pak Menteri.

Kenapa begitu? Karena pada saat itu mudah-mudahan Covid sudah, karena vaksinasi berjalan begitu baik, mudah-mudahan Covid sudah berangsur turun, jadi dengan sendirinya pergerakan ekonomi harus dimulai. Oleh karena itu, bantuan dari Pemerintah dalam bentuk stimulus ini sangat sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, harapan kami ya ke depan ya jumlahnya harus dilipatgandakan, dituntaskanlah 64 juta UMKM, karena di samping posisinya yang strategis karena dia bergerak di akar rumput, jumlahnya yang sangat banyak Pak, dan juga varian industri, varian kegiatannya, dari industri eceran, terus makanan dan minuman termasuk juga pengolahan, bukankah hilirisasi ini yang sesungguhnya kita ingin tuju. Oleh karena itu, ini diberikan motivasi yang lebih banyak.

Yang kedua di dalam rapat di ruangan ini Pak Menteri. Saya masih ingat bahwa pada saat itu ada rencana pemerintah untuk menurunkan suku bunga dari 6 menjadi 3%, bahkan pagu anggarannya sudah disebut oleh banyak menteri, Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian, termasuk juga Pak Menteri sendiri, jadi 7,6, 7,6 T untuk tambahan anggaran subsidi bunga KUR dari 6 menjadi 3%. Saya berkomunikasi dengan pihak Bank BNI maupun Bank BRI walaupun bukan direktur. Jadi yang ada di provinsi kami, penurunan suku bunga itu belum terjadi sampai sekarang Pak.

Jadi, yang yang dari 6 menjadi 3% itu semua, dari pihak BNI juga menjawab begitu, dari pihak BRI juga belum belum jadi itu belum terealisasi. Artinya bahkan pada saat itu Pak Menteri bilang baik yang sudah, KUR yang sudah diterima, sudah berjalan, maupun pemohon KUR yang baru, sama-sama mendapatkan persentase subsidi 3%, jadi tidak 6% lagi. Oleh karena itu, disiapkan dana subsidi sebesar 7,6 T dalam pagu anggaran tahun 2021, itu yang kedua.

Yang ketiga, mohon izin teman-teman yang terhormat yang saya hormati, seperti yang kita ketahui Bali mengalami situasi dampak ekonomi yang paling buruk di seluruh Indonesia. Kita paham semuanya Bapak, Ibu teman-teman Anggota Dewan juga paham, ada ikhtiar dari Pemerintah Pusat untuk mempercepat vaksin maupun bulan Juli ini akan mulai membuka pariwisata Bali, mudah-mudahan tidak ada kendala lagi. Oleh karena itu, berbarengan dengan itu, mohon izin Pak Menteri teman-teman Anggota Dewan juga, bukan maksud untuk diprioritaskan Bali, walaupun dalam kondisi normal Bali kontribusi cukup besar juga terhadap devisa negara. Tetapi, kami ingin di diprioritaskan Pak karena kontraksi yang begitu tinggi, sehingga ketika

bulan Juli pariwisata mulai bangkit, terus ada support bantuan BPUM dari pemerintah yang banyak, besar.

Tentu percepatan ekonomi Bali ini akan bisa lebih pulih, karena memang suasananya minta ampun ini, karena ekosistem ekonomi Bali itu adalah ekosistem pariwisata. Jadi, karena pariwisatanya tidak bangkit, tentu semuanya kait-mengkait dan akhirnya menyebabkan suasana yang ekonomi yang sangat terpuruk. Oleh karena itu, sekali lagi tidak ada maksud untuk diistimewakan karena semuanya harus dapat di republik ini, tetapi kami mohon diprioritaskan Pak, karena biar berbarengan upaya membuka pariwisata di Bali dengan UMKM-nya mulai bangkit.

Kira-kira begitu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, Pak Nyoman Parta.

Kita ke sayap kiri lagi Pak Daeng Muhammad, oh enggak ada, Abdul Hakim Bafaqih.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Pak Martin mohon izin Pak Martin.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Nanti nanti, yang virtual belakangan.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan juga Anggota Komisi VI bagi yang hadir cara fisik dan virtual.

Yang saya hormati Pak Menteri Koperasi dan UMKM.

Bapak Dirut Jamkrindo, Bapak Direktur Utama, BNI diwakili Pak ya, dan juga Bapak Direktur Utama BRI.

Nah, karena waktu dari arahan dari Pimpinan waktunya singkat saya ke Pak Teten dulu. Pak dalam sebuah webinar itu dari staf khususnya Pak Menteri, Pak Riza Damanik itu menyampaikan bahwasanya kontribusi UMKM di tahun 2020 itu sebesar 61,07%, 61,07% dan itu meningkat dari pada 2019 yang hanya 60,3%, sumbangsih UMKM terhadap PDB.

Artinya selama pandemi kontribusinya naik, bahkan target di 2021 sumbangannya, targetnya Kementerian Koperasi dan UKM itu 62,3% sumbangan terhadap PDB dari UMKM, satu itu. Padahal kondisi di lapangan tidak demikian. Jadi survei BPS yang dirilis akhir tahun 2020 kemarin, itu menyampaikan 82,85% UMKM nyungsep, itu Bahasa Jawa nya nyungsep Pak, alias mengalami penurunan pendapatan selama beberapa bulan awal. Kalau sektor pariwisata tidak usah dibahas karena memang nyungsepnya luar biasa, tapi dari sektor akomodasi, kemudian transportasi, makanan, real estate dan yang lain-lainnya mengalami penurunan.

Nah, disurvei BPS juga yang bertajuk dampak Covid terhadap pelaku usaha tersebut juga menemukan bahwa 42% pelaku UMKM hanya dapat bertahan selama 3 bulan, Juli sampai Oktober 2020, sedangkan 58% lainnya masih bisa bertahan di atas 3 bulan. Bahkan, ada tambahan data dari Asosiasi UMKM Indonesia itu mengklaim selama 2020 sebanyak 30 juta UMKM gulung tikar alias bangkrut Pak, terutama pelaku-pelaku usaha mikro, akomodasi, pangan, dan minuman.

Nah, pertanyaan kepada kementerian Bapak, kenapa data kondisi UMKM yang di kementerian tampak berseberangan dengan kondisi real di lapangan. Jadi, dari kementerian punya data sendiri tetapi dari masukan teman-teman dan dari data yang kami dapatkan itu di lapangan tidak demikian itu Pak. Validitas data sangat penting karena data adalah elemen utama dalam merancang program kebangkitan UMKM paska pandemi, apalagi di rapat sebelumnya, itu Pak Teten menyampaikan membutuhkan anggaran untuk membuat big data. Nah, ini kenapa kok datanya berbeda-beda seperti itu Pak, itu pertama.

Kemudian yang kedua, terkait evaluasi program Banpres UMKM. Jadi di datanya Bapak ini, penggunaan dana bantuan program 88,5% itu untuk bahan baku. Nah, sedangkan di lapangan saya tadi juga diskusi dengan senior saya Kang Daeng itu, itu BPUM itu mayoritas digunakan untuk bayar hutang Pak dan untuk biaya hidup. Jadi yang sebelumnya ada terdapat perbedaan data dan dari survei yang dirilis tadi infonya dari UI ini, antara kondisi real yang yang kami dapatkan di lapangan itu berbeda, itu bagaimana pertanggungjawabannya, itu kedua Pak.

Kemungkinan yang ketiga, berdasarkan rencana program yang disampaikan dengan kementerian Bapak selain mendistribusikan Banpres, kementerian.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Ya, makasih makasih saya lagi RPD juga ya Mbak ya saya ngamatin aja dulu.

F-PAN (ABDUL HAKIM BAFAGIH):

Bisa di-mute? Saya kira itu, bisa dilanjutkan.

Saya ulangi Pak, berdasarkan rencana program kementerian Bapak ya kan selain mendistribusikan Banpres, kementerian punya program dukungan

manajemen bagi UMKM dalam upaya membangkitkan UMKM. Nah, wujud konkrit dukungan atau program dari kementerian Bapak, *nyuwun sewu* Pak, itu seperti bagaimana Pak ya, kami karena kami sampai sekarang ini di Komisi VI juga masih belum melihat secara jelas, selain mendistribusikan bantuan-bantuan.

Jadi, tiga poin itu Pak dari kami, yang pertama saya ulangi terhadap validitas data, karena disampaikan disampaikan dari kementerian Bapak dan data BPS berbeda, dari datanya sosio, Asosiasi UMKM juga berbeda itu pertama. Kemudian yang kedua, terkait data apa evaluasi terhadap penyaluran Banpres ini juga antara yang disampaikan ini dan di lapangan berbeda. Kemudian yang ketiga, terkait apa nih program dari kementerian Bapak selain mendistribusikan Banpres. Tiga itu untuk kementerian Bapak.

Kemudian selanjutnya ke Pak Jamkrindo, Pak Putra, Assalamualaikum Pak. Nah kalau kita bicara NPL Pak, itu kan rata-rata nasional di 1,2% tahun 2020, akan tetapi Pak ada beberapa bank penyalur KUR itu yang punya NPL sangat tinggi, bank swasta dan bahkan di atas 80%. Nah, berarti di sini kita sama-sama paham itu baik dari lembaga penjamin dan bank itu melakukan analisis manajemen resikonya kurang bisa maksimal, dan kemarin beberapa rapat dengan panjenengan itu disampaikan akan melakukan transformasi terhadap SDM di jajaran perusahaan yang Bapak kelola. Nah, itu progresnya sudah sejauh apa Pak terdapat transformasinya dan *roadmap*-nya bagaimana, itu pertama.

Dan yang kedua, kami mendukung Pak, upaya Bapak dalam melakukan diversifikasi produk untuk Jamkrindo karena memang *core* bisnisnya selama ini 70% menggantungkan dari program pemerintah. Nah, kami mendukung upaya Bapak untuk melakukan diversifikasi produk itu.

Kemudian ke BNI, Pak siapa tadi Pak, *ngapunten*, Pak oh Pak Sis yang ketemu di Semarang Pak ya. Kalau gitu sama Pak pertanyaan sama kemarin Pak, fokusnya BNI itu mau mau di mana itu Pak. *Nggih*, antri Pak Khilmi, *nggih to*, saya lanjutkan Pak. Nah, itu ceruk pasar yang mau diambil BNI itu di mana Pak, mikro, menengah, kecil atau skala besar.

Kemudian yang terakhir ke BRI, Pak Dirut *ngapunten* siapa Pak? Pak, Pak Supari, *nggih* Pak Supari. Nah, BRI ini nanti coba mungkin ditingkatkan koordinasi dengan Pak Teten. Bisa saya lanjutkan Pak Teten. Itu ada kejadian Pak di luar Jawa itu khususnya di Aceh penyaluran BPUM, karena ditugaskan di situ adalah BRI sedangkan di Aceh itu untuk BRI *covent* itu hanya ada di tingkat kecamatan atau kotamadya, di bawah itu yang banyak BRI Syariah, sedangkan BRI Syariah tidak melakukan apa penyaluran BPUM dan masyarakat yang di desa-desa.

Kalau mau ke tengah kota itu pasti butuh perjalanan, butuh akomodasi dan lain-lain. Dan sampai di BRI belum tentu bisa diterima, harus ambil antrian dulu, setelah ambil antrian ketika mau mencairkan BPUM ada kesalahan-kesalahan data seperti yang sebelumnya disampaikan sama temen-temen itu nggak bisa cair, dan kalau misalnya sudah lengkap pun data dan lain *tetek bengek* sebagainya sudah *clear* itu per harinya hanya dibatasi 500 orang. Nah, ini saya nggak tahu program yang luar biasa bagusnya dari

Bapak Presiden kita ya kan, akan tetapi eksekusinya di bawah itu ada koordinasi yang kurang baik antara Kementerian Koperasi dengan jajaran Bank Rakyat Indonesia, karena itu kejadian Pak di Aceh. Kami dapat laporan dari fraksi kami itu kejadian, seperti itu. Jadi bingung ini programnya bagus tapi kok malah mempersulit masyarakat, Kan ya *ngenes* juga Pak ya seperti itu.

Mungkin itu Pimpinan yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ke depannya program-program dari kementerian Pak Teten dan program-program dari apa kinerja dari beberapa BUMN bisa lebih maksimal di 2021 dan bisa lebih joss lagi ke depannya.

Terima kasih Pimpinan sekaligus izin pamit meninggalkan ruang rapat. Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wah enak betul, nanti nggak harus dijawab dong.

Sekarang sayap kanan Pak Nasim Khan.

F-PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):

Memang tega Pimpinan ini.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang kami banggakan Pimpinan Komisi VI Bapak Demer, Bapak Martin dari Nasdem bersyariah beserta seluruh Anggota Komisi VI.

Kepada Pak Menteri Pak Teten yang kami harapkan menjadi kebanggaan, Juga para Direksi Jamkrindo, BRI, dan BNI Pak Heri, Pak Sis, Pak Supari dan seluruh jajaran yang hadir pada hari ini.

Saya simpel saja karena saya kira kalau teknisnya semua segala hal yang sudah jelas Pimpinan, sudah disampaikan.

Yang pertama, saya pingin jawaban dari Pak Teten tentang realisasi pada 2021 saya cek di data ini hampir sudah 50% betul Pak, di 2001 Pak ya. Jadi BPUM di 2021 sudah realisasi dalam waktu 2 bulan sampai 3 bulan ini sudah 6,4 triliun atau 50-an%. Nah, itu luar biasa kami pingin data itu, itu itu sangat luar biasa ini, ini suatu gebrakan yang luar biasa sangat cepat saya kira dalam kementerian itu yang pertama, saya harapkan itu.

Lalu yang kedua, yang perlu saya pertanyakan itu bagaimana dengan penerima dari penyaluran yang pertama dengan yang saat ini, apa di-*double* atau yang lama dapat lagi, karena saya denger yang lama sudah dapat lagi, walaupun ada ketimpangan, yang pertama ada 2,4, sekarang 1,2. Saya kira kalau masalah nilai berapa pun saja namanya masyarakat dan kita semua, berapa pun kita pasti kurang, kalau kita bicara kurang ya, tetapi kan yang penting adalah pemanfaatan dari semua itu, dan saya yakin bantuan sudah ada itu sangat luar biasa saya kira. Cuma masalahnya tepat sasaran ya kan, sistemnya bisa dipermudah, tidak seperti yang sudah pengalaman, karena

pengalaman adalah guru terbaik, jadi pengalaman yang kemarin seharusnya kita lebih baik, nah itu yang kedua.

Yang ketiga, untuk proses kelembagaan dalam proses BPUM ini yang awalnya memang seperti teman-teman tadi disampaikan dari beberapa lembaga sekarang menjadi satu lembaga. Apa yakin Kementerian Koperasi dengan satu lembaga dari Dinas Koperasi di daerah itu bisa maksimal? Itu yang saya harapkan.

Lalu bagaimana tujuan motivasinya itu untuk itu, karena saya yakin Pak saya terbukti kemarin di 2020 Dinas Koperasi itu bisa mengumpulkan mikro dan lain-lain itu hanya kurang lebih sekian ribu, misalkan 2.000, kami dari lembaga beberapa lembaga yang kami bina, yang kita kawal, karena kami ini kan wakil rakyat Pak, kita punya beberapa binaan ya kan, kita mempunyai fungsi tugas masing-masing. Kita punya sumpah janji di daerah kita semuanya untuk mengawal minimal di dapilnya masing-masing ya kan, otomatis, di luar dari sisi politis kabupaten kedinasan itu pasti terjadi ya kan, walaupun pada eksistensinya ya kan mereka harus hadir sebagai aparatur untuk semua rakyat.

Tetapi yang terjadi banyak birokrasi itu selalu berpikir secara politis, oke ya seperti kami kami Partai PKB iya kan, kami Partai PKB kalau dipikir banyak masyarakat kita masyarakat di bawah, masyarakat kultur, masyarakat miskin, seharusnya banyak menerima BPUM ini Pak Teten, tapi ternyata ndak Pak, belum tentu, masyarakat PKB, padahal kami Partai PKB adalah penentu pemimpin bangsa sampai kapanpun PKB akan menentukan Pak ya kan, walaupun di sini ada yang memberangkatkan PDI, ada dukungan dari Golkar, dari Gerindra, tapi penentunya nanti di PKB Pak terakhir Pak gitu. Nah, kita masyarakat kultur kita tuh banyak tapi memang kesulitan, masyarakat di bawah itu sulit Pak gitu loh.

Nah, kami mohon ketegasan dari Kementerian Koperasi nanti, sampaikan kepada wilayah Dinas Koperasi Provinsi dan sampai ke kabupaten itu harus tegas Pak, tolong diakomodir semua masyarakat ya kan, hilangkanlah sisi politis, nanti bicara politik nanti 2024 Pak, kurang setengah tahun itu di situ dukung-mendukung Pak berperangnya iya kan. Tapi tolong sekarang pikirkanlah rakyat gitu loh ya kan, pikirkan rakyat iya kan, jangan berpikir politis saja gitu loh. Masyarakat sekarang mulai cerdas kok Pak, bisa memilih, kalau masalah uang siapa saja diterima sekarang Pak, kampanye semua uang diterima kok ya kan, ya kan, saya alhamdulillah, saya modal saya pas-pasan aja bisa jadi kok ya kan, banyak yang modalnya besar-besar nggak jadi wakil rakyat, rakyat cerdas Pak berapa duit dimasukin kantong, Alhamdulillah rezeki kok ya kan.

Nah, ini yang kita harapkan nanti Pak tegaskan kabupaten dinas ya kan, kalau bisa ini direvisi Pak, Permen ini, tidak hanya dengan satu lembaga Dinas Koperasi, mungkin dengan dinas lembaga lembaga koperasi lain. Itu yang kami harapkan nanti ya kan, tekankan lalu ada unsur masuk dari masyarakat, dari lembaga kepada dinas, mungkin melalui dinas maksudnya Pak Teten ya, melaui dinas lembaga-lembaga menyerahkan ke dinas, tolong diterima. Nah, nanti tetap di kementerian yang akan menata iya kan, jangan sampai dari masukan dari lembaga, dari masyarakat langsung ditolak oleh dinas, itu terjadi Pak. Saya beberapa teman mengatakan oh endak Pak, ini

sudah ada. Padahal lho dinas bisa mengumpulkan berapa banyak UMKM, orang ngurusin kerjaan di kantor aja ndak beres kok, kebanyakan ya, tidak semua ya gitu ya, apalagi ngurusin ribuan masyarakat dan banyak Pak yang benar-benar menerima harusnya, tidak menerima, itu.

Lalu yang kedua tolong diperhatikan mungkin rekan-rekan dan juga kementerian di halaman 6, jenis kelamin penerima BPUM, di sini saya lihat banyak jenis kelamin perempuan. Oke, dalam satu hal mungkin perempuan karena banyak di situ yang bekerja ya, warung, perempuan mungkin ya, padahal yang punya dana itu lakinya Pak iya kan dan kita tidak mau memperkerjakan perempuan sebetulnya ya kan, begitu loh. Nah, di sini lebih besar perempuan padahal banyak pekerja itu laki-laki yang lebih maksimal sebetulnya, tapi pengolahannya biasanya wanita, itu okelah saya kira bisa diakomodirlah. Tapi yang terpenting adalah daerah penerima BPUM Pak, bagaimana kita membangkitkan daerah kecil ya kan, bagaimana kita mengembangkan desa seperti kementerian tulis di sini adalah keterbatasan unit cabang pembantu bank penyalur di beberapa daerah di Indonesia Timur dan lain-lain, daerah tertinggal, terdepan, terluar. Nah, ini terluar dan tertinggal, sedangkan di sini daerah penerima BPUM terbesar adalah kota Pak, yang banyaknya juga pendatang, lah bagaimana dengan desa-desa ini Pak.

Nah, ini tolong di dikroscek Pak, lebih diutamakanlah di daerah-daerah desa ya kan, bukan tidak boleh di Bali, tidak dimaksimalkan, tidak, boleh *monggo* tapi di Bali juga ada daerah-daerah yang dibutuhkan pasti gitu loh, nah ini tolong Pak. Jangan hanya di daerah perkotaan saya kira, supaya berkembang juga di desa masyarakat desa kasihan Pak, rakyat Pak ya kan ya kan, jangan sampai pas di DKI lebih besar dibandingkan misalkan Banten, Jawa Barat dan apa, nah ini tolong dicatat di sini kami berharap. Lalu teknisnya Pak tolong dicek nanti teknis kepada masyarakat, di dinas juga dijelaskan, dibantulah dinas ya kan, biar dapat dunianya, biar dapat akhirnya juga lah Pak dikit-dikit ya kan, gitu loh, jadi biarimbang ini kami harapkan Pak tolong dipikirkan, kalau masalah nilai saya kira oke gitu, nggak ada masalah berapapun, proses dipermudah.

Saya kira itu Pimpinan untuk menjadi catatan untuk kementerian, kalau bisa direvisi peraturan itu bisa tidak terlalu berat, kalau misalkan caranya seperti satu lembaga tolong diakomodir, dikasih keputusan untuk wilayah koperasi dan kabupaten untuk bisa menerima semua. Saya kira itu.

Wallahul Muwaffiq Illa Aqwami Thariq.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P.):

Pokoknya yang Pak Nasim Khan biar masuk gimana caranya tuh Pak gitu maksudnya, bikinlah aturannya begitu Pak karena ini memperjuangkan rakyat.

Kita ke udara dulu Pak ke virtual sebentar, selingan.

ANGGOTA:

Sini dulu Pak Ketua yang fisik dulu Ketua, Ketua yang fisik dulu Ketua.

KETUA RAPAT:

Eenggak ada selingan virtual dulu.

ANGGOTA:

Nanti dong yang virtual itu.

KETUA RAPAT:

Selingan satu biar nggak ngantuk, silahkan Pak Deddy.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Terima kasih, Pimpinan.

Suara saya jelas? Hallo suara saya jelas.

KETUA RAPAT:

Jelas, silakan Pak Deddy.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Makasih.

Saya kalau BRI, BNI dan itu Jamkrindo ya saya kira tidak terlalu ingin saya bicarakan pada siang hari ini. Saya langsung saja ke Kementerian Koperasi. Pertanyaan saya yang pertama Pak Menteri itu sisa dana apa namanya sisa yang belum dicairkan 31% itu sampai kapan tenggat waktunya, dan kalau tidak *ter apa* namanya, tidak diambil juga itu mau diapakan, itu yang pertama.

Yang kedua, Pak saya terus terang juga keberatan seperti teman-teman yang lain kalau ini apa namanya diberikan pengusulnya hanya Dinas Koperasi di daerah Pak, karena kita tahu bahwa Dinas Koperasi di daerah itu juga adalah bagian dari kepentingan politik kepala daerah, saya kira justru mereka harus diberi tugas jadi katakanlah verifikasi gitu ya, pengusulnya silahkan saja dari desa desa setempat gitu ya, lalu ada yang membantu Pak untuk melakukan semacam juga katakanlah semacam untuk review Pak, apakah itu perbankan yang ada di setempat atau jasa keuangan lainnya Pak, jadi saya harapkan supaya tidak hanya Dinas Koperasi Pak, tapi juga apa namanya melalui desa saja supaya jalan.

Yang ketiga Pak, saya berharap perhatikan juga daerah-daerah perbatasan pinggiran ya dan pulau-pulau terluar Pak. Ambil contoh di dapil saya Pak ada 4 PLBM itu selama ini sangat tergantung kepada komoditas

dari luar negara kita, karena akses ke negara kita justru lebih sulit dan lebih mahal. Sekarang mereka tidak bisa dagang Pak, tidak bisa jualan gitu ya, kalau mau ngambil bantuan pemerintah pun Pak, 2,4 juta Pak, sewa *speed boat* aja Pak bisa 5 juta Pak. Jadi untuk daerah-daerah seperti ini saya kira Bapak juga harus berpikir bagaimana bisa sampai ke mereka terutama daerah-daerah perbatasan pulau terluar itu Pak, ambil contoh kemarin di Kerayang Pak, tabung elpiji 12 kg harganya 1.400.000, jadi tolong juga perhatiannya.

Yang terakhir saya ingin mengatakan bahwa program seperti ini bagus, kita apresiasi, tapi tidak ada hubungannya dengan daya beli, karena ini diberikan kepada pengusaha ultra mikro. Sementara daya beli itu adalah rakyat secara keseluruhan. Nah, saya kira perlu dipertimbangkan kalau rakyat juga tidak, terutama mereka yang tidak berpenghasilan atau penghasilannya jauh melorot, tidak diberikan santunan juga oleh pemerintah, maka upaya untuk daya beli itu tidak akan banyak berhasil.

Dan yang terakhir Pak, saya ingin sampaikan Pak, tolonglah kita juga di Komisi VI ini kami diberitahu program-program apa saja yang kita bantu, bisa bantu, daerah pemilihan kita itu mengakses Pak, karena saya dengar itu ada kredit koperasi dan sebagainya, ya kredit usaha. Itu saya dengar juga banyak mafianya Pak di daerah. Ini tolong kita juga dibantu di Komisi. Kalau soal BPUM ini saya tidak terlalu berharap lagi Pak dari Kementerian Bapak, karena kami sudah malu di periode pertama kemarin, akhirnya kita malah kejar-kejar orang gitu ya, ini sangat mempermalukan sebenarnya.

Saya kira itu Pimpinan.

Terima kasih banyak.

Selamat siang.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

kembali kita mendarat kiri dulu ya ya. Pak Khilmi dulu berarti ya.

F-P GERINDRA (KHILMI):

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih, Ketua.

Yang saya hormati Anggota Komisi VI.

Yang saya hormati Pak Menteri UMKM.

Direktur Utama BNI yang diwakili Pak Sis.

Direktur Utama BRI yang diwakili Pak Supari.

Direktur Jamkrindo.

Jadi setelah saya mendengar pertanyaan dari teman-teman ini Pak Menteri, Pak Menteri ini kenapa ya, kok menghubungkan selalu kalau kita ini membahas program dengan Komisi VI kok selalu dihubungkan dengan politik

gitu loh. Di kabupaten pun sekarang ini juga politik Pak, yang jadi Bupati pun juga dari partai-partai gitu loh. Jadi jangan sampai kita ini Pak di sini, di DPR RI ini membahas anggaran di Kementerian Koperasi seharusnya kita ini harus dihormati gitu loh Pak, jangan sampai kita ini nggak pernah ngusulin apa-apa, kita dikasih nggak papa, nggak dikasih, tapi jangan saya dengar dari temen-temen kan berhubungan dengan politik terus gitu loh.

Bapak jadi menteri ini juga ada hubungannya dengan politik. Pak Jokowi diusulkan menjadi Presiden itu juga dari partai politik gitu lho Pak. Dan tugas kita di sini kan ada 3 legislasi, mengawasi dan menganggarkan gitu loh Pak. Jadi selama saya di Komisi VI selama 5 tahun 2014-19 tuh tidak pernah mendengar Kementerian Koperasi ini mendapatkan anggaran tuh yang bertriliun-triliun gini Pak.

Terus pertanyaan saya ini Pak, tujuan kita ini untuk BPUM toh ini, itu untuk meningkatkan daya beli masyarakat atau meningkatkan UMKM supaya bisa berkembang Pak, ini pertanyaan saya ke satu nih. Karena apa Pak, karena kita ini duit 2,4 atau 1,5 ini apa yang bisa diberi dan bisa berkembang gitu loh, kalau tujuannya itu meningkatkan daya beli masyarakat, ya berikan aja BLT ke masyarakat yang nggak punya nggak punya itu. Bapak harus cerdas ini jadi menteri nih, jangan sampai jadi menteri cuma oh saya nyalurin BLT, masalahnya apa Pak? Uang ini tidak ada pertanggungjawaban di, apakah ini ada peningkatan di masyarakat atau duit itu hilang gitu loh. Saya ini Pak terngiang-ngiang ya almarhum Pak Menteri Koperasi zaman Pak Habibie ya, duit cuman 6 koma berapa triliun kenyataannya kan hilang kalau programnya itu tidak terfokus.

Dan saya berharap ini Pak Menteri ini, kita menganggarkan di sini ya diberi apa ya untuk pengawasannya, diberikan ke mana. Kalau Pak Menteri menerbitkan Permen Koperasi UMKM Nomor 2 Tahun 2021, itu dampak dari dinas itu apa, juga orang politik, politik di kabupaten, nanti orang-orang yang berseberangan dengan bupati apa yang dikatakan Pak Muhti tadi juga akan terdampak gitu loh. Saya tadi nggak ngikutin, tapi ngikutin di, jadi saya kan kasihan temen-temen ini, kok seolah-olah kita ini, saya ini lho nggak dikasih, ya misalnya dikasih program untuk masyarakat, juga kita pilih pilih, mana yang pantas diberi duit 2,4 juta itu tukang bakso atau orang jual apa itu pentol yang kecil-kecil itu, mana yang bisa bermanfaat gitu loh Pak, jangan di-*kebyah uyah* aja orang yang udah punya modal 1,52, 5 miliar dikasih 2,4 yang enggak bermanfaat.

KETUA RAPAT:

Ok

F-P. GERINDRA (KHILMI):

Itu Pak ya.

Jadi pertanyaan saya tujuan dari pemberian ini untuk meningkatkan UMKM atau daya beli masyarakat. Itu aja dari saya Pak Ketua.

Karena BRI, dan BNI, Jamkrindo saya udah tahu repotnyalah, Insya Allah bagus kan gitu, tapi kementerian ini yang perlu kita koreksi, kita sebagai pengawas gitu.

Sekian.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kita ke Kyai Awi.

F-PPP (H. ACH. BAIDOWI, S.Sos., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Lumayan juga ini aktif semua Komisi VI ini, karena menyangkut masyarakat kecil.

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang kami hormati.

Menteri Koperasi dan UKM Pak Teten beserta

Para direksi, Dirut dari BRI, dari BNI yang diwakili oleh salah satu Direktur, ada juga dari Direktur Jamkrindo.

Langsung saja terkait dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Setahu saya dalam beberapa tahun ini Kementerian Koperasi dan UKM selalu mendapatkan penambahan anggaran dari disetujui oleh Komisi VI. Namun lagi-lagi kami kecewa gitu, tidak ada sebuah terobosan kegiatan yang spektakuler hanya rutinitas dan formalitas belaka, tidak ada berdampak signifikan gitu. Dan itu saya kira bukan tipikalnya dari Pak Teten gitu, bisa jadi Pak Teten itu dikerjain oleh birokrasinya gitu, itu, maka nih ditambah lagi saat ini misalkan ketika kita bicara BUPM, yang BUPM yang sudah disampaikan oleh teman-teman terdahulu.

Ini cukup miris ketika kami membaca Permenkop Nomor 2 Tahun 2021 yang di slide nomor 9 ini, di halaman 9. Di satu sisi ada keinginan untuk menambah target penyaluran tetapi jumlahnya menurun, saya nggak tahu nih teman-teman di Banggar. Setahu kami sih waktu di rapat Komisi VI, pagu anggaran untuk ini tidak berkurang gitu, enggak tahu mungkin di Banggar ada penyesuaian. Kalau kalau begini ya pasti pasti berkurang dari dari tahun lalu gitu.

Terus kemudian di slide nomor 5 tadi disebutkan bahwa penyaluran di 2020 tepat sasaran 97,15%, artinya apa dari 5 pengusul, kalau kita lihat matrik yang disampaikan bahwa itu tepat sasaran seharusnya tidak ada masalah dong dengan jalur pengusungnya 5 pihak, Dinas Koperasi, koperasi yang berbadan hukum, tentu bukan koperasi yang abal-abal, kementerian atau lembaga dan seterusnya, ada 5 perbankan dan perusahaan yang pembiayaan yang diaudit OJK.

Apakah yang dari 4 lembaga pengusul itu usulannya tidak kredibel? Kata Pak Nusron tadi bodong gitu. Tapi kalau lihat datanya tepat sasaran tuh 97 sekian. Ini kan aneh, ada paradoks di situ, kami nggak bicara soal politiknya karena Pak Menteri juga jabatan politis sama seperti kami gitu, kalau dibawa bawa ke politik semuanya jabatan politis gitu. Nah kalau kita buka data misalkan apakah betul data yang disampaikan oleh Dinas Koperasi itu benar, sehingga dijadikan satu-satunya pengusul di tahun 2021, apakah itu betul, coba lihat saya nggak usah jauh-jauh ke daerah lain di dapil saya Pak, Madura empat kabupaten lebih fokus lagi di Kabupaten Pamekasan saya menemukan data.

KETUA RAPAT:

Empat kabupatennya di mana aja Pak?

F-PPP (H. ACH. BAIDOWI, S.Sos., M.Si.):

Kabupaten Sumenep, Pamekasan, Bangkalan. dan Sampang. Bali tidak termasuk, meskipun dapil saya juga berhimpitan juga dengan Bali itu perairannya, kalau orang Kangean lebih dekat ke Bali Ketua. Nah, di Kabupaten Pamekasan, kita cek ini faktanya ada, bahkan saya bisa saya sebutkan nanti itu, termasuk kecamatannya tapi nggak perlu saya sampaikan di sini. Penerima BPUM ternyata apa, yang diusulkan dari dinas juragan material, itu kan bukan UMKM Pak. Ketika kami tanya kenapa kamu ambil, lho saya nggak minta kok, saya dikasih gitu, saya nggak tahu pendukung siapa kan gitu. Bisa jadi.

F-PD (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Pak Amin, *tak iye*.

F-PPP (H. ACH. BAIDOWI, S.Sos., M.Si.):

Ada juga juragan konveksi yang tidak masuk kategori UMKM, ya diterima duitnya *wong* dikasih kok. Kalau kalau dasarnya bahwa seolah-olah yang dari Dinas Koperasi sehingga menjadi satu-satunya lembaga pengusul di 2021, itu sudah banyak temuan, gugur dengan sendirinya. Itu satu hal ya saya kira ini kegelisahan-kegelisahan dari temen-temen harus didengarkan. Kalau saya konkrit cabut itu, revisi tidak mau memohon lagi Permenkop 2 Tahun 2021 kembalikan aja yang ke 5, 5 pengusul itu apa susahnyanya gitu dan juga praktek di lapangannya ya seperti itu.

Kalau misalkan kita lihat juga terkait dengan teman-teman yang menerima yang sudah diusulkan, tetapi ini mungkin karena kebijakan juga di masing-masing bank penyalur tetapi perlu dicarikan solusinya. Satu contoh misalkan mereka yang ada persoalan, ada tunggakan misalkan, itu langsung otomatis di-*cut*, tidak dapat, sudah punya hutang, tidak dapat BPUM, usahanya macet, ya sudah. Ini harus ada formulasi seperti apa caranya ya

nanti diatur aja. Kalau bicara soal, lah ini Pak, jangan sampai terulang Pak, terkait dengan, kasihan masyarakat.

Jadi ini teknis ya, tapi konkrit teknisnya, jadi mereka harus mengantri sejak subuh misalnya, hanya dengan uang 2.400.000 katanya sosial *distancing*, tapi antrinya Masya Allah. Kenapa nggak dibikin sistem bahwa hari ini kecamatan, desa ini, besok desa yang lain, sehingga mereka sudah terjadwal, tidak perlu subuh subuh ngantri ambil nomor antrian di kantor bank. Itu hal yang sangat teknis. Yang lain-lainnya saya kira tadi sudah disampaikan oleh teman-teman.

Terima kasih Pimpinan.

Asalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selanjutnya Pak Hendrik, ini yang terakhir ini, jadi kita oh tambah nanti Bu Sondang. Tunngu Bu Sondang ya, Pak Hendrik dulu ya, silakan.

F-P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M.):

Terima kasih.

Bapak Ibu Anggota Komisi VI yang saya hormati.

Menteri Koperasi dan UKM yang saya hormati.

Direktur Utama BRI, BNI, dan Jamkrindo yang saya hormati.

Saya tidak bermaksud lagi melakukan repetisi pertanyaan atau ekspresi kekesalan kepada Pak Menteri terkait dengan evaluasi BPUM, karena menurut saya substansinya telah cukup disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya. Oleh karena itu, saya bermaksud menggunakan waktu yang penting ini untuk menyampaikan beberapa catatan Pak yang tidak terkait dengan BPUM Pak.

Yang pertama adalah dalam catatan saya berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu. Itu memberi keuntungan kepada UKM itu paling kurang ada 9, ada 9 manfaat yang pasti dinikmati oleh UMKM, dan dari 11 *cluster* yang diatur dalam undang-undang itu memang *cluster* UMKM adalah *cluster* yang menjadi *sweetener*, pemanis, ketika kita membahas dengan tekanan publik yang luar biasa Undang-Undang Omnibus Law itu untung saja ada *cluster* pemanis yaitu UMKM ini.

Sebut misalnya tadi 9 manfaat itu soal rezim izin tunggal ya, izin tunggal atau NIB nomor induk berusaha, lalu ada wajib bermitra perusahaan besar dengan UMKM, ada kemudahan pembiayaan dan intensif fiskal, adanya dana alokasi khusus Pak, pengadaan barang dan jasa sebesar 40%, pengadaan barang dan jasa di pemerintahan itu wajib menggunakan produk UMKM, termasuk penyediaan 30% areal di *rest area* terminal, pelabuhan, bandara, dan sebagainya untuk kepentingan UMKM.

Nah, pertanyaan saya satu saja kepada Saudara Menteri, terkait dengan dana alokasi khusus Pak, apakah dana alokasi khusus untuk tahun 2021 ini, implementasi Undang-Undang Cipta Kerja yang katanya Pemerintah Pusat, yang mewajibkan Pemerintah Pusat untuk membantu pengembangan UMKM di daerah, itu telah terakomodasi atau belum Pak? Ini demi untuk fungsi pengawasan bagi kami terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja itu. Saya mohon informatoris saja atau konfirmasi dari Saudara Menteri.

Kalau terkait dengan BNI dan BRI, saya merasa memang tidak perlu juga untuk kita menyampaikan catatan, karena sebagai kontributor deviden bertahun-tahun kepada negara apa lagi yang mau kita ragukan dari sisi kinerja. Saya *appreciate* sekali Pak Dirut, tetapi ada satu catatan yang saya ingin sampaikan terkait dengan perilaku intoleran tadi ya. Perilaku yang terjadi terhadap kasus-kasus membuka rekening bagi gereja yang dipersulit itu mungkin saja juga bukan cuma kepada gereja, mungkin juga kepada kelompok-kelompok agama yang lain di daerah-daerah yang lain juga kasus seperti itu bisa saja terjadi, kita tidak tahu.

Tetapi kasus yang disampaikan oleh Saudara Mufti Anam tadi itu menurut saya itu, itu menggelitik saya sebagai warga bangsa, warga negeri ini. Dan karena itu usulan konkrit saya kepada jajaran manajemen kalau bisa kepada yang bersangkutan itu diberi sanksi tegas Pak, supaya ada efek jera, ada *deterrent effect* yang bisa berimbas kepada perilaku para pimpinan atau pada karyawan bank di tempat lain, bila perlu pindahkan saja dia ke Iran sana Pak biar cocok. Saya minta maaf soal ini tapi saya merasa ini sesuatu yang semestinya tidak harus terjadi di industri perbankan, harusnya lebih profesional dan ini bank negara, karena itu tidak ada ruang bagi perilaku perilaku seperti demikian.

Lalu yang terakhir buat Direktur Jamkrindo Pak. Saya ini masih trauma dengan kasus, dengan kasus Jiwasraya dan Asabri. Kita tahu bahwa skandal yang terjadi dua institusi *insurance* itu, salah satunya disebabkan karena kita memang terlambat mengidentifikasi kondisi RBC atau *risk base capital* nya, ya kita tahu berdasarkan peraturan OJK Nomor 71 Tahun 2016, *risk base capital* itu harus 120% ya, saya tidak dapat gambaran itu dalam presentasi Bapak.

Tetapi asumsi saya RBC Jamkrindo positif dan bagus. Saya mohon konfirmasi saja Pak, kenapa itu menjadi relevan saya tanyakan, karena dalam laporan pencapaian program kerja Jamkrindo, aspek keuangan saya melihat di sini tahun 2015-2017 rata-rata dikisaran 650-700 miliar, tapi melonjak tinggi 2019 karena, padahal itu belum terjadi Pandemi Covid, dan 2020 masuk akal karena Covid, *anyway* ada justifikasinya Pak. Nah, berbeda dengan laba tahun berjalan, gambarannya agak berbeda sekali, oleh karena itu menjadi relevan saya untuk mengetahui *risk base capital* Jamkrindo tuh berapa kasih tahu karena itu penting sekali untuk kita diketahui.

Dan yang terakhir terkait dengan skema re-asuransi Jamkrindo, apakah Jamkrindo menempatkan kembali resiko yang ditahannya itu kepada pihak *reinsurance* dan apakah itu, ataukah memang Jamkrindo menahan sendiri *all* retensinya sendiri tanpa mentransfer resiko itu kepada pihak re-asuransi. Saya kira saya mohon penjelasan terkait dengan ini.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Hendrik.

Waduh jam 2 nih, kalau diperpanjang nanti saya perpanjang sampai jam setengah tiga, saya nggak mau perpanjang pokoknya jam 2 selesai ya.

Silakan Bu Sondang.

F-PDIP (SONDANG TIAR TAMPUBOLON):

Terima kasih, Pak Demer Pimpinan.

Yang kami hormati Pak Menteri Koperasi dan UMKM beserta seluruh jajarannya, dan

Juga Bapak-bapak Direksi PT BRI, BNI dan juga Jamkrindo beserta seluruh jajarannya.

Mungkin saya tidak mengulang lagi juga Pak dengan apa yang disampaikan tetapi saya harus menyampaikan bahwa kekecewaan kami terhadap penyaluran daripada program yang sangat bagus ini dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Kami harap di penyaluran tahun 2021 ini tidak lagi terjadi hal-hal yang kita tadi sudah sebutkan banyak hal yang terjadi ini menjadi evaluasi dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Terutama saya mencatat yang pertama adalah birokrasi itu harus benar-benar diperbaiki sedemikian, sehingga karena cukup menyedihkan Pak, 2,4 juta dan sekarang menjadi 1,2 juta mereka harus antri berjam-jam, mereka harus meninggalkan keluarganya dan ternyata di sampai di tempat itu harus ditolak mereka harus kembali lagi kepada desanya.

Walaupun saya bukan dapil saya tuh Dapil DKI Pak, bukan dapil di di apa namanya masih terjangkau di di kota, tapi ternyata di sini pun sama hal yang terjadi begitu. Ketika banyak rakyat kami melaporkan bahwa Bu ini sudah dapat verifikasi sms-nya, tetapi banyak sekali kendala-kendala yang terjadi ini nggak, ditolaklah, apalah segala macam, alasannya mereka harus kembali lagi, mereka harus yang sudah tadinya berharap oh setelah kami mendapatkan dana ini, sudah akan mereka *planning*, walaupun *planning*-nya ya namanya rakyat seperti apa tidak tidak profesional, mereka harus kembali ke rumahnya dengan kecewa karena tidak mendapatkan apa yang menjadi hak mereka. Jadi kami harap jangan lagi ada dusta di antara kita Pak Menteri dan beserta seluruh *stakeholder* terkait, karena semuanya ini kita bekerja bagaimana bersama-sama untuk pemulihan ekonomi nasional kita.

Kemudian di luar daripada BPUM ini Pak Menteri, kami berharap bahwa ada program yang lebih komprehensif lagi terhadap kalau kita bicara tentang usaha mikro kecil dan menengah ini, karena memang ini salah satunya sektor yang harus didukung apa sih Pak program untuk peningkatan daripada usaha mikro kecil dan menengah.

Kita kemarin konsinyering di sana ada anggaran-anggaran untuk peningkatan, tapi kami tidak pernah, belum pernah mendengar Pak sampai

dengan sekarang kami belum pernah mendengar sampai dengan di dapil kami sendiri saja, di kota Jakarta Pak, itu belum pernah ada kami mendengar ada upaya untuk bagaimana meningkatkan daripada *performance* atau kinerja usaha mikro kecil dan menengah.

Kita kalau misalnya katanya memberikan bantuan modal 2,4 juta, tapi mereka ditinggal begitu saja tidak ada supervisi, tidak ada apa namanya bimbingan-bimbingan yang jelas, ya usaha mikro kecil menengah itu dia akan berlalu seperti itu saja. Padahal mimpi besar kita adalah bagaimana bisa meningkatkan UMKM ini sampai kepada sentra-sentra dan bisa diekspor ke mancanegara, tetapi tidak ada pendampingan dan supervisi yang jelas terhadap usaha mikro kecil dan menengah ini.

Jadi, menurut kami ya sangat sayang sekali itu akan menjadi ya seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi adalah, bahwa itu akan menjadi uang yang sia-sia seperti itu saja, tidak akan ada lagi peningkatan kualitas pada UMKM kita. Nah, kami harapkan ini jelas gitu loh, tidak usah perlu jauh-jauh dapil kami yang DKI saja kami tidak pernah mendengar Pak, yang tiap hari kita tinggalnya di DKI. Itu yang yang kami yang kami catatkan untuk Kementerian Koperasi dan UMKM.

Nah, kemudian saya agak sedikit melenceng dari pada BPUM ini juga kepada dua perbankan yang tergabung dalam Himbara, BRI dan BNI. Pak, BPUM ini kan salah satunya adalah untuk meningkatkan bagaimana sektor *real* bisa bergerak, tapi sektor *real* ini bisa bergerak juga kalau didukung oleh *cost of fund* yang bersaing, kompetitif, suku bunganya menarik, saya tahu bahwa *seven days*, *seven days repo rate* itu RR sudah turun sampai ke level 3,5%, tanggal 26 Maret 2021 yang lalu Boss BI Pak Perry Warjiyo itu menyatakan sampai memohon-mohon kepada seluruh perbankan termasuk perbankan Himbara untuk menurunkan suku bunganya. Kami mengerti Pak bahwa *funding* daripada bank-bank ini bukan dari BI, tetapi kenapa pemerintah menurunkan daripada suku bunga yang sampai ke level 3,5% karena apa? Karena memang supaya mengalir kredit-kredit daripada yang ada diperbankan.

Kalau kredit-kredit yang daripada perbankan itu tidak mengalir nggak bisa bergerak juga Pak sektor *realnya*, begitu, dan penurunan daripada suku bunga daripada perbankan ini, ini akan membuat daripada operasional perusahaan-perusahaan yang saat ini masih terdampak Covid-19 mereka ada relaksasi-relaksasi perpanjangan nafas, supaya tetap bertahan.

Jadi, kalau Bapak-bapak sebagai direksi di sini, saya tadi berharap bahwa para dirutnya hadir karena saya mau menyampaikan hal ini, tapi tolong disampaikan kepada level diri Pak Dirut Pak Sunarso, dan juga Pak Royke, begitu sebagai daripada Pimpinan Bank Himbara untuk ini menjadi hal yang serius, karena Pak Gubernur BI kita sampai memohon-mohon bahwa tolong ini tolong diturunkan karena BI, BI Rate sudah diturunkan sampai ke level 3,5%, ya 3,5% kita bisa kasih margin 2%, 5,5%, wajarlah Pak sebagai daripada profit margin kepada para perbankan ini.

Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan Pak Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT (MARTIN MANURUNG, S.E.,M.A.):

Baik, Bu Sondang.

Jadi semua sudah yang ada di daftar. Sekarang saya berikan kesempatan Pak Menteri dulu ya untuk bisa menanggapi. Kami persilakan Pak.

MENTERI KOPERASI & UKM:

Baik, terima kasih Pak Martin, Ketua, Pimpinan.

**Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Pimpinan dan,
Anggota Komisi VI DPR RI yang kami banggakan.**

Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas masukan yang begitu banyak, dan walaupun sebenarnya bagi kami masukan-masukan itu bukan hal baru, karena ketika menyusun program ini di komite kan sudah dibahas, dan juga waktu rakor atas kementerian dan lembaga juga sudah muncul. Nah, tapi kami memang harus membuat satu kebijakan cepat dan tapi sebelumnya saya mohon maaf kalau di penyaluran BPUM di tahun lalu masih ada beberapa kekurangan.

Cuma memang kita harus sama-sama akui ini program PEN itu juga bukan perencanaan yang didesain 1 tahun sebelumnya, karena ini situasi darurat dan ini bagi Kementerian Koperasi dengan tidak ada data tunggal ini dengan 12 juta itu di awal kami sangat berat. Tapi alhamdulillah hanya dari Agustus, dari pertengahan Agustus sudah bisa kita selesaikan cepat dengan tingkat kira-kira kesalahan yang sangat kecil, karena kami juga sudah diperiksa, jadi relatif sangat kecil.

Karena itu program ini di tahun ini diteruskan kembali karena dianggap cukup bagus, cukup berjalan dengan baik. Jadi ini bukan klaim kami karena ini kalau tidak jalan oleh Komite PEN nggak akan dijadikan lagi program. Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa program Banpres produktif untuk usaha mikro dalam bentuk hibah modal kerja bagi usaha mikro yang belum *bankable* ini, bagian daripada program pemulihan ekonomi nasional dibahas dan diputuskan juga oleh Komite PEN. Jadi bukan kami sendiri, kami sebagai pelaksana bersama dengan bank Himbara dan sekarang kita perlebar dengan PT Pos dan BPD.

Yang kedua, mekanisme penyaluran dan Permenkop yang mengatur penyaluran BPUM 2021 ini juga dibahas lintas kementerian dan lembaga. Jadi juga mempertimbangkan rekomendasi BPK agar proses *cleansing* data lebih sederhana dan juga mempertimbangkan penyebaran daerah. Kalau kemarin kami dengan terlalu banyak pengusul itu sulit untuk mengkonsolidasi penyebaran antar daerah. Kami menggunakan data BPS, UMKM itu mayoritas lebih dari 79% itu ada di Sumatera dan Jawa.

Nah, selebihnya 21% di luar Jawa dan Sumatra. Nah, ini kami diarahkan oleh Pak Presiden penyaluran kedua aspek pemerataan antar daerahnya. Nah, karena itu kita putuskan lewat satu pintu daerah. Tadi Pak

Sonny sudah sampaikan, memang salah satunya juga untuk mengkonsolidasi data tunggal usaha mikro itu di kabupaten kota, karena di Undang-Undang Daerah yang mengurusin usaha mikro dan kecil itu ada di Pemerintah Kabupaten dan Kota, tapi bukan berarti nanti Kepala Dinas itu, kami sudah rapat terus dengan Kepala Dinas, bukan berarti mereka yang nentuin sendiri, itu datanya.

Jadi mereka harus menerima masukan-masukan dari koperasi dari usulan Bapak Ibu sekalian. Nah, usulan dari Bapak Ibu sekalian dari Anggota Komisi VI itu bisa disampaikan kepada kami, dan nanti kami koordinasikan dengan daerah, sehingga dari aspek pemerataannya dari awal terdata, ya kami ada catatan dari KPK juga soal penyebarannya, lalu juga dari BPK. Jadi kami ingin pastikan bahwa UMKM penyaluran ini akan jauh lebih baik dari tahun lalu, lebih tepat sasaran, nanti silahkan dengan Pak Sesmen dan ada Pak Edi Satria yang Deputi.

F-PDIP (dr. H. MUFTI A. N. ANAM):

Pak mohon izin Pak, apa namanya Pak Teten.

Terima kasih tadi penyampaiannya.

Tapi Pak harapan kami, tadi kami udah nyampaikan, kan kita kita kurang sepatutnya kalau hanya ke koperasi di kabupaten kota setempat. Tolong di Permen kalau masih bisa diperbaiki, diperbaiki Pak, intinya harapan kami hapus atau, kata kawan kami tadi dihapus, atau harapan kami Pak intinya apa aspirasi kita itu didengarkan Pak, tidaknya didengarkan, diaplikasikan di lapangan, itu aja intinya sebenarnya.

Saya khawatir dengan hanya ruang hanya ada satu tempat melalui Dinas Kabupaten Kota, Bapak tadi banyak loh Pak kawan-kawan kita nyampaikan kita perlu didengarkan atas ini Pak. Kami mau dalam forum ini ada keputusan konkrit untuk kawan-kawan ini kira-kira. Kita malu loh Pak beneran serius, kami bukan apa-apa, kita nggak ada kepentingan apa pun malu, hanya malu, kita nih Komisi VI DPRRI ternyata nggak bisa ngapa-ngapain, datanya nggak ada, nggak ada gunanya, ternyata kita punya Anggota DPR nyoblos DPR enggak ada gunanya ternyata Pak, malu kita sama kawan kita, tolong Pak suasana kebatinan kami atas hal itu Pak.

MENTERI KOPERASI & UKM:

Baik.

Ya nanti akan kami bawa di dalam Rapat Komite PEN Pak ya, karena ini saya mau jelaskan yang existing dulu, karena ini udah penyaluran 2021 udah hampir 50% kita salurkan. Baik, usulan ini nanti akan bawa kepada Komite PEN karena kami tidak putus sendiri ya, jadi ini akan kami bahas, nanti apakah dimungkinkan dilakukan perubahan.

Nah, mengenai sebenarnya tadi yang Bung Sonny disampaikan, memang ini kami usulkan di awal itu untuk penerima 24 juta penerima ya, 24 juta tapi budget yang disediakan masih tetap pada tahun lalu, karena itu Pak Presiden arahkan pada kami 1,2 juta. Nah, tapi dalam pelaksanaannya

karena ini apa juga dikaitkan dengan upaya untuk stimulus di kuartal 1, ekonomi kuartal 1. Jadi ini harapan saya 12,8 tuh tahap pertama sehingga kami akan usulkan kembali 12 juta berikutnya, karena masih banyak yang belum menerima ya.

Kami juga kenapa yang penyalurannya diberikan yang sudah kombinasi antara yang sudah menerima dan yang belum, itu juga diputuskan oleh Komite PEN Pak, yang memimpin langsung Pak Komite Pak Erlangga ya, jadi kami tidak bisa keluar dari kebijakan itu, oleh karena itu maka.

INTERUPSI F-PG (NUSRON WAHID):

Interupsi Pak.

Pak mohon Pak, yang mengenai landasan Permenkop Nomor 2 itu diputuskan di PEN Pak ya?

MENTERI KOPERASI & UKM:

PEN Pak, betul.

F-PG (NUSRON WAHID):

Kenapa enggak masuk dikonsideran Pak, berdasarkan Rapat di PEN enggak ada, kenapa nggak keputusannya itu adalah rapat anu berdasarkan Keputusan Komite PEN, kok keluarnya Peraturan Menteri Koperasi Pak? Kalau Peraturan Menteri Koperasi kan yang tanda tangan adalah Menteri Koperasi dan dalam konsiderannya itu tidak ada, ini berdasarkan hasil keputusan dari PEN juga tidak ada.

MENTERI KOPERASI & UKM:

Nah, itu mungkin ada beberapa kekurangannya, tapi kan pembahasannya di Komite PEN Pak semua. Jadi terakhir kan ini juga melibatkan Seskab, melibatkan semua Pak, jadi ini bukan program kami sendiri, ya jadi ini nanti beberapa usulan kita akan bawa lagilah di rapat ini, karena ini kami harus cepat Pak, ini baru DIPA-nya disetujui bulan apa, 1 Maret ya, 1 Maret sudah disetujui dan baru bisa disalurkan dua minggu lalu, dan kami harus ngejar akhir kuartal 1 ini bulan Maret ini, maka kami harus cepat disalurkan.

Jadi, nah usul kami, nanti mohon bantuan juga dari Bapak Ibu sekalian, karena usaha mikro yang *un-bankable* tuh banyak sekali, ya sehingga 12,8 itu tidak cukup 12 juta itu, kami awalnya desain untuk 24 juta ya seperti juga pernah disampaikan di dalam rapat ini.

F-PDIP (dr. H. MUFTI A. N. ANAM):

Mohon maaf Pak Menteri, mohon info saja. Yang pengusulan pertama, itu yang tidak dapat ada berapa ratus ribu atau berapa juta?

MENTERI KOPERASI & UKM:

Baik.

Jadi tadi ada kesalahan data, jadi sebentar, yang tahun lalu yang belum tersalur itu 14% bukan 31%, bukan 31. Itu data survei November ada salah dan karena ini uang negara, kami sudah minta perpanjangan tapi terakhir 18 Febuari kami harus kembalikan ke kas negara.

F-PDIP (dr. H. MUFTI A. N. ANAM):

Maksud saya bukan yang tidak tersalur, yang sudah apa namanya mengusulkan, tapi ternyata divalidasi sudah sudah masuk, tapi nggak dapat atau yang mungkin validasinya kurang, kan problemnya ini tidak tahu juga orang itu kurangnya NIK atau apa, sehingga dia nanti perlu mengusulkan kembali atau tidak kan tidak tahu itu.

MENTERI KOPERASI & UKM:

Baik nanti kami teknisnya Pak Hami tolong dijelaskan, saya sudah selesaikan dulu yang umu-umumnya dulu.

F-PDIP (dr. H. MUFTI A. N. ANAM):

Sebentar ini penting, mohon izin Pak, mumpung ada *panjenengan* Pak. Mohon maaf Pak ya.

KETUA RAPAT:

Ke sini dulu, ke sini dulu.

F-PDIP (dr. H. MUFTI A. N. ANAM):

Bentar bos ini, o iya maaf, izin izin Pimpinan sorry sorry, mohon izin Pimpinan ya.

KETUA RAPAT:

Apa tuh, soal apa? Soal apa?

F-PDIP (dr. H. MUFTI A. N. ANAM):

Nggih, mohon izin Pimpinan karena ini penting buat kami, nah ini yang paling penting Pak. Pak cepat penting Pak, tapi harapan kami mekanismenya juga harus jelas. Kami barusan langsung telepon ke konstituen kami Pak, kita punya tenaga ahli di lapangan untuk mengecek itu, jangankan disalurkan aplikasinya aja belum dibuka loh Pak.

Kita katanya dua minggu lalu sudah ada yang disalurkan, kita enggak ngecek aja enggak tahu, apakah masyarakat kita bisa dapat itu atau enggak kita enggak tahu. Nah, artinya apa Pak, saya mau ini *khitoh* dari tujuan awal dari penyaluran BPUM ini bisa tepat sasaran. Maksud kami adalah mekanisme harus jelas Pak, cepet cepet ya enggak papa cepet, tapi maksudnya harus tepat sasaran, mekanisme harus jelas, jangan tiba-tiba buang duit rakyat begitu saja, begitu.

Makasih.

KETUA RAPAT:

Poinnya udah dapat? Silakan.

MENTERI KOPERASI & UKM:

Ya kita kan diperiksalah, kita juga enggak gegabah menyalurkan uang, kami justru akan sangat hati-hati, harus tepat sasaran, kami diperiksa Pak. Jadi Bapak, Ibu sekalian boleh saja ngusulin namanya siapa aja, tapi kami kalau tidak tepat sasaran misalnya salah NIK-nya, kami diperiksa Pak, ya apalagi salah misalnya diberikan kepada usaha menengah. Jadi kami juga sangat hati-hati ya. Jadi saya mohon kita ada kesadaran bersama, saya tidak akan mengambil keuntungan politik di sini, tapi saya diberi pesan supaya ini sampai ke masyarakat Pak.

Jadi saya ingin lanjutkan dulu. Jadi BPUM itu bagian dari situmulus ekonomi di kuartal 1, penerima lama, itu diminta diprioritaskan karena harus cepat, karena data paling siap itu yang penerima lama, yang sudah *clear and clean* datanya. Lalu sisanya penerima baru yang sudah diusulkan dan belum sempat dicairkan untuk diusulkan kembali.

Jadi nanti yang masih belum kemarin itu kan kami udah masukkan lagi. Jadi kami sekarang kalau untuk data 12,8 juta kami sudah ada di tangan datanya, sebenarnya gitu, jadi lebih siap Pak, cuma kalau kami mau perbesar lagi ini jadi 24 juta, kalau kami usulkan lagi berikutnya tapi kami akan coba kami usulkan ya. Nah itu kami butuh data yang sangat besar, dan sebenarnya tahun lalu kan yang ngusulkan ke tempat kami juga banyak, walaupun datanya tidak tidak akurat, ya jadi karena kan data inikan, validasi data BPUM itu kan harus tepat sasaran, ada masukan dari pemeriksa, dari OJK, dari SMI Kementerian Keuangan, dan kami begitu *clear and clean* datanya baru kami penerbitan SK kepada bank penyalur.

Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau melihat data yang sudah dikeluarkan oleh kami, itu dengan mudah karena itu sudah SK kami kepada bank penyalur, ya kira-kira seperti itu. Nah, nanti si Bank kan memang harus memastikan kembali bahwa si penerimanya itu tepat tidak, karena itu kami terakhir *last result* penerimanya harus menandatangani surat pertanggung jawab mutlak, ini untuk menghindari kesalahan misalnya yang penerimanya sudah meninggal itu kan hampir enggak mungkin karena akan dipanggil ke itu.

Nah, memang kemudian kemudian ada hambatan di lapangan dalam dalam implementasinya, kayak kemarin misalnya, kami sangat terima kasih kepada BRI dan BNI yang juga tidak mudah ya, ada yang dari *remote area*, ada yang kena PSBB nggak boleh antrian begitu, jadikan belum ada yang mau nandatangani juga Pak, ini ya, ya sudah pertanggungjawabannya. Nah, karena itu maka PT Pos ini kita libatkan untuk menjangkau daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh perbankan, ya jadi nanti penyalurnya. Nah, ini kami sedang dalam tahap pembuatan PKSnya dengan PT Pos. Lalu di Aceh seperti.

KETUA RAPAT:

Sorry Pak, kalau PT Pos itu dia pakai rekening juga?

MENTERI KOPERASI & UKM:

Iya nanti Pak Edi nanti ya, tolong dijelaskan Pak Martin mungkin teknisnya.

KETUA RAPAT:

Soalnya kan dia bukan perbankan ya.

MENTERI KOPERASI & UKM:

Iya betul.

Jadi itu juga masukan dari ini karena kita ingin apa ada ada masukan kemarin yang jauh dari perbankan, seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian, sehingga harus harus pergi ke ya iya, ya jadi integrasi apa begitu ya, sebentar. Nah, kalau ada perbedaan data NIK ya, data NIK dengan nama, Komenkop sudah menginstruksikan kepada bank penyalur untuk menyalurkan dana jika terdapat perbedaan hanya satu sampai tiga huruf nama dengan KTP, jadi ini udah *clear*-lah, kalau di awal kan kami kan enggak berani itu.

Nah, realisasi penyaluran BPUM untuk 2021, karena kami diminta cepat telah tersalurkan sekitar 5,8 juta penerima lama dan 900 sampai 1 jutalah penerima baru, nah sisanya nanti kita akan percepat mudah-mudahan di pertengahan bulan depan sudah selesai, karena kita ingin punya kuartal 1 ekonomi bisa membangkitkan optimisme *market*, dan itu juga sangat penting saat ini untuk pemulihan ekonomi nasional. Jadi, program bantuan ini meskipun hibah memang kemudian kita juga ingin ini intergrasikan kepentingan yang lebih besar yaitu pemulihan ekonomi nasional.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc):

Izin Pak Menteri, izin Pak Ketua izin, izin ada di langit, dari langit, sebentar pendalaman.

Pak Menteri saya mau tanya saja Pak, ini garansi 100% bahwa penerima BPUM yang tahun 2020 itu kita bisa *check* ke konstituen kita ya, bahwa mereka otomatis menerima 2021 Pak? Tadi Bapak katakan udah 5 juta sekian, apakah memang 2020 itu 5 juta sekian yang disalurkan sebelumnya.

MENTERI KOPERASI & UKM:

Baik, Ibu.

Kami data sangat terbuka, jadi untuk dilihat di surat surat perintah kepada, ini sudah berapa SK Pak, kami sudah ada 10 keputusan yang ditandatangani oleh Deputy Usaha Mikro kepada bank penyalur untuk segera disalurkan dengan total tadi di sekitar 6 jutaan. Jadi ada datanya Ibu, nanti bisa kami koordinasikan.

Izin kami lanjutkan. Nah, tadi ada pertanyaan mengenai KUR tahun ini. Sebenarnya KUR dinaikkan menjadi 253 triliun dari 190 triliun. Ini juga ada kaitan dengan banyaknya UMKM yang membutuhkan pembiayaan murah dan keterbatasan pemerintah untuk memberikan hibah, dalam bentuk untuk hibah. Nah, untuk super mikro yang 10 juta ke bawah, itu dengan bunga 3% sampai 6 sampai 30 Juni 2021. Nah, jadi menurut saya kalau yang misalnya tidak bisa menerima BPUM karena ini juga bukan apa, bukan kewenangan kami, kami ingin sebanyak-banyaknya. Nah, ini bisa tapi anggarannya tidak cukup, ini bisa didorong untuk meminta KUR di bawah 10 juta dengan bunga 3%, ya nanti, Pak, Pak, super mikro kan tidak ada agunan kan, tidak ada agunan. Jadi ya itu sampai 30 Juni selama 6 bulan, ya nanti kita akan evaluasi lagi apa kebijakan ini perlu dilanjutkan atau tidak, nanti kita akan kita bahas di Komite PEN.

Mengenai data tunggal UMKM, ini sedang dalam proses penyusunan ya, karena selama ini terus terang Kementerian Koperasi tidak punya data tunggal dan data Usaha Mikro itu ada di kabupaten dan kota, ini yang kami nanti akan integrasikan, saya kira Undang-Undang Cipta Kerja sudah cukup mengatur ini.

Nah, tadi untuk penyaluran di Aceh yang terkait dengan BRI Syariah, itu nanti bisa kita bisa libatkan ke BPD. Nah, ini juga sedang dalam proses pembuatan kerja sama dengan BPD, kami juga ada dana PEN untuk koperasi, untuk memperkuat daya modal kerja koperasi 1 triliun dengan bunga 3%. Jadi kalau ada Bapak, Ibu sekalian yang koperasi di dapilnya atau ini untuk didorong pembiayaan silakan diajukan ke LPDB dan prosedur juga sekarang sudah dipermudah.

Nah, saya kira itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan, mengenai dana alokasi khusus yang tadi. Saya kira untuk pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja ini sedang susun Pak untuk 2021. Nanti, mungkin Pak Arif bisa menjelaskan Pak Sesmen, Pak Eddy dan Pak Hanung silakan ada yang kalau mau dijelaskan.

-PG (NUSRON WAHID):

Sebelum Pak Eddy Pak, saya mohon izin Pak Pimpinan, diizinkan apa tidak.

KETUA RAPAT:

Iya

F-PG (NUSRON WAHID):

Pak Teten mohon izin Pak.

Mohon maaf tadi saya agak ini, mengenai yang sisa-sisa tahun 2020 Pak, tadi Bapak belum jelaskan konkritnya, yang sudah ter SK kan, datanya bener sesuai KTP, di fotocopy KTP-nya, tapi tiba-tiba di bank penyalur datanya beda. Ini nasibnya bagaimana Pak, apakah itu masuk kategori yang 6 juta itu, yang diprioritaskan yang tadi sudah diberikan apa belum, karena tadi saya cek, ketika saya di luar tuh saya kontak-kontak belum, belum dapat mereka.

Nah, ini bagian dari piroritas yang mana, karena mereka udah dapat SK, sudah datang ke bank, hanya karena perbedaan KTP, iya kan, data yang dimiliki oleh bank penyalur, padahal data yang diusulkan dengan fotocopy KTP itu persis, kan ini aneh, kok terjadi perbedaan, nasibnya bagaimana Pak mohon solusi Pak.

MENTERI KOPERASI & UKM:

Ya nanti Pak Hanung bisa jelaskan, ini masih ada banyak ruang untuk itu masukan-masukan kasus seperti ini, tidak banyak sebenarnya, karena dari BPK juga ada laporan hal seperti itu, ini nanti bisa kita solusinya nanti diusulkan yang baru, iya itu aja.

Terima kasih.

DEPUTI BIDANG USAHA KECIL DAN MENENGAH (HANUNG HARIMBA RACHMAN):

Terima kasih Pak.

Jadi kalau tadi saya juga juga konsultasi dengan temen-temen BRI kasusnya ini juga nggak banyak sebenarnya Pak gitu ya, dan

F-PG (NUSRON WAHID):

2.100 itu banyak loh Pak.

DEPUTI BIDANG USAHA KECIL DAN MENENGAH (HANUNG HARIMBA RACHMAN):

Kalau kami tadi cek ini belum, nanti kita lihat kembali Pak, nanti mohon datanya diberikan ke kami, karena kami tidak merubah data Pak, di sistem kami itu kami tidak berubah data sama sekali, kami hanya memproses data masuk, kemudian kita proses sistem kita gitu ya, kalau terjadi kesalahan data pasti semuanya pasti salah nih Pak. Kalau ada perubahan ya, kan di sistem ini, nah makanya itu kita butuh klarifikasi, karena kami tidak merubah data, tidak ada sentuhan dari kami sekali, data kita masukkan. Jadi kalau ada perubahan itu.

INTERUPSI F-PD (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Interupsi Ketua, interupsi.

DEPUTI BIDANG USAHA KECIL DAN MENENGAH (HANUNG HARIMBA RACHMAN):

Kalau ada kesalahan sistem pasti banyak yang terjadi Pak gitu ya, nah itu tapi nanti kami akan cek Pak.

F-PG (NUSRON WAHID):

Mohon izin Pak, ini kan terjadi di mana-mana Pak, di tempatnya Pak Mufti di Pasuruan terjadi, di saya dua tempat terjadi di dua kabupaten, di tempat-tempat yang lain juga terjadi. Saya pulang apa kayak sudah kita serahkan Pak dokumennya Pak, daftar nama versi usulan kita lengkap dengan fotokopi KTP-nya dengan data di BRI-nya itu beda, waktu keluar, padahal kita kan nggak nyentuh, kita hanya mengusulkan email, berdasarkan data email itu, yang dikasihkan oleh temen-temen, maka ini *lack*-nya ini di mana Pak, dan ini solusinya apa. Kalau *lack*-nya di mana, solusinya apa, iya kan, karena ini SK tahun 2020 kan harusnya dia udah punya angan-angan ya udah melihat, dapat 2.000, dua juta empat ratus, kalau kemudian diusulkan pada tahun ini hanya terima satu juta dua ratus, kan pasti ekspektasinya turun lagi dia, karena dia harusnya terimanya tahun lalu masalahnya, gitu Pak.

DEPUTI BIDANG USAHA KECIL DAN MENENGAH (HANUNG HARIMBA RACHMAN):

Ya, baik Pak jadi kalau kemarin sebenarnya kita sudah ada solusi seperti yang tadi sampaikan Pak Menteri, kalau perbedaan 1-2 huruf kami sudah minta sebenarnya menginstruksikan ke pihak bank penyalur itu, untuk bisa diproses gitu ya, kalau perbedaan 1-2 huruf. Nah, ini nanti kami akan cek Pak gitu ya, masalahnya di mana, tetapi sekarang kebijakannya bahwa untuk yang seperti itu diprioritaskan untuk diterima di tahap berikutnya, 1,2 Pak.

F-PG (NUSRON WAHID):

Kalau prioritas kenapa belum belum dicairkan dari yang 6 juta itu sekarang, berarti kan bukan prioritas namanya.

MENTERI KOPERASI & UKM:

Bukan Nusron, jadi yang karena kita perlu kecepatan untuk mengejar kuartal 1, jadi yang disalurkan tuh yang memang datanya yang *clean and clear* itu, yang penerima lama jadinya yang paling besar.

F-PG (NUSRON WAHID):

Ini juga penerima lama ini Pak.

MENTERI KOPERASI & UKM:

Kan belum, penerima usul lama.

F-PG (NUSRON WAHID):

Iya penerimaan lama sudah di SK-kan, cuma belum cairkan karena bermasalahnya di BRI-nya.

MENTERI KOPERASI & UKM:

Nah, iya, itu kita katagorikan kan belum penerima.

F-PG (NUSRON WAHID):

Iya betul Pak

MENTERI KOPERASI & UKM:

Penerima lama.

F-PG (NUSRON WAHID):

Pak yang kedua, begini Pak intruksi untuk yang hanya beda 2-3 itu bulan apa, karena bulan Januari itu kita masih menanti Pak, belum ada instruksi itu, bulan Januari itu. Mohon izin Pak ini instruksinya bulan apa itu Pak sampai ke bank itu, lah kalau November harusnya cair dong Pak, kenapa ini nggak cair juga itu kalau bulan November, Desember harusnya cair dong Pak, kalau November, sampai bulan Januari enggak cair.

KETUA RAPAT:

Berarti nanti dipelajarilah, mungkin sekarang juga nggak mungkin juga Pak Deputi.

F-PG (NUSRON WAHID):

Pak Ketua izin Pak ya, kita rapat bukan sekali loh Pak, bulan Januari kita udah tanyakan loh Pak, jawabnya masih sama seperti ini Pak pada bulan Januari kita rapat, dan semuanya juga menjanjikan akan diusulkan pada priode pada tahun ini. Ternyata tahun ini juga dijanjikan belum masuk juga gitu Pak, ini janji-janji kayak *jannatun fil udzun*, sorga di telinga Pak. Mohon izin Pak.

Terima kasih, Pak.

KETUA RAPAT:

Iya ya.

INTERUPSI F-PD (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Interupsi, interupsi.

KETUA RAPAT:

Siapa tuh.

F-PD (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Di virtual.

KETUA RAPAT:

Pak Herman ya.

F-PD (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Ya.

KETUA RAPAT:

Iya kenapa Pak?

F-PD (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Saya usul saja ini kan biarkan forum raker ini umum saja, menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Teten, mendingan nanti teknisnya menurut saya pendalaman di RPD saja.

KETUA RAPAT:

Dengan deputi ya, ya ya nanti kita RDP dengan deputi lagi.

F-PD (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

Saya kira usul saya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Setuju Pak Herman.

Terima kasih.

Memang betul-betul fraksi solid.

F-PD (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.Si.):

KSP terbaik soalnya.

KETUA RAPAT:

Ok masih ada tambahan Pak, Pak Deputi. Baik kalau gitu oh ada ya silakan-silakan.

DEPUTI BIDANG USAHA MIKRO (EDDY SATRIYA):

Izin Bapak Pimpinan.

Tadi terkait dengan penyalur tahun ini memang disampaikan tadi adalah BRI, BNI kemudian ditambah Mandiri, kita juga tambahkan BPD dan PT Pos Indonesia. Kedua terakhir itu dalam arti mengantisipasi yang mohon maaf tadi biaya jemput uangnya, mungkin jauh lebih besar begitu.

Salah satu tadi BPD mungkin kalau tidak salah Pak Menteri sudah menyampaikan kasus di Aceh yang harus syariah dan itu allhamdulillah mereka bersemangat Pak dan siap untuk PKS. Nah, yang PT Pos ini, kami juga sedang menyiapkan PKS tapi belum final, karena ada beberapa harus diklarifikasi dulu, pertama tadi itu Pak apakah memang bisa menerbitkan rekening, info mereka sementara bisa, tapi kita akan cek ulang itu apakah memang sesuai syarat itu, yang kedua ada kemungkinan nanti ada tambahan fee Pak karena Pos da Giro.

Nah, kalau ini memang nanti tidak bisa kita eksekusi, kita tetap saja dengan yang existing tambah BPD dan Mandiri tadi Pak, tapi ini kita karena Pos itu setahu kami waktu ngurus Pos di Bappenas dulu itu ada yang sampai ke daerah, pakai kapal, ada yang pakai kuda juga untuk daerah-daerah yang terjauh. Jadi mungkin memang kita masih kita pertimbangkan tergantung nanti PKS-nya seperti apa yang kita sepakati.

Terima kasih.

Demikian Bapak Pimpinan.

F-P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M.):

DAK Pak, DAK belum dijelaskan.

DAK Pak, DAK Pak.

KETUA RAPAT:

Kenapa Pak.

SEKRETARIS KEMENTERIAN (ARIF RAHMAN):

Baik.

Terima kasih Pak.

Untuk DAK tahun 2020 ini, memang peruntukannya digunakan untuk peningkatan kapasitas SDM Pak, dan itu belum mencakup ke semua kabupaten memang, karena jumlahnya kan masih terbatas. Dengan adanya PP 7, maka pemanfaatan DAK nanti akan diperluas Pak. Jadi bisa dimanfaatkan salah satunya adalah untuk pendataan dan juga dimungkinkan nanti untuk DAK dalam bentuk fisik juga dimungkinkan.

MENTERI KOPERASI & UKM:

Mungkin saya Pak.

F-PDIP (SONNY T. DANAPARAMITA):

Ketua, Ketua boleh pendalaman dikit Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M.):

Iya. Apa namanya ini kan perintah undang-undang Bapak-bapak, undang-undang dan dia harusnya berlaku menyeluruh dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Maksud saya poinnya adalah di satu

sisi ada norma yang diatur oleh undang-undang yang sifatnya perintah, kepada Pemerintah Pusat untuk membantu UMKM lewat dana alokasi khusus, Pemerintah Daerah Pak ya.

Nah, yang ingin saya tahu itu adalah implementasinya aja, apakah itu di tahun ini telah terimplementasi ataukah belum. Kalau belum kan ya tinggal informatori saja belum gitu. Kalau soal yang tadi itu kan dia nggak terkait, karena enggak bisa parsial begitu misalnya pengembangan kapasitas di beberapa kabupaten, terus kabupaten yang lain terus apa. Jadi nggak apa-apa kalau belum terakomodasi sekarang, kan saya sifatnya informatoris saja, kalau bukan tahun ini ya mungkin tahun depan. Tapi poinnya adalah saya ingin memastikan bahwa norma undang-undang itu terimplementasi karena ada kepentingan UMKM daerah yang memang wajib secara etis harus kita perjuangkan sebagai wakil daerah.

Terima kasih Pak

SEKRETARIS KEMENTERIAN (ARIF RAHMAN):

Baik, Pak.

Untuk tahun ini belum Pak, tahun yang sekarang belum.

KETUA RAPAT:

Oke jajaran Bapak cukup ya, Pak Menteri ya, kita ke BRI.

Silakan Pak.

DIREKTUR UTAMA PT BRI (PERSERO) TBK:

Terima kasih, Pimpinan.

Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VI yang saya hormati.

Dalam perspektif kami sebagai bank penyalur, maka spot-spot yang tadi disampaikan seluruh anggota itu adalah benar, dan potret analisis kami dalam pelayanan juga begitu. Namun demikian, kami jangka pendek, maupun jangka panjang, selalu saja merespon itu semua.

Bapak dan Ibu sekalian,

Respon jangka pendek tadi udah disampaikan oleh Pak Menteri dan seluruh jajaran, bahwa kami diminta untuk merelaksasi banyak hal dan itu kami lakukan di lapangan termasuk sekalipun itu ada perbedaan NIK kami harus ke lapangan. Jika orangnya bener ya sudah, dengan berbagai resikonya tentunya di-support oleh timnya Pak Menteri kami bisa membuat mempertanggungjawabkannya dengan audit audit eksternal, termasuk teman-teman di BPK.

INTERUPSI F-PG (NUSRON WAHID):

Pak mohon maaf Pak, interupsi Ketua.

Ini kami sudah datang nggak di survei lapangan Pak. Pernyataan Bapak tadi di-*support* ke lapangan itu kan kalau ada perbedaan NIK, nggak ada itu Pak, yang yang saya kasus saya sampaikan ini. Saya berani sumpah Pak, saya enggak bohong Pak, ini mau bulan puasa Pak ya kan, ayo kita ke sana Pak kalau enggak percaya Pak, mohon maaf Pak jangan anu, jangan jangan buat manis-manis Pak, ini 2.100 sama ini Pak, se anu seribu berapa Pak, tidak diverifikasi, ditolak, tidak dicek ke lapangan, orangnya datang, mohon maaf Pak, apa jangan bilang dengan pertanggungjawaban begitu, nggak ada itu Pak. Mohon Pak, kalau memang nggak dikasih nggak papa dikasih, tapi ini jangan membuat *statemen* seakan-akan indah gitu loh Pak, padahal tidak indah di lapangan gitu. Mohon izin Pak ini Pak.

KETUA RAPAT:

Oke.

DIREKTUR UTAMA PT BRI (PERSERO) TBK :

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya, silakan.

DIREKTUR UTAMA PT BRI (PERSERO) TBK :

Bisa melanjutkan apa yang disampaikan tadi adalah bahwa itu adalah *effort* kami yang maksimal. Banyak keterbatasan yang kami apa mungkin nggak bisa menjangkau semuanya Gus, tetapi dengan singkatnya waktu bahwa penyaluran terakhir itu akhir Desember. Kemudian kami harus ada perpanjangan 2 kali dan terakhir 18 Februari. Oleh karena itu, mohon izin Bapak Ibu Pimpinan dan juga seluruh Anggota itulah kondisi kami dan tadi di depan saya sampaikan bahwa itu adalah ruang-ruang perbaikan kami, khususnya jika nanti kami mengambil peran di dalam penyaluran di tahun 2021, begitu Gus, iya. Dan itu adalah bagi, belum saya lanjutkan tadi Gus.

Berikutnya, dalam jangka panjang kami bersama-sama dengan tim di Kementerian Koperasi terus memperbaiki bisnis proses yang tentunya berbasis data. Oleh karena itu, bersama-sama timnya Pak Menteri data Insha Allah semakin baik, dan mudah-mudahan harapan dari pemerintah untuk semakin bisa menggerakkan apa ekonomi di-*grass roots* itu bisa tercapai.

Berikutnya terkait dengan beberapa hal yang tadi Gus Nusron juga sampaikan, *spleteran-spleteran* itu Gus. Izin Gus yang isu di Pekanbaru, itu sudah kami respon dan sudah selesai dan memang di medsosnya belum diturunkan. Sesungguhnya yang terjadi adalah temen-temen melakukan mitigasi risiko, karena di tempat, di BRI itu, yang yang tadi Gus yang gereja tadi Gus, ya Pak Mufti ya, Pak Mufti, bahwa itu sudah selesai. Karena itu dalam rangka mitigasi risiko saja, karena jauh anu Pak Mufti, jauh jaraknya itu

bukan wilayah kerja Pangkalan Kerinci gitu dan itu udah selesai dengan SOP yang kami segera respon.

Berikutnya tentang tadi terkait dengan strategi BRI, Bank Agro dan sebagainya. Pak Mufti izin, bahwa itu semua menjadi bagian dari penyusunan strategi kami jangka panjang. Hari ini kami sudah menyusun transformasi jilid 2 gitu, walaupun jilid 1 baru separuh jalan tapi nyata nyatakan kondisi apa perubahan ini sangat dinamis, sehingga kami harus menyesuaikan kembali ditransformasi jilid 2 itu. Nah, itu kira-kira yang menjadi bagian apa ya *concern* kami untuk mengelola BRI yang Insya Allah akan terus fokus pada UMKM.

Nah, terkait dengan UMKM sendiri tadi juga ada *concern* dari Anggota Komisi XI, bagaimana dengan data UMKM. Hari ini kami terus berkomunikasi dengan tim Kementerian Koperasi untuk, mudah-mudahan waktu dekat, dengan sudah ada izinnya dari Bapak Ibu semua untuk integrasi ultra mikro ini, maka kami sesungguhnya mungkin sudah siap untuk mendapatkan data UMKM itu hampir 30 juta, dan ada *gap* dan itu menjadi pekerjaan kami untuk bisa memetakan mereka ada di mana.

Berikutnya terkait dengan tadi juga ada *concern* dari Anggota terkait dengan bagaimana BRI ini untuk bisa menghadirkan layanan yang setara dengan yang hari-hari mungkin menjadi beban para pelaku UMKM, siapa itu, *rentenir*, dan hari ini kami sudah mencoba melakukan *piloting-piloting* dan mudah-mudahan tidak lama lagi kami bisa *roll out* menghadirkan layanan-layanan layaknya sepadan dengan *rentenir* dan ini dibutuhkan transformasi teknologi dan *culture*, yang barangkali setiap ketemu Pak Narso selalu itu yang disampaikan, *go smaller, go shorter*.

Demikian Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan yang kami bisa sampaikan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak.

Jadi memang kita mengerti keterbatasan yang tadi Bapak sampaikan, dan dari mungkin belasan juta ya mungkin ada kalau angka tadi Pak Nusron sampaikan ada 2.100 saya rasa mungkin saja itu terjadi gitu.

F-PG (NUSRON WAHID):

Pak 2.100 dari 40.000 Pak di Kabupaten Jepara Pak.

KETUA RAPAT:

Oh iya lah, nggak, maksud saya gini.

F-PG (NUSRON WAHID):

Itu berarti 5% Pak.

KETUA RAPAT:

Jadi nanti kalau dia yang seperti itu, saya rasa nanti bisa langsung *follow up* lagi aja ke Pak ini, setuju Pak ya, ke Pak Direktur. Iya maksudnya supaya ada maksudnya terhadap yang masalah Pak Nusron sampaikan supaya ada *follow up action*-nya, setelah ini nanti bisa langsung ke Pak Supari ya, itu Pak Nusron ya.

Kita ke Pak Sis, silakan Pak dari BNI.

DIREKTUR UTAMA PT BNI (PERSERO) TBK:

Terima kasih, Pimpinan.

Pak Martin Manurung yang kami hormati.

Pak Sumarjaya Linggih.

Bapak Ibu Anggota Komisi VI yang kami hormati.

Pertama kami sampaikan juga bahwa program ini kita mulai di bulan akhir bulan Agustus ya BPUM ini, dengan waktu yang singkat kita harus menyalurkan dalam waktu cepat ya. Oleh karena itu, kami mengejar ketertinggalan-ketertinggalan waktu itu kami menyadari bahwa apa yang menjadi catatan-catatan dari Anggota Komisi VI tadi kami menyadari bahwa itu menjadi masukan, perbaikan kami ke depan dan penyempurnaan. Termasuk juga yang disampaikan Bapak-Ibu semuanya tentang simplifikasi, termasuk juga prosesnya. Ini akan menjadi perhatian kami untuk perbaikan kami, dan kami akan terus melakukan kordinasi dengan Menkop UKM untuk perbaikan-perbaikan.

Beberapa hal yang tadi menjadi catatan di luar BPUM termasuk ada beberapa yang disampaikan oleh Pak Mufti di antaranya adalah Kartu Pra Kerja Pak. Kami akan menjadikan ini sebagai langkah berikutnya Pak. Jadi *guidance* sampai sesuai dengan saran Bapak tadi, menjadi *guidance* untuk menjadi para mereka setelah lulus pra kerja, 5,9 juta ini, karena menurut catatan itu ada 385 yang menjadi wirausahawan Pak. Jadi ini adalah salah satu potensial juga untuk ke depan menjadi wirausahawan yang bisa diberikan juga *guidance* dan termasuk juga mungkin usaha kecilnya diberikan modal kerja berupa KUR Pak, demikian Pak.

Nah, kemudian juga kaitanya dengan Pak Nusron tadi tentang zakat Pak. Zakat ya saya juga beberapa hari yang lalu ketemu dengan Pak Kyai Nur Ahmad Pak, kita untuk sudah mulai kerjasama Pak untuk dengan Baznas ini, BNI selama ini melalui Pak Muis dan Pak Muis disalurkan melalui Baznas, kami akan lebih intensif lagi Pak, Pak Nusron terima kasih masukannya.

Pak Sonny tentang tadi *slip* yang ada di Bayuwangi Pak, kami akan teliti Pak untuk perbaikan kami Pak, jadi kami akan koordinasikan, akan kami selesaikan Pak yang 1 juta 6 ratus bagaimana nanti.

Kemudian fokus dari BNI seperti tadi ditanyakan oleh Pak Abdul Hakim, ya kami sudah sampaikan bahwa BNI ini akan menjadi bank yang orientasinya adalah bank yang global dan internasional, bagaimana juga kami akan mengembangkan para pelaku UMKM ini untuk melakukan pasar, ekspansi pasar luar negeri juga. Nah, karena kami punya cabang, 7 cabang *outlet* di luar negeri, ini yang akan kami manfaatkan sebagai penghubung mereka untuk menjadi pasar di luar negeri. Jadi ini adalah salah satu komitmen kami bagaimana mengembangkan UMKM yang ekspor, yang *oriented* ekspor, demikian Pak untuk UMKM-nya.

Kemudian, Ibu Sondang tadi, tentang bagaimana kami melakukan penurunan *cost of fund* tadi sudah disinggung oleh Pak Mufti juga. Terima kasih Pak Mufti ini berkat dukungan Bapak juga ini Bapak-bapak semuanya, pada Anggota Dewan Komisi VI ini, bahwa *cost of fund* kami saat ini sudah menurun Pak, jauh dibanding yang lain dan alhamdulillah ini mungkin mudah-mudahan ini bisa menjadi pemicu Bu Sondang untuk menurunkan *rate* yang lebih baik sehingga sektor *real* akan berjalan lebih cepat lagi.

Demikian.

Terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Sis.

Selanjutnya ke Pak Wahyu, Pak Putrama Wahyu Setiawan.

DIREKTUR UTAMA PT JAMKRINDO:

Terima kasih, Pimpinan.

Baik, saya izin merespon atas beberapa pertanyaan, arahan, dan masukan dari Pimpinan maupun Anggota. Tadi disampaikan oleh Pak Mufti, kemudian juga Pak Abdul Hakim, dan juga Pak Hendrik Lewerissa.

Secara ringkas dapat kami sampaikan bahwa kami memang ditugaskan oleh pemegang saham untuk menjadi pengurus di Jamkrindo, di akhir tahun lalu, persis arahnya adalah seperti disampaikan oleh Bapak-bapak Anggota tadi yaitu untuk memperbaiki *revenue stream* yang saat ini masih sangat tergantung pada Program Pemerintah. Jadi kami melakukan beberapa transformasi, salah satunya adalah dengan penguatan sisi manajemen risiko dengan bekerja sama dengan Bank Himbara yang memang telah memiliki kapabilitas lebih unggul dari sisi penerapan manajemen risiko khususnya *four eyes principle*.

Kemudian yang kedua, terkait dengan pengelolaan dana PNM sesuai dengan amanat dari undang-undang bahwa PT Jamkrindo ini tidak diperkenankan, tidak diijinkan untuk memperkuat permodalan melalui instrumen pinjaman apa pun. Dengan demikian PNM dari pemerintah merupakan salah satu sumber modal Jamkrindo untuk dapat melakukan fungsinya di dalam penjaminan.

Dan dapat kami laporkan sampai dengan saat ini jumlah penyertaan modal negara di Jamkrindo kurang lebih telah mencapai sekitar 13 triliun dan penempatannya sebagian besar kurang lebih ada 50% di deposito Bank Himbara, kemudian sekitar 20% ada di obligasi negara, kemudian sekitar 10% adalah Reksa Dana BUMN, dan sisanya di instrumen yang lain. Nah, kemudian terkait dengan *ratio risk base capital* seperti *concern* dari Pak Hendrik Lewerissa, dapat kami sampaikan bahwa kami sebagai industri penjaminan, diukurinya adalah menggunakan *gearing ratio* mengingat bahwa terdapat perbedaan sistem pencatatan akuntansi untuk pendapatan, di mana di industri penjaminan yang berlaku adalah pendapatan dibungkus secara *accrual basis* Bapak, sedangkan untuk di industri asuransi berlaku *cash basis*.

Dengan demikian, kami memiliki pendapatan ditangguhkan yang cukup signifikan, yang melebihi dari perhitungan cadangan klaim yang telah diperhitungkan oleh konsultan maupun aktuaria. Jadi dengan demikian kami masih meyakini bahwa tata kelola di Jamkrindo ini terkait dengan tingkat kesehatannya, kemampuan untuk memperhitungkan pencadangan klaimnya masih sesuai dengan ketentuan.

Kurang lebih demikian kami sampaikan Bapak Ibu Anggota, Pimpinan,
Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik.

Terima kasih Pak Dirut.

Saya rasa cukup ya, cukup. Nanti kita akan monitor apa namanya implementasinya, dan mungkin juga akan ada rapat yang sifatnya lebih teknis lagi karena tentu Pak Menteri nggak mungkin artinya mendalami sampai hal-hal yang terlalu teknis. Kita mungkin akan rapat di masa sidang berikutnya dengan Pak Deputy Pak ya, dan masa sidang abis reseslah, iya in the *meantime* kan bisa koordinasi terus, udah habis waktu kita juga.

MENTERI KOPERASI & UKM:

Bisa kapan aja kalau dari kami Pak Martin.

KETUA RAPAT:

Ya udah nanti itu kita bawa di rapat internallah, habis ini kita rapat internal kan.

Jadi, terima kasih kepada mitra-mitra kerja kami secara khususnya Bapak Menteri Koperasi dan UKM RI atas penjelasan-penjelasan, dan juga keterbukaan Bapak menjawab pertanyaan dan juga permasalahan yang disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI. Tentu tidak ada semangat lain dari pertanyaan-pertanyaan ini selain memang agar BPUM yang memang

sesuai juga dengan hasil survei sangat bermanfaat itu bisa lebih baik lagi, ya Pak Menteri dan Bapak-bapak sekalian.

Sebelum kita tutup kita akan membacakan draft kesimpulan, oke draft kesimpulan Rapat Kerja Komisi VI DPRRI dengan Menteri Koperasi dan UKM RI, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, Direktur Utama Bank Negara Indonesia Persero Tbk, dan Direktur Utama PT Jamkrindo tentang evaluasi pelaksanaan BPUM, harusnya ini pake dan ya, dan tindak lanjut kunjungan spesifik Komisi VI DPRRI di Jawa Tengah, itu kasih dan dong, bukan koma itu, judul-judul ya, Kamis 1 April 2021 :

1. Komisi VI DPRRI meminta Menteri Koperasi dan UKM untuk mempertimbangkan kembali Pemenkop, Permenkop dan UKM Nomor 2 Tahun 2021 terkait dengan, tadi ini sudah saya tambahkan bukan itu, sudah ditambahin belum, dan pelaksanaannya dan kebijakan pelaksanaannya ya.

F-NASDEM (SONNY T. DANAPARAMITA) :

Maksudnya yang mempertimbangkan. Kenapa tidak langsung untuk melakukan revisi saja, saya mengingatkan pimpinan. Jadi, tadi saya sampaikan kalau konsiderannya itu kan meningkatkan para penerima manfaat, tapi kemudian dalam Ketentuan Peralihan Pasal 18b menyebutkan terhadap yang sudah dapat dimungkinkan untuk dapat kembali, tapi saya kemudian apa, kalau melihat alurnya tadi ternyata ini juga butuh waktu, yang sampe sekarang saya nggak tahu ini batas penyalurannya kedua kapan. Kalau mau memang tidak mungkin ya udah, yang pernah dapat aja dikasih semua pasti akan segera selesai.

KETUA RAPAT:

Iya saya rasa itu ranah dari eksekutif untuk mencabut, tapi.

INTERUPSI F-PKB (Drs. H. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Ketua, Ketua interupsi sebentar.

KETUA RAPAT:

Ya.

Siapa tuh, hah?

F-PKB (Drs. H. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Mohammad Toha.

KETUA RAPAT:

Ya, ya.

F-PKB (Drs. H. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Yang saya pantau dari pertanyaan-pertanyaan dan saran temen-temen, itu masalah pengusulan, jadi pengusulan dan penyaluran mestinya.

KETUA RAPAT:

Ya, ya terkait dengan pengusulan dan penyaluran betul, itu salah itu, Permenkop dan UKM Nomor 2 Tahun 2021 dan kebijakan pelaksanaannya, terkait dengan pengusulan dan penyaluran, langsung bantuan produktif usaha mikro Banpres ya, bukan bantuan produktif, Banpres. Jadi ini singkatan dalam singkatan ini Pak Menteri ya, Banpres Produktif ya, Banpres, Banpres, coba coba Banpres, bantuannya nggak usah, udah Banpres Produktif Usaha Mikro, memang itu singkatan dalam singkatan, gitu kan. Saya rasa ini permintaan kita pada Pak Menteri, tadi Pak Menteri sudah mengatakan akan membawa usulan-usulan kita dalam rapat di PEN Pak ya, Komite PEN ya.

F-PG (NUSRON WAHID):

Redaksinya Ketua.

KETUA RAPAT:

Maunya gimana.

MENTERI KOPERASI & UKM:

Sedikit saja.

Saya pikir perlu penjelasan sedikit ya. Karena ini udah berjalan kan gitu, kalau saya berubah lagi itu juga *complicated*, walaupun kan di awal seperti yang catatannya Pak Sonny kan di sepertinya antara konsideran dengan itu kan tidak sejalan, karena memang kan di tengah jalan, yang tadinya kami ingin 24 juta, kemudian jadi 12,8 dan kemudian juga oleh Komite PEN kami disarankan untuk, disarankan untuk yang yang pernah menerima dulu, karena kita ngejar waktu, waktu kuartal satu. Jadi menurut saya tuh agak sulit ya nanti, meskipun nanti saya akan coba bahas di Komite PEN, karena ini sudah berjalan hampir separonya begitu.

Nah, kekhawatiran dari teman-teman mengenai data, misalnya apakah nanti ada kepentingan politik dari Kepala Dinas. Nah, ini yang kita kami moderasi, sehingga nanti misalnya, karena begini ke kami pun data banyak dikirim oleh koperasi, oleh ini. Nah, itu kami akan kasih ke daerah Pak untuk konsolidasi datanya, jadi kami juga bisa bisa lakukan seperti itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik Pak Menteri, makanya saya tambahkan itu Pak tadi. Jadi memang kita meminta mempertimbangkan kembali Permenkop itu, lalu saya tambahkan dan kebijakan pelaksanaannya.

F-PG (NUSRON WAHID):

Pak Martin, kita kembali ke *to the point* aja Pak Martin, mayoritas Anggota DPR di Komisi VI ini meminta lembaga pengusulnya tidak tunggal sesuai dengan di Permenkop. Mayoritas Anggota DPR di sini menghendaki Permenkop Nomor 2 Tahun 2021 direvisi, terutama yang menyangkut tentang lembaga pengusul, dari lembaga pengusul yang sifatnya tunggal yaitu Dinas Koperasi Kabupaten dan Kota dan Provinsi menjadi 5 yaitu, pertama dari K/L kemudian dari koperasi ya kan, kemudian dari PNM, dan dari BRI maupun bank bank bank penyalur juga boleh mengusulkan. Kita kembalikan pada wilayah itu. Tinggal pertanyaannya adalah Pak Menteriya bersedia apa tidak, gitu aja Pak, kita ke, mayoritas saat tadi, saya tangkap mayoritas semua meminta untuk revisi itu, gitu Pak.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Iya memang betul.

F-PG (NUSRON WAHID):

Kali ini kita redaksi kan aja di situ, bahwa Komisi meminta koperasi, Menteri Koperasi dan UKM untuk merevisi Permenkop itu aja, nggak usah ada kata mempertimbangkan, untuk merevisi Permenkop dan UKM Nomor 2 Tahun 2021, terutama yang mengenai lembaga pengusul, iya kan, lembaga pengusul ya program.

KETUA RAPAT:

Coba itu yang ada yang ditulis tadi jangan langsung dihapus nanti kita baca dua versi itu, ya kan. Nah, ini sekarang yang pikirannya Pak Nusron biar ditulis dulu.

F-P. GERINDRA (KHILMI):

Pak Ketua, Pak Menteri itu kalau menghapus itu Pak Menteri merasa keberatan nggak?

MENTERI KOPERASI & UKM:

Ini Pak, seperti saya sudah sampaikan tadi di awal, argumennya bukan argumen politik bahwa misalnya kenapa di satu pintu itu kita kan ini dibahas di

antar K/L, ada masukan dari pemeriksa juga BPK, KPK, dan kami ada kepentingan juga untuk mengintegrasikan data di daerah. Jadi ini rasional Pak menurut saya. Jadi mohon juga pendapat kami dipertimbangkan seperti itu karena kalau Bapak Ibu sekalian lihat urus, usaha mikro itu, di daerah Pak, bukan kewenangan, kan Undang Undang Daerah sudah diatur ya, usaha mikro itu di pemerintah kabupaten kota, kecil provinsi.

F-PG (NUSRON WAHID):

Tadi Pak usul Pak ya, maka tadi kan jawaban saya apakah dengan Permen Permen Nomor 6 Tahun 2020 itu ada masalah? Berarti apakah data yang diusulkan oleh Himbara itu datanya tidak valid, data yang diusulkan oleh KL-KL itu tidak valid, data yang diusulkan oleh PNM tidak valid, kemudian data yang diusulkan koperasi tidak valid, apakah yang valid itu hanya data dari Dinas Koperasi.

MENTERI KOPERASI & UKM:

Nusron menurut saya jangan didebatin ke sinilah, terlalu lebar, karena kita juga, saya juga ada atasan saya Presiden. Pak Presiden menekankan juga aspek pemerataan Pak, kemarin sulit Pak, sulit betul konsolidasi, ini dari satu daerah misalnya ada dari 5, kami pemerataannya daerah sulit Pak, terus terang sulit. Nah, sehingga kalau misalnya dari semua pengusul ini dikonsolidasi ke daerah, kan kita bisa tahu Pak, persentase per daerahnya, kan aspek keadilan harus ada Pak Nusron.

Jadi mohon maaf ini bukan kami ingin membatasi atau kepentingan politik itu enggak. Kami udah misalkan kalau dari Bapak Ibu sekalian ada diusulkan itu bisa lewat kami, nanti kami konsolidasikan dengan daerah, itu bisa kami jamin Pak, kami jamin. Jadi tidak kami juga menerima usulan dari koperasi, ada perorangan yang juga diusulkan dan lewat surat, asosiasi juga banyak Pak, asosiasi UMKM, lewat kami juga. Nah, kami kan harus konsolidasikan aja, jadi tidak ada masalah, ini tidak, menurut saya tidak akan mengurangi dari aspek ketepatan sasarannya. Tapi kami hanya ingin konsolidasikan datanya itu, karena di Undang-Undang Cipta Kerja kita harus menciptakan data tunggal Pak gitu, data terintegrasi itu aja Pak Nusron.

F-PG (NUSRON WAHID):

Sebentar Pak, sebentar.

F-P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M.):

Ketua Ketua.

KETUA RAPAT:

Mana dulu nih. Pak Nusron?

F-P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M.):

Pak Hendrik Pak.

KETUA RAPAT:

Oo Pak Hendrik.

F-P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M.):

Ketua saya rasa apa yang dijelaskan oleh Pak Menteri tadi saya kira ada pendekatan keseimbangan juga. Kalau toh kebijakan hanya satu lembaga sebagai pengusul, apa yang menjadi aspirasi kawan-kawan itu kan bisa disampaikan, kan itu udah *clear* itu. Itu disampaikan secara eksplisit itu tuh bukan itu implisit lagi, tapi itu eksplisit di-*saved* by Pak Menteri gitu loh. Jadi saya kira kita tahulah, kita tahu apa yang harus kita lakukan.

Saya kira saya kira demikian Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saya rasa gitu.

F-PG (NUSRON WAHID):

Sebentar, bagaimana Pak?

KETUA RAPAT:

Iya ya boleh, terakhir ya.

F-PG (NUSRON WAHID):

Terima kasih Pak.

Ya, saya kira meskipun usulannya itu dari banyak lembaga. Saya kira juga datanya tersentralisasi menjadi satu data pada akhirnya, kan hanya sumber pengusul, pada akhirnya juga 1 data, datanya itu ada di mana? Di Kemenkop, yang menentukan akhir semua dan berbasiskan NIK. NIK juga satu data, kalau alasannya itu pemerataan kenapa enggak dibagi kuota saja, kalau memang yang kuota berdasarkan basis penduduk, kalau alasannya itu.

Jadi kalau memang dari datanya dari berbagai lembaga itu sudah terlalu numpuk di Kabupaten Pasuruan misal, dari jumlah kuota penduduk melebihi, ya tinggal dikurangi saja, tidak usah di-*acc* yang di daerah tersebut. Tapi peluang lembaga pengusul di luar lembaga dinas, saya mengusulkan tetep tentu dibuka untuk itu, ya kan, kalau itu memungkinkan dengan berbagai alasan, tidak harus tunggal pada lembaga dinas. Kalau alasannya pemerataan saya setuju, tapi pemerataan tidak hanya satu pintu lewat dinas,

lewat jalur manapun juga ada unsur pemerataan, kalau aspeknya pemerataan.

Kalau memang ada unsur korup, KPK ngasih masukan, ya udah disanksi aja, yang mau main-main korup itu, yang lembaga-lembaga pengusul itu kalau memang ada unsur seperti itu. Kalau BPK ngusulkan seperti itu ya sudah, lembaga pengusulnya itu yang dikasih sanksi di-*blacklist*, kalau yang kemarin main-main, kalau memang BRI-nya datanya nggak valid ya BRI dikasih sanksi di-*blacklist*, bukan kemudian ditutup jadi satu pintu gitu, itu maksud saya Pak.

F-P. GERINDRA (KHILMI):

Pak Ketua saya tanya sebentar Pak Ketua, sama.

Pak Menteri ini demi kebaikan kita semua ya, kemarin dengan pendataan 5 pengusul, itu ada data yang ganda nggak, misalnya dari BRI ngusulin orang ini, terus dari ini, apa ada *double* gitu loh.

MENTERI KOPERASI & UKM:

Ya itu *double double*, *double double* itu yang sulit, iya karena kan.

ANGGOTA:

Usul Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sebentar dulu.

MENTERI KOPERASI & UKM:

Karena kan, justru itu kami juga sekarang kepala-kepala daerah minta data kepada kami gitu, yang dari daerah masing-masing kan gitu kan, sehingga di bawah itu sekarang jadi issue, loh ada orang yang tidak mengusulkan, maksudnya diusulkan itu, kok nerima. Yang di yang diusulkan malah tidak nerima. Nah, itu kan memang terjadi akibatnya.

F-PG (NUSRON WAHID):

Kalau gitu kan ada lembaga penyusulannya Pak.

MENTERI KOPERASO & UKM:

Yang lima kan yang mengusulkan.

F-PG (NUSRON WAHID):

Salahkan BRI-nya dong Pak kalau gitu.

MENTERI KOPERASI & UKM:

Bukan begitu Pak, bukan, jadi begini misalnya.

F-PG (NUSRON WAHID):

Mayoritas pengusulnya kan BRI dan PNM kemarin, mayoritas pengusulnya.

MENTERI KOPERASI & UKM:

Misalnya ada UMKM sepuluh diusulkan oleh 5 ya kan. Nah, di lapangan itu dianggap kok saya tidak mengusulkan, padahal diusulkan oleh asosiasi, padahal diusulkan oleh koperasi, sebenarnya diusulkan gitu, jadi itu aja. Jadi sekarang Pemerintah Daerah meminta data ke kami, yang daerah keseluruhan yang lewat BRI berapa, yang lewat lembaga berapa gitu loh. Jadi kami harus mengkonsolidasi diakhir kan gitu.

Nah, karena itu dipencanaan kan kalau harusnya kan dari awal Pak, harusnya kan 20 juta gitu loh, 20 ribu per kabupaten kalau mau dirata-ratain gitu, itu aja. Dan ini tidak ada maksud apa apa jadi misalnya sekarang kalau Bapak Ibu masih di daerahnya masih ini, kami tampung Pak, kami kami konsolidasikan dengan daerah, itu aja, nggak ada, makanya nanti teknisnya ajalah, ini kan lebih ke teknis usulan itu, jadi dan ini sudah jalan Pak, sudah separuhnya, karena kami harus ngejar waktu.

F-PKB (Ir. H.M. NASIM KHAN):

Oke, Pimpinan kami dari PKB.

KETUA RAPAT:

Sebentar dulu, Pak Sonny mau ada usulan katanya.

F-PDIP (SONNY T. DANAPARAMITA) :

Gini aja konkrit saja, menurut saya jadi tetep untuk merevisi Permenkop dan UKM tapi tidak usah spesifik nyebut lembaga pengusul. Kami memahaminya apa menteri bahwa ini adalah domain Peraturan Menteri Keuangan meskipun masukan dari yang lain juga, kami memahami bahwa pengusul itu satu karena ini terkait dengan data tunggal.

Yang kedua soal pemerataan. Saya sendiri juga ngalami ada masyarakat itu sudah daftar ke kita, daftar ke beberapa tempat. Nah, cuma masalahnya ini kan butuh percepatan, kita ubah sesempurnanya, tapi kalau ternyata batas penyalurannya misalnya kurang satu bulan lagi, nggak ada

gunanya juga, banyak lembaga pengusul tapi slotnya tinggal 3.000 atau 3 juta nggak ada gunanya juga, karena tadi sudah di sampai sekitar 5 ribu, oh tiga juta.

.....:

50% sudah.

KETUA RAPAT:

Baru 50%.

F-PDIP (SONNY T. DANAPARAMITA):

Oo 50%, sementara kalau mengacu pada Pasal 18a huruf ini, yang sudah mengusulkan, belum dapat itulah yang jadi skala prioritas, kira-kira seperti itu. Bahwa ada yang usulan baru saya kira yang Pasal 18b yang pernah dapat, saya kira itu jangan skala prioritaslah. Kalau memang sejak awal urusannya adalah pemerataan, dan terkait dengan PEN saya kira kan tiga arah besarnya, salah satunya adalah meningkatkan daya beli masyarakat, ya udah dibikin rata saja, apalagi menjelang lebaran. Sederhananya saya seperti itu kira-kira.

F-PG (NUSRON WAHID):

Sebentar Pak, saya pingin tanya Pak Menteri, kok katanya ini masalah waktu buru-buru memang terget selesainya kapan, kan tetap di bulan Desember.

MENTERI KOPERASI & UKM:

Bukan, kami sudah dapat arahan dari Komite PEN bahwa ini harus selesai di untuk kuartal 1.

F-PG (NUSRON WAHID):

Semua, 12 juta.

MENTERI KOPERASI & UKM:

Iya lah, kira-kira begitu.

F-PG (NUSRON WAHID):

Ini kuartal 1 sudah selesai loh Pak, bulan Maret ini udah tanggal 1.

MENTERI KOPERASI & UKM:

Tinggal, makanya kita masih akan.

F-PG (NUSRON WAHID):

Kan enggak mungkin kalau 12 juta tanggal 1.

MENTERI KOPERASI & UKM:

Kami akan negoisasi lagi, bahwa kami agar bisa mundurlah sampai efek ke kuartal 2 kira-kira gitu, karena uangnya juga baru kemarin kan turunnya.

F-PG (NUSRON WAHID):

Makanya saya Pak.

MENTERI KOPERASI & UKM:

Makanya baru dua minggu harus *nge-push* itu juga, itu juga simsalambim juga kitanya juga.

KETUA RAPAT:

1 Maret ya 1 Maret Pak Menteri ya.

MENTERI KOPERASI & UKM:

Iya.

KETUA RAPAT:

Apa apa Pak Nasim. Nanti nanti kita ini dulu nih, kita simpulkan.

F-PDIP (SONNY T. DANAPARAMITA) :

Pak Menteri ini tujuan dari, tujuannya ini loh Pak Menteri, tujuan uang yang akan diberikan ini untuk UMKM itu loh, apa ini untuk daya beli masyarakat atau untuk meningkatkan gitu Pak, peningkatan UMKM gitu loh, saya kan bingung kalau duit sekecil ini, kan harusnya ngasihnya itu dipilah-pilah banget gitu loh. Jadi ini kan uang yang diberikan, ini kan uang APBN ya, tujuannya ini kan harus punya tujuan kita ngasih ini, tujuannya ini untuk daya beli masyarakat atau meningkatkan UMKM itu supaya meningkat gitu loh, ini Pak yang harus Bapak pikirin gitu loh, kalau sekedar dikasih ya dikasih ke BLT aja lebih jelas.

KETUA RAPAT:

Pak Nasim udah?

F-PDIP (SONDANG TIAR TAMPUBOLON):

Pimpinan

KETUA RAPAT:

Pak Nasim, Pak Nasim dulu tadi.

F-PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):

Ya sebentar, Pimpinan yang pertama saya mau interaktif.

Pak Menteri yang 50% sudah terealisasi tadi Pak Menteri bilang karena waktunya mepet, ini kan waktunya baru 2 bulan sudah 50%, itu penerimanya sudah pernah menerima nggak dari cek data?

MENTERI KOPERASI & UKM:

Diatur di Permenkop ya.

F-PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):

Oke, Peraturan Permenkop seperti itu, tetapi bagaimana kok bertolak belakang dengan adanya apa di sini tentang pemerataan Pak. Nah, kenapa kok usulan yang sebelumnya tidak direalisasi, kok malah diberikan kepada yang sudah pernah menerima itu menjadi jadi pertanyaan saya.

MENTERI KOPERASI & UKM:

Iya ini pertama yang saya bilang tadi pemerataan antar daerah Pak, pemerintahan, pemerataan antar daerah.

F-PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):

Iya iya paham, kenapa dikasih kepada yang sudah menerima itu saya.

MENTERI KOPERASI & UKM:

Tadi kan saya udah jelaskan Pak, program ini dikaitkan dengan stimulus untuk kuartal 1 Pak dan itu perlu cepat.

F-PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):

Itu Pimpinan yang menjadi saya bingungkan, jadi

MENTERI KOPERASI & UKM:

Itu poin yang memang disampaikan di Ketua Komite PEN.

F-PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):

Oke berarti dihapus dong tentang bahasa pemerataan UMKM nasional ini dihapus ya kan, stimulus mungkin itu ya.

MENTERI KOPERASI & UKM:

Awalnya kan kami dapat arahan dari Pak Presiden untuk tahun ini tuh supaya ada aspek pemerataan dari 12 juta tahun lalu dibuka 24 juta ya kan, 24 juta. Lalu kami mengusulkan, jadi Komite PEN sudah memutuskan bahwa Program BPUM akan diteruskan.

Nah, mengenai angkanya Pak Presiden waktu itu minta arahan kami supaya ada perluasan, karena masih banyak yang belum menerima ya, juga tadi seperti sebenarnya untuk usaha mikro itu 500 ribu modal juga sudah cukup jadi 1,2 jadinya. Jadi 1,2 jadi dengan anggaran yang lama 1,2 berarti cukup jadi 24 juta orang, tapi kan kemudian kan diputuskan oleh Komite PEN hanya 12,8 kira-kira begitu, dan sudah diarahkan kami untuk untuk diberikan kepada yang sudah nerima dulu ya karena aspek perlu kecepatan.

F-PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):

Ya, ya oke aspek kecepatan sekarang berubah berarti, sampai hari ini saya belum ndak tahu ini nanti mungkin rekan-rekan bisa menjelaskan kepada saya secara pribadi, tapi saya masih belum menangkap ini Pak, pemerataan, percepatan, stimulus yang mana yang mau dikejar saya sampai hari ini terus terang saya belum bisa menjelaskan termasuk Pak Menteri.

Kalau berpikiran saya simpelnya ya untuk rakyat, yang dimaksud Presiden itu pemerataan, yaitu semua bisa menerima seluruh bangsa kita berarti intinya ya, teknisnya secara logika kita, orang yang sudah menerima itu tidak akan menerima kembali, baik itu berbasis data, *error* data, dan apapun itu harus diberikan kepada yang belum pernah menerima. Itu pemikiran saya ya, nggak tahu kalau pemikiran rekan-rekan lain. Itu yang pertama itu saya kira Pimpinan ndak tahu kesimpulan bagaimana nanti mungkin Gus Nusron yang paham.

Yang kedua, masalah peraturan. Kalau peraturan saya kira saya yakin lah Presiden kita tidak mungkin berpikir pendek apa lagi berurusan dengan bantuan sosial, saya yakin, kalau Pak Menteri bisa berkordinasi dengan Pak Presiden mau Permen ini dalam 1 jam dirubah itu bisa terjadi, banyak kementerian lain jangankan satu hari jangankan satu bulan dalam 1 jam Permen bisa berubah kok, ya 1 menit bisa berubah. Ini jadi catatan Pimpinan,

ya Permen ya, pernah terjadi ini Bang Rafly mengusulkan ke Pak Presiden waktu itu dalam kesehatan Departemen Kesehatan dia mengeluarkan keputusan dalam 1 jam, ndak sampai 1 jam ya, bisa berubah ditarik kembali Permen itu, tetapi berpikiran untuk rakyat itu kalau alasannya Permen sulit ya. Itu saya kira kedua.

Yang ketiga, itu menjadi kesimpulan ndak tau nanti stimulusnya bagaimana pembahasannya nanti temen-temen mungkin ada Mas Toha nanti. Yang ketiga kami berharap Pak oke satu pintu misalkan dinas ya, tapi tidak mudah Pak dinas menyelesaikan ini ya kan, tidak mudah. Oleh sebab itu lembaga ini harus ada yang membantu tetap berkoordinasi mungkin seperti kemarin, rekomendasinya dinas ya kan supaya Pak Menteri tadi bilang tidak ada *double data*. Itu saya tahu memang akan terjadi *double*, tapi kan penerima tetap 1 sesuai dengan satu NIK gitu loh Pak, silakan lembaga semua mengajukan ya kan, direkomendasi, dicek supaya ada laporan di dinas daerah saya tahu, supaya daerah punya data itu penting. Kalau daerah tidak punya data itu repot dan sampai hari ini Indonesia tidak punya berbasis data yang benar Pak, segala hal, semua bidang beda-beda Pak datanya itu

Saya kira Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya, saya rasa ini kita balik lagi ke kesimpulan, draft kesimpulan, karena tadi kita sebenarnya udah pendalaman loh ya, jadi ada dua ini ya apa namanya tuh 2 versi, ada yang usulan Pak Nusron itu yang nomor satu, ada yang tadi sudah kita draft itu di nomor 2 gitu.

Jadi kalau usulan Pak Nusron : *“Komisi VI DPR RI meminta Menteri Koperasi, malah ditutup lagi, dan UKM untuk merevisi Permenkop dan UKM Nomor 2 Tahun 2021 terutama yang menyangkut lembaga pengusul BPUM 2021 agar dapat berjalan lebih efektif , efisien, tepat sasaran, merata, sehingga dapat menciptakan multiplier effect pada perekonomian nasional”*. Nah ada yang kedua : *“Komisi VI DPR RI meminta Menteri Koperasi dan UKM untuk mempertimbangkan kembali Permenkop dan UKM Nomor 2 Tahun 2021 dan kebijakan pelaksanaannya terkait dengan pengusulan dan penyaluran Banpres BPUM 2021 agar dapat berjalan dengan lebih efektif, efisien, tepat sasaran, dan merata sehingga dapat menciptakan multiplier effect pada perekonomian nasional”*.

Nah, kalau terkait dengan tadi *concern* dari Bapak Ibu, saya rasa pada waktu konsinyering kalau ikut, itu sudah ada sebenarnya opsi-opsi yang disepakati juga dengan Pak para Pak Deputi dan Pak Sesmen ya ada di situ.

F-PG (NUSRON WAHID):

Apa itu opsinya

KETUA RAPAT:

Bukan, kalau terkait dengan tadi *concern* yang disampaikan, terkait dengan pengusulan dan lain sebagainya, saya enggak tahu waktu itu saya memimpin di perindustrian, ada nggak di sini yang dikonsinyering? Nah, nanti bisa ditanyalah itu apa opsinya. Maksudnya itu makanya saya bilang itu kebijakan pelaksanaan jadi.

F-PG (NUSRON WAHID):

Enggak Pak, Pak Pak Ketua Pak Ketua jangan muter-muter deh, kita kembalikan kepada substansi rapat hari ini, mayoritas peserta rapat itu di sini. Saya enggak tuli, mayoritas rapat itu menghendaki ada revisi terutama lembaga pengusul, Ketua jangan muter ke mana-mana.

KETUA RAPAT:

Loh aku bukan muter-muter.

F-PG (NUSRON WAHID):

Itu aja, Ini ini semua minta kepada hampir semua peserta rapat menghendaki bahwa ada revisi Permenkop Nomor 2 Tahun 2021 tentang terutama berkaitan dengan lembaga pengusul itu aja.

F-P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M.):

Ketua, Ketua, terima kasih Ketua.

F-PG (NUSRON WAHID):

Jangan diputer-puter.

F-P. GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M.) :

Ketua, saya memahami betul apa yang disampaikan oleh Gus Nusron ya, jadi kalau misalnya di antara dua konsep rancangan di atas, rancangan kesimpulan rapat, saya kira antara frasa memohon pertimbangan atau mempertimbangkan dan merevisi seperti diinginkan oleh Pak Nusron tadi, saya kira secara substansi sama saja.

KETUA RAPAT:

Sama.

F-P. GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M.):

Begini, karena begini. Konsep yang Pak Nusron sampaikan adalah meminta, meminta itu kan bukan sesuatu yang mandatory, karena itu bukan kewenangan kita, itu kewenangan eksekutif. Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan kita, kita meminta tapi itu tidak absolut atau itu berbeda artinya dengan memerintahkan atau mengharuskan, itu berbeda maknanya. Meminta itu *propose, we propose* Pak, *please* kalau bisa ini direvisi Pak. Ya jadi sama saja, nomenklatur merevisi dan memohon pertimbangan itu menurut saya sama saja, karena kita dalam posisi meminta, kita memohon kepada Menteri.

Saya kira demikian, Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Oke Pak Hendrik, jadi.

F-PKB (Drs. H. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Hallo Ketua.

KETUA RAPAT:

Siapa nih. Iya Pak Toha ya, nah gimana Pak.

F-PKB (Drs. H. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Jadi kesimpulan pertama dan kesimpulan dua, pilihan pertama dan pilihan kedua itu sebenarnya nggak ada enggak efeknya, nggak ada pengaruhnya, kalau Pak Menteri tadi sudah menyampaikan apa yang disampaikan tadi ya, ya sulit merubah sekarang begitu, menurut saya seperti pengertian Ketua tadi, pengertian Ketua kan begini, sebenarnya peran untuk kebijakan pelaksanaannya.

KETUA RAPAT:

Ya

F-PKB (Drs. H. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Itu kira-kira bisa masuk ke kesimpulan apa nggak, kalau itu bisa ya itu yang kebijakan pelaksanaan, maksudnya itu kan kita semua dalam hati ini Komisi VI ya ikut mengusulkanlah, itu sebenarnya yang ditangkap, kita tangkap tadi. Jadi Pak Menteri coba cari solusi ya dan punya *statement* agar menyampaikan *statement*, agar usulanmu itu juga nanti masuk semua begitu, permasalahannya kan begitu, bukan permasalahan kalimat 1-2 ini begitu Ketua. Jadi saya saya pikir itu Ketua, Ketua sudah mengarahkan ke sana tadi.

KETUA RAPAT:

Yah oke Pak Toha, sebenarnya tadi juga Pak Menteri sudah eksplisit. Ini tinggal kita mau bikin kesimpulan aja, ya udah gimana Pak kita tanya dulu mitra kerja kita Pak Menterinya langsung. Saya rasa memang betul dibilang Pak Nusron bahwa permintaan kita mayoritas di sini agar ada revisi terhadap permenkop itu, itu nanti tinggal Bapak bahas mungkin bersama PEN dan lain sebagainya untuk kemudian menjadi masukan.

Saya pikir itu ya. Kita hapus ya saja nomor 2, Pak Menteri setuju ya?

(RAPAT : SETUJU)

Nomor 2 hapus. Ok.

2. Komisi VI DPR RI meminta PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, untuk berupaya maksimal dalam melakukan pemuktahiran data calon penerima BPUM dan meminimalisir kesalahan input data, agar dalam penyaluran BPUM 2021 dapat berjalan secara efektif, efisien, tepat waktu, dan tepat sasaran hingga ke daerah-daerah terluar, terpencil, dan terdepan di Indonesia sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah. setuju Pak ya?

PEMERINTAH:

Izin Pimpinan.

ANGGOTA:

Cleansing, peng-*cleasing* itu sekarang di penyusul bukan di iya, jadi salah kalau ini.

KETUA RAPAT:

Ya udah koreksi aja, koreksi Pak.

PEMERINTAH:

Barangkali dipotong saja Pimpinan, jadi dipotong sehingga berupaya meminimalisir.

KETUA RAPAT:

Meminimalisir.

PEMERINTAH:

Meminimalisir agar situ terus lanjut Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Langsung aja ya meminimalisir kesalahan input Pak ya, karena tadi kaya contohnya Pak Nusron mungkin ada salah input kan toh, jadi kita nggak tahulah itu di mana komputer itu, gini Pak ya, bener Pak ya. Oke kita ketok ya.

(RAPAT : SETUJU)

3. Komisi VI DPRRI meminta Kementerian Koperasi dan UKM RI, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT Bank Negara Indonesia, Persero Tbk, PT Jamkrindo untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPRRI.

F-PG (NUSRON WAHID):

Pak Ketua, sebelum kesimpulan ketiga saya mengusulkan ada tambahan kesimpulan.

KETUA RAPAT:

Apa itu.

F-PG (NUSRON WAHID):

Poin lain, yang isinya mohon izin : *“Komisi VI DPRRI meminta kepada Kementerian Koperasi dan UKM, karena tidak harus Pak Menteri ini bisa Pak Deputi, untuk memprioritaskan calon penerima BPUM yang sudah ditetapkan pada tahun 2020, tetapi belum terealisasi karena terjadi perbedaan data iya kan, agar dijadikan penerima pada kesempatan pertama BPUM pada tahun 2021”,* gitu Pak.

F-PDIP (SONNY T. DANAPARAMITA):

Subtansinya setuju, tapi redaksinya boleh nambahin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sebentar ditulis dulu yang Pak Nusron, biar ini.

Jadi apa tadi *“Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk memprioritaskan calon penerima BPUM yang sudah ditetapkan pada tahun 2020, tetapi belum, tidak usah pakai yang lagi, tetapi belum terealisasi koma, untuk menjadi penerima, untuk, prioritas udah itu, untuk menerimanya pada kesempatan pertama”,* gitu kan.

F-PKB (Drs. H. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Itu nggak usah setelah koma itu. Untuk menerima.

KETUA RAPAT:

Iya makanya ini ini Pak Guru, gimana Pak Guru.

F-PDIP (SONNY T. DANAPARAMITA):

Pak Toha terakhir Pak Toha paling halus nanti saya dulu Pak Toha.

KETUA RAPAT:

Ya udah, ya udah, oke oke. Apa, Pak Sonny dulu.

F-PDIP (SONNY T. DANAPARAMITA):

Jadi slide yang dimaksud itu, serta ada penambahan, peningkatan jumlah penerima bantuan, itu berbeda lagi maknanya. Jadi bahwa dalam peraturan ini yang sudah pernah menerima itu juga boleh nerima ya, tapi jangan skala prioritas.

KETUA RAPAT:

Nggak ini nggak ada hubungannya itu Pak.

F-PDIP (SONNY T. DANAPARAMITA):

Oh ini enggak ini iya, kalau ini Pak di dalam, dalam Peraturan Menteri Koperasi ini, ini di Pasal 18a. Maksud saya yang belum pernah menerima sudah mengusulkan itu prioritas berikutnya. Yang dimaksud Pak Nusron itu adalah orang yang mengusulkan, sudah divalidasi tapi belum menerima uang. Sudah di SKK-kan tapi belum menerima duitnya.

Yang kedua ada lagi yang sudah divalidasi tapi mungkin karena kuotanya tidak cukup sehingga dia tidak dapat. Yang ketiga, ini orang yang memenuhi syarat tapi belum mengusulkan, mereka sudah berharap-harap ini mau mengajukan. Nah, ini tiga inilah yang harus diprioritaskan, baru kemudian, karena alasan kecepatan waktu terhadap orang yang pernah dapat bantuan kira-kira seperti. Jadi intinya peningkatan jumlah penerima manfaat dan pemerataan.

KETUA RAPAT:

Kalau menurut saya jumlah kan sudah ada ya, artinya sudah dalam tadi paparan Pak Menteri kan sudah jelas tuh, berapa yang harus dicapai oleh Kementerian Koperasi. Saya sih lebih setuju yang ke Pak Nusron, bahwa itu sudah di SK kan, artinya dari sisi apapun secara administratif sudah memenuhi syarat, tapi kemudian belum menerima, ini kita kasih *concern* supaya bisa menerima dalam kesempatan pertama, kita kasih catatan, tapi kalau dia baru disurvei atau baru divalidasi belum di SK kan saya rasa, yaitu

diajukan lagi begitu ya Pak Menteri ya, itu kan harus diusulkan karena belum pernah ditetapkan sebagai penerima.

F-PDIP (SONNY T. DANAPARAMITA):

Yang itu diprioritaskan maksud saya, jangankan yang sudah pernah dapat, karena kalau menurut peraturan ini, ya okelah kita enggak mungkin revisi ini ya anggap aja seperti itu, kita kan nggak nambrak peraturan ini, tapi tolong yang sudah pernah dapat jangan diprioritaskan untuk mendapat lagi. Jadi aspek pemerataan dan aspek peningkatan jumlah menerima manfaat itu akan dapat tercapai, saya kira itu begitu, membahasakannya Pak Toha.

KETUA RAPAT:

Pak Toha gimana, masih *on*.

F-PKB (Drs. H. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Masih-masih. Kalau saya tambah ini saja, kalau gitu jadi substansi kita rapat ini tadi belum ada yang masuk ke situ, menurut saya. Jadi itu *oke* Pak Nusron, berarti memang ada masalah yang kemarin yang perlu dicari solusinya sekarang *oke*, apa-apa kalimatnya, akan tetapi untuk tambahan ya, untuk tambahan, mungkin bisa ditambah tetapi belum terealisasi dan tentunya meminta kembali kepada Menteri Koperasi, sama, dan mempertimbangkan masukan-masukan dari, bisa enggak kira-kira ini teknis sih, dari Anggota Komisi VI, maksud saya tersirat di situ apa yang menjadi kebijakan Pak Menteri yang disampaikan tadi.

KETUA RAPAT:

Saya rasa gini deh, saya rasa, saya lebih lihat yang dikatakan Pak Nusron itu, kalau itu kita semua sepakat ya, bahwa itu memang harus sudah Pak Menteri jadi sepakat. Nah, terkait dengan hal-hal yang dikatakan oleh Pak Sonny, saya rasa itu nanti harus di-*follow up* secara teknis ke deputi terkait, nggak mungkin kita satu satu nanti di kesimpulan ini panjang sekali kesimpulan kita Pak, iya saya pikir gitu Pak Menteri ya. Jadi ini ini kita sepakati, permasalahan-permasalahan yang tadi sampaikan Pak Sonny silakan nanti ke Pak Deputi semua atau ke Pak Sesmen.

Oke ya Pak Menteri kita ketok ya nomor 3.

(RAPAT : SETUJU)

4. Komisi VI DPRRI meminta Kementerian Koperasi dan UKM RI, PT Bank Rakyat Indonesia Persero, PT Bank Negara Indonesia Persero, PT Jamkrindo untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPRRI sepakat ya Pak ya, yo.

(RAPAT : SETUJU)

Baik.

Apakah ada penutup Pak, *closing*, cukup?

Baik.

Terima kasih, sekali lagi kepada Pak Menteri, Pak Direktur BRI, BNI, dan juga Dirut Jamkrindo atas kesempatannya kita rapat pada hari ini. Semoga kita semua tetap sehat dan juga sukses dalam melakukan semua tanggung jawab kita sesuai dengan amanah yang ada pada kita masing-masing.

Demikian rapat ini saya tutup.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.14 WIB)

Jakarta, 1 April 2021
a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

DEWI RESMINI, S.E., M.Si
NIP.197104071992032001